



**BUPATI GOWA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI GOWA**  
**NOMOR : 29 Tahun 2019**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN GOWA TAHUN 2020**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI GOWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan dan program prioritas pembangunan tahun 2020 perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020;

b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6133)
27. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
28. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 1 seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 7), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 12);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 18);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2018 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

## BAB II PELAKSANAAN

### **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten Gowa yang berlaku untuk periode waktu satu tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan.
  - b. Bab II : Gambaran Umum kondisi Daerah.
  - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah.
  - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
  - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

- f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - g. Bab VII : Penutup.
- (3) Isi beserta uraian perincian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Program Pembangunan sebagaimana yang termuat dalam RPJMD 2016-2021 dengan tujuan mempercepat penyelesaian masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2019 serta masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2020;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap ketiga dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Gowa 2005-2025 dan RPJMD Tahun Keempat Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2020.

### **Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD atau laporan kinerja semester dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya semester yang berkenaan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.

### **Pasal 5**

Seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah, wajib memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dalam merencanakan Rencana Kerja Anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal

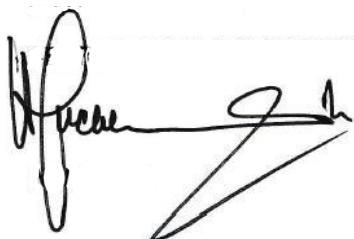
**BUPATI GOWA,**



**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA,**



**MUCHLIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2019 NOMOR 29**

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA**

**NOMOR 29 TAHUN 2019**

**TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020**





## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

**P**embangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah, jika merujuk *pasal 258* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan yaitu terhadap : (1) Pendapatan masyarakat, (2) Kesempatan kerja, (3) Lapangan berusaha, (4) Akses dan kualitas pelayanan publik dan, (5) daya saing daerah, sedangkan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah serta merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*RKPD*) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*RAPBD*) yang terdiri dari *RKPD*, Kebijakan Umum APBD (*KUA*), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (*PPAS*), serta Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (*RKA-PD*).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*RKPD*) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana kerja pemerintah (*RKP*), program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*RKPD*) Provinsi



Sulawesi Selatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. **Secara substansial**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 tahun;
2. **Secara Normatif**, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. **Secara operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. **Secara faktual**, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2020 adalah penjabaran tahun Keempat dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Gowa Tahun



2016-2021, dan sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2019, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Disamping itu RKPD juga mengacu pada RKP dan RKPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Adapun Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2020 ini dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan antara lain dari unsur Pemerintah Daerah bersama jajarannya unsur DPRD Kabupaten Gowa, Kelompok Ahli Pembangunan Kabupaten Gowa sebagai perwakilan/delegasi Perguruan Tinggi. Disamping itu melibatkan juga kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai perwujudan dari Tema Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2020 yaitu **“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Ekonomi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk Pertumbuhan Berkualitas”** Keterlibatan tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sampai dengan Musrenbang Kabupaten Gowa yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 28 Maret 2018.

Dalam melaksanakan pembangunan tahun 2020, ditempuh pendekatan yang dikembangkan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. **Pendekatan politis**, Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan



dengan melibatkan unsur DPRD dalam Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat Kecamatan serta tingkat Kabupaten;

- b. **Pendekatan partisipatif**, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gowa. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Musrenbang;
- c. **Pendekatan teknokratis**, yaitu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah dengan melibatkan unsur Perguruan Tinggi;
- d. **Pendekatan top-down planning**, yaitu sinergi dan komitmen perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan nasional melalui langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan Nasional dan usulan Kebutuhan Dana kepada Kementerian/Lembaga Negara.;
- e. **Pendekatan bottom-up planning**, yaitu penjangkauan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan identifikasi dan perancangan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dari tingkat desa, kelurahan maupun kecamatan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan terintegrasi di Kabupaten Gowa.

Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. **Sinergitas program dan kegiatan** diantara program/kegiatan ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas



Perangkat Daerah maupun Musrenbang baik ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.

2. **Mempertimbangkan kemampuan fiskal keuangan daerah** dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan melalui penyusunan prioritas dari setiap Perangkat Daerah.
3. Berpegang pada prinsip-prinsip **Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih, Profesional Dan Akuntabel Serta Menegakkan Supremasi Hukum** dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengingat kedudukan strategis RKPD, perhatian yang besar dan komprehensif seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD mengingat pentingnya RKPD secara strategis dalam keseluruhan tahap pembangunan daerah. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.



4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dokumen RKPD disusun melalui proses bertahap dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a) Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

- 1) Pengolahan data dan informasi.
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional.
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa.
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Gowa.



- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- 11) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
- 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan.
- 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
- 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- 4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
- 5) Rencana program prioritas daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja PD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja PD Kabupaten Gowa sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Gowa.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum perangkat daerah. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara DPRD, Perangkat Daerah, Bappeda dan delegasi Kecamatan. Proses dan tahapan pelaksanaan



yang dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman yang dimaksud, mencakup :

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gowa dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Gowa pada musrenbang tingkat kecamatan dana atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Gowa.
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

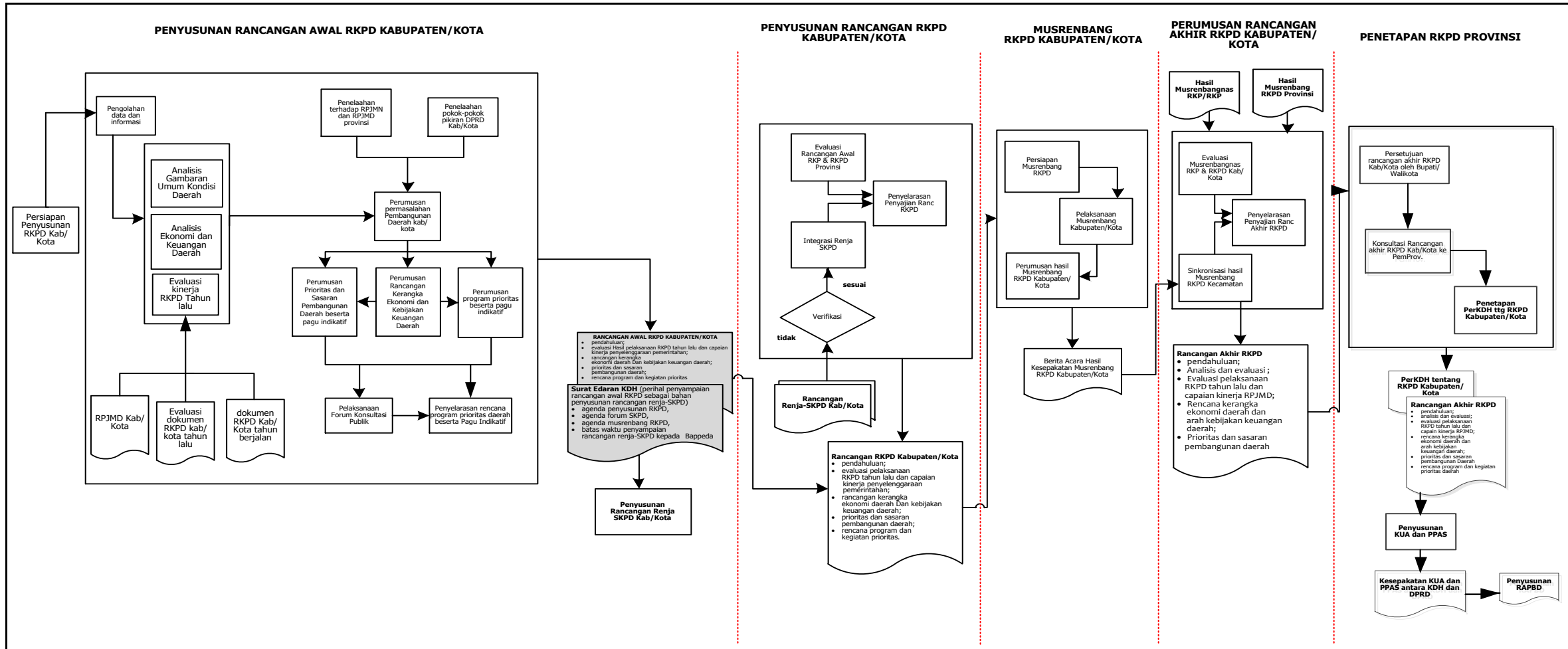
Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan didaerah.



Gambar .1.1  
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota





## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



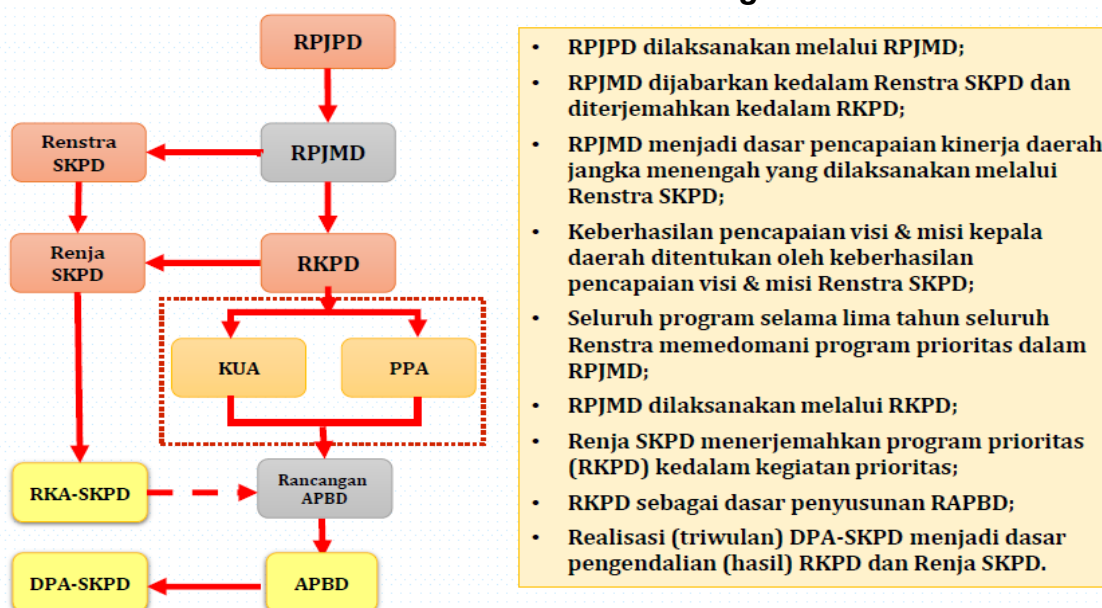
- Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032;
  19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021;
  20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Gowa yang disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan daerah lainnya dan telah diselaraskan dengan dokumen rencana pembangunan tahunan Provinsi Sulawesi Selatan serta dokumen rencana pembangunan tahunan Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD ini selanjutnya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang diserasikan dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang. Pada akhirnya, dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2020. Untuk memberi gambaran hubungan antar dokumen dapat dilihat pada **Gambar 1.2.** sebagai berikut:

**Gambar. 1.2**  
**Arsitektur Dokumen Rencana Pembangunan Daerah**



### 1.4 Maksud dan Tujuan



Maksud disusunnya RKPD Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2020 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 antara DPRD Kabupaten Gowa dengan Bupati Gowa yang selanjutnya akan dijabarkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020;
2. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana kerja (Renja) perangkat daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, pilihan dan penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;



7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

## 1.5. SISTEMATIKA RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan struktur dan muatan seperti yang dimaksud dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Sistematisa Penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

### Bab I. Pendahuluan;

Memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- A. **Latar Belakang**; mengemukakan pengertian, proses penyusunan, kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun rencana dalam periode dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan dokumen RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- B. **Dasar Hukum Penyusunan** memberikan uraian ringkas tentang peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- C. **Hubungan Antar Dokumen** menjelaskan hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan dokumen lain yang relevan.
- D. **Maksud dan Tujuan** berisi uraian ringkas tentang maksud, tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



- E. **Sistematika Dokumen** mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

**Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah**, bagian ini menyajikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

**2.1. Kondisi umum kondisi daerah** bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

*2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi*

*2.1.2. Aspek kesejahteraan masyarakat*

*2.1.3. Aspek Pelayanan umum*

*2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah*

**2.2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD** mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan RenjaPerangkat Daerah tahun lalu dan renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing perangkat daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban masing-masing APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja



keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. **Permasalahan Pembangunan Daerah;** menguraikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas dan fungsi perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2.3.2. *Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah*

**Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan keuangan daerah** memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. *Arah Kebijakan Ekonomi Daerah;*

3.2. *Arah Kebijakan Keuangan Daerah*

**Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah** mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan Tahun 2020.





#### 4.1. Tujuan dan sasaran pembangunan

#### 4.2. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2020

### **Bab V. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### **Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** penetapan Indikator

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

### **Bab VII. Penutup**

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.



## BAB II.

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Kondisi Umum Daerah

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

###### 2.1.1.1. Aspek Geografi

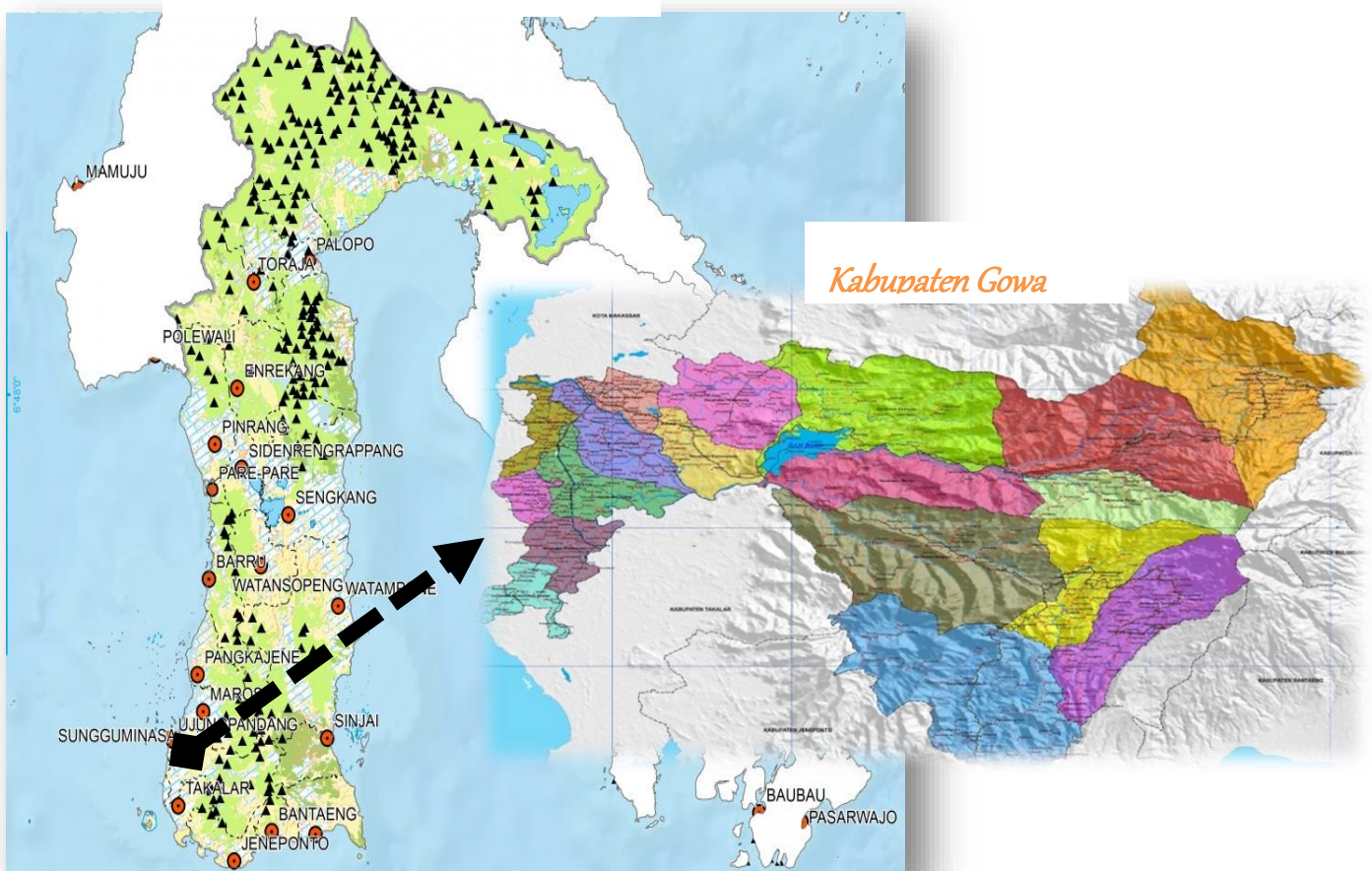
Secara astronomis, Kabupaten Gowa terletak diantara 5°33 - 5°34 Lintang Selatan dan 120°38 - 120°33 Bujur Timur. Letak Kabupaten Gowa dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 – 2800 meter diatas permukaan air laut.

###### 2.1.1.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau 3.01% dari total keseluruhan luas wilayah Sulawesi Selatan (46.717 km<sup>2</sup>) dengan ibukota kabupaten berada di kota Sungguminasa.

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi**

Prov.Sulawesi Selatan





Secara administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 122 desa, 45 kelurahan dan 674 dusun/lingkungan berbatasan dengan 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu :

- **Sebelah utara** berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;
- **Sebelah Timur** dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;
- **Sebelah Selatan** dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
- **Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

**Tabel 2.1**  
Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Gowa  
Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah		
			Kelurahan	Desa	lingkungan/dusun
1	Bontonompo	30,39	2	12	50
2	Bontonompo Selatan	29,24	1	8	41
3	Bajeng	60,09	4	10	62
4	Bajeng Barat	19,04	-	7	32
5	Pallangga	48,24	4	12	60
6	Barombong	20,67	2	5	30
7	Somba Opu	28,09	14	-	28
8	Bontomarannu	52,63	3	6	25
9	Pattalassang	84,96	-	8	36
10	Parangloe	221,26	2	5	20
11	Manuju	91,90	-	7	28
12	Tinggimoncong	142,87	5	2	24
13	Tombolo Pao	251,82	1	8	49

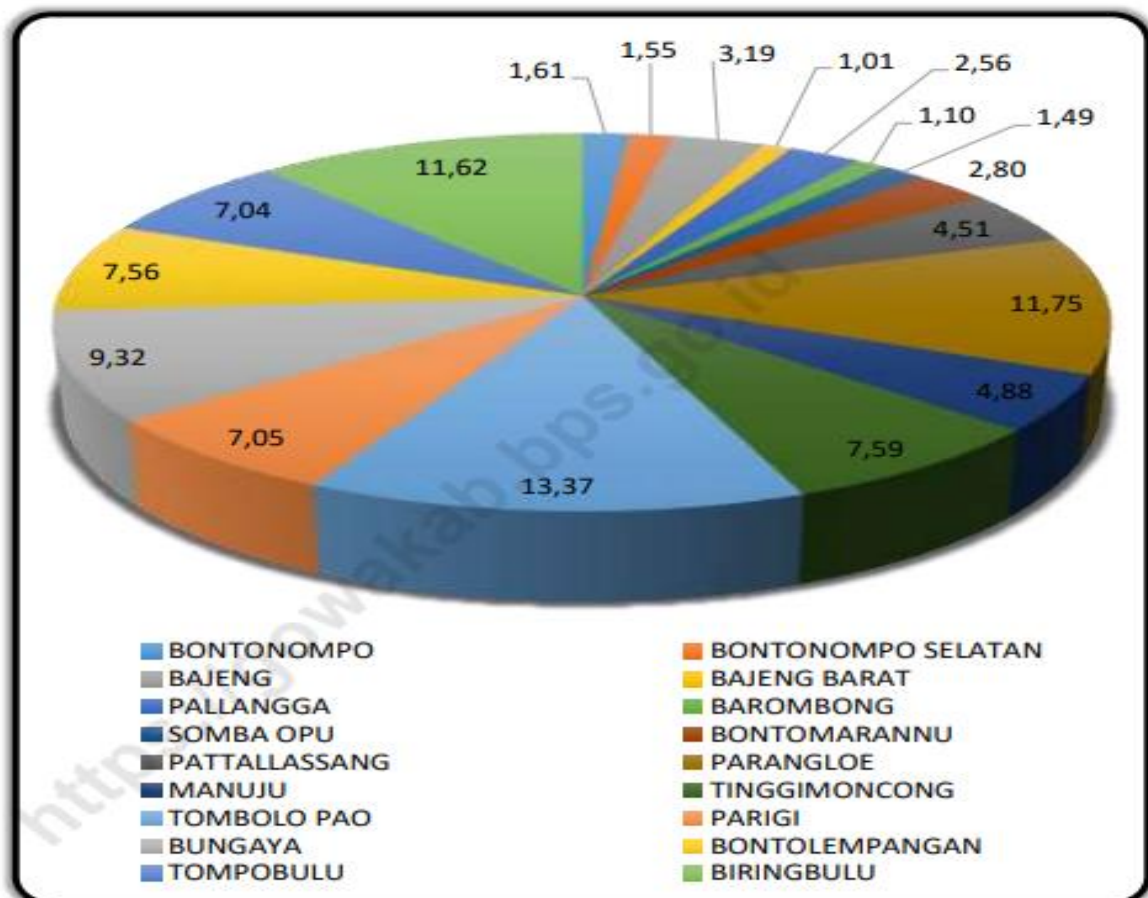


14	Parigi	132,76	-	5	20
15	Bungaya	175,53	1	6	32
16	Bontolempangan	142,46	2	6	29
17	Tompopulu	132,54	2	6	43
18	Biringbulu	218,84	2	9	66
<b>Total</b>		<b>1.883,33</b>	<b>45</b>	<b>122</b>	<b>674</b>

Sumber : BPS Kabupaten Gowa

**Gambar 2.2**

Persentase Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Gowa, 2018



Sumber : BPS, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2018

**Tabel. 2.2**

Jarak dari ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km <sup>2</sup> )
1	Bontonompo	Tamallayang	16,00
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30,00
3	Bajeng	Kalebajeng	12,00
4	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80
5	Pallangga	Mangalli	2,45
6	Barombong	Kanjilo	6,50
7	Sombaopu	Sungguminasa	0,00



8	Bontomarannu	Borongloe	9,00
9	Pattalassang	Pattalassang	13,00
10	Parangloe	Lanna	27,00
11	Manuju	Moncongloe	20,00
12	Tinggimoncong	Malino	59,00
13	Tombolo Pao	Tamaona	90,00
14	Parigi	Majannang	70,00
15	Bungaya	Sapaya	46,00
16	Bontolempangan	Bontoloe	63,00
17	Tompobulu	Malakaji	125,00
18	Biringbulu	Lauwa	140,00

Sumber : BPS, 2018

#### 2.1.1.1.2. Topografi

Topografi merupakan studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain dalam pengertian yang lebih luas, topografi tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan dan bahkan kebudayaan lokal. Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan model tiga dimensi dan identifikasi jenis lahan. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah dan sistem pengaliran. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit memiliki lapisan tanah yang lebih tipis karena tingkat erosi lebih tinggi, sedangkan daerah dengan topografi datar memiliki lapisan tanah yang tebal karena tingkat sedimentasi lebih tinggi. Kecepatan pengaliran air pada topografi datar lebih kecil daripada topografi yang lebih miring.

Topografi Kabupaten Gowa dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan uraian sebagai berikut :

##### **a. Kemiringan Lahan**

Wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas 2 (dua) kawasan, dataran tinggi seluas 1.509,87 km<sup>2</sup> atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km<sup>2</sup> atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonombo,



Bantonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang. Untuk memberi gambaran terhadap kondisi kawasan di Kabupaten Gowa menurut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**

**Kondisi Wilayah Kabupaten Gowa menurut Kecamatan**

KECAMATAN	BATAS WILAYAH				SEBAGIAN BESAR WILAYAH
	SEBELAH UTARA	SEBELAH TIMUR	BELAH SELATAN	SEBELAH BARAT	
BAJENG	Kec.Pallangga	Bontomarannu & Kab. Takalar	Kec.Bantonompo	Kab. Takalar	Dataran Rendah
BAJENG BARAT	Kec.Bajeng	Kec.Bajeng	Kec.Bantonompo	Kab.Takalar dan Kec.Bajeng Barat	Dataran Rendah
BAROMBONG	Kota Makassar	Kec. Bajeng & Kec.Pallangga	Kec.Bajeng	Kota Makassar	Dataran Rendah
BIRINGBULU	Kec. Bungaya	Kec.Tompobulu	Kab. Jeneponto	Kab. Takalar	Dataran Tinggi
BONTOLEMPANGAN	Parangloe &Kec. Tinggimoncong	Tinggimoncong	Kec.Tompobulu	Bungaya	Dataran Tinggi
BONTOMARANNU	Pattallassang	Parangloe	Pallangga & Kab. Takalar	Kec.Somba Opu	Dataran Rendah
BONTONOMPO	Kec. Bajeng	Kab. Takalar	Bantonompo Selatan	Kab. Takalar	Dataran Rendah
BONTONOMPO SEL	Kec.Bantonompo	Kab. Takalar	Kab. Takalar	Kab. Takalar	Dataran Rendah
BUNGAYA	Kec.Parangloe	Bt.lempangan	Kec.Tompobulu	Kab. Takalar	Dataran Tinggi
MANUJU	Kec.Parangloe	Kec.Bungaya	Kec.Bungaya	Kec.Pallangga & Kab. Takalar	Dataran Tinggi
PALLANGGA	Kec.Somba Opu	Bontomarannu	Kec.Bajeng	Barombong	Dataran Rendah
PARANGLOE	Kab. Maros	Tinggimoncong	Kec.Manuju	Bontomarannu	Dataran Tinggi
PARIGI	Tinggimoncong	Bulukumba	Bungaya	Parangloe	Dataran Tinggi





PATTALLASSANG	Kab. Maros & Kota Makassar	Kec.Parangloe	Kec. Bontomarannu	Kec. Somba Opu & Kec. Pallangga	Dataran Rendah
SOMBAOPU	Makassar	Bontomarannu	Pallangga & Kab. Takalar	Pallangga & Kota Makassar	Dataran Rendah
TINGGIMONCONG	Kab. Maros &Kec.Tombolopao	Bulukumba & Kec. Tombolopao	Kec. B.lempangan, &Kab. Bantaeng	Kec.Parangloe& Kec.Manuju	Dataran Tinggi
TOMBOLO PAO	Kab. Bone	Sinjai	Bulukumba	Tinggimoncong	Dataran Tinggi
TOMPOBULU	Kec. Bt.lempangan	Kab. Bantaeng & Kab.Jenepono	Kab. Jenepono	Kab. Jenepono & Kab.Takalar	Dataran Tinggi

Sumber: RPJMD Kab.Gowa

Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan lahan diatas 40 derajat yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Sementara itu produktif pada lahan yang tersedia meliputi kondisi kemiringan lahan sekitar 64,70% dari total luas wilayah berada pada kemiringan 0-40°.

#### b. Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Gowa berada pada elevasi 0–2.800 m dari permukaan laut adalah dominan (24% atau 43,146 ha), daerah Kecamatan Tompobulu dan Tinggimoncong bagian timur dan selatan serta wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Sinjai serta Kabupaten Bantaeng merupakan daerah dengan elevasi antara 2600–2800m dari permukaan laut. Gambaran ketinggian daerah menurut kecamatan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2.4**  
Ketinggian Lahan Per Kecamatan Di Kabupaten Gowa

Kecamatan	Luas	Ketinggian Daerah									
		0 - 25 M		25 - 100 M		100 - 500 M		500 - 1.000 M		1.000 +	
		Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%	Km <sup>2</sup>	%
<b>Bajeng</b>	<b>60,09</b>	<b>60,09</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajeng Barat	19,04	19,04	100	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Barombong</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Biringbulu	218,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>Bontolempangan</b>	<b>142,46</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontomarannu	52,63	52,5	99,76	0,13	),24	-	-	-	-	-	-
<b>Bontonompo</b>	<b>30,39</b>	<b>30,39</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Bontonompo Selatan	29,24	29,24	100	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bungaya</b>	<b>175,53</b>	-	-	-	-	<b>13,43</b>	<b>4,74</b>	<b>14,61</b>	<b>53,9</b>	<b>17,49</b>	<b>21,36</b>
Manuju	91,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pallangga</b>	<b>48,24</b>	<b>48,24</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Parangloe	221,26	51,02	23,06	18,83	2,07	29,99	8,75	35,67	6,12	-	-
<b>Parigi</b>	<b>132,76</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pattallassang	84,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Somba Opu</b>	<b>28,09</b>	<b>28,09</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Tinggimoncong	142,87	-	-	-	-	6,56	4,59	34,7	4,29	01,59	71,11
<b>Tombolo Pao</b>	<b>251,82</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tompobulu	132,54	-	-	2,73	2,06	68,64	1,79	26,81	0,23	37,08	27,98

Sumber : BPS Kab.Gowa

### 2.1.1.1.3. Geologi

#### a. Struktur Dan Karakteristik

Penyelidikan geologi lingkungan regional Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan daerah penyelidikan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa. Secara geologi daerah ini tersusun oleh batuan-batuan sediment dan terobosan Formasi Camba yang berumur Tersier, batuan gunung api dan terobosan yang termasuk dalam kelompok batuan Gunung api Baturappe-Cindako berumur tersier, batuan Gunung Api Lompobatang yang berumur Kuartar, serta endapan alluvial. Daerah dataran yang merupakan daerah terendah di atas permukaan laut, umumnya ditempati oleh endapan alluvial. Kelompok batuan formasi camba dan batuan gunung api tersier umumnya menempati daerah perbukitan dan hanya sebagian kecil yang berada didaerah dataran serta didaerah dataran bergelombang; sedangkan daerah pegunungan yang merupakan bagian tertinggi dalam wilayah Kabupaten Gowa tersusun oleh batuan gunung api Kuartar. Daerah dataran yang umumnya tersusun oleh endapan alluvial merupakan wilayah air tanah produktivitas sedang-rendah. Sedangkan daerah





yang tersusun oleh batuan sedimen formasi camba dan batuan gunung api termasuk batuan terobosan berumur tersier merupakan wilayah air tanah dengan produktivitas sangat rendah hingga langka air tanah. Daerah pegunungan termasuk wilayah air tanah produktivitas sedang kecuali sebagian daerah disekitar puncak merupakan wilayah air tanah langka.

#### ***b. Potensi kandungan***

Bahan galian berupa pasir dan lempung banyak ditambang didaerah dataran terutama didaerah Bajeng, sedangkan sirtu didaerah lembah sungai Jeneberang dibagian hulu bendung Bili-Bili. Daerah bergelombang sering dibuat menjadi lebih landai bahkan datar dengan menggantinya sebagai tanah urug dan batu belah terutama didaerah yang tersusun oleh endapan gunung api tersier. Formasi Camba oleh para peneliti sebelumnya di informasikan mengandung lapisan tipis batubara, sedangkan intrusi batuan gunung api Baturappe-Cindako antara lain menghasilkan mineralisasi logam mulia. Dari segi kebencanaan, daerah Kabupaten Gowa ini tidak termasuk daerah yang rawan gempa bumi karena kondisi geologi lokal dan posisi tektoniknya yang jauh dari zona-zona sumber gempa bumi. Daerah ini juga aman dari bencana gunung api karena gunung api terdekat yaitu Lompobattang sudah termasuk kategori padam, namun beberapa tempat termasuk sangat rawan terhadap bencana gerakan tanah seperti di sebagian lereng Gunung Bawakaraeng dan sebagian daerah perbukitan yang terjal. Selain itu daerah lembah sungai Jeneberang juga rawan terhadap bencana banjir bandang. Analisis geologi lingkungan dan skoring setiap komponen geologi lingkungan yang dimiliki oleh semua daerah dan dianggap berpengaruh terhadap pengembangan wilayah menunjukkan nilainya berkisar antara 33-62 atau kurang leluasa hingga cukup leluasa untuk dikembangkan, kecuali daerah tertentu yang tersisihkan merupakan daerah yang tidak layak kembang. Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan



direkomendasikan sebagai kawasan budidaya umum utamanya pertanian tanaman pangan semusim dan pengembangan kawasan non pertanian seperti pemukiman, perkantoran dan perdagangan. Sedangkan sebagian besar daerah yang agak leluasa lainnya dan daerah yang kurang leluasa untuk dikembangkan merupakan daerah yang direkomendasikan sebagai kawasan budidaya terbatas umumnya pertanian (termasuk hutan). Adapun daerah tidak layak kembang maka direkomendasikan sebagai kawasan lindung. Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian besar terletak didataran Sungguminasa-Takalar, sedangkan yang tidak layak menempati daerah disekitar puncak perbukitan dan pegunungan terjal, sempadan sungai, waduk/danau dan mata air.

#### 2.1.1.1.4. Hidrologi

##### a) Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Gowa memiliki daerah aliran Sungai dengan luas daerah aliran terbesar yakni seluas 881 km<sup>2</sup> dengan panjang 90 km.

##### b) Sungai, danau dan bendungan

Sungai yang terdapat di Kabupaten Gowa ada 15 sungai dimana yang terbesar dikenal dengan Sungai Je'neberang. Sedangkan danau hanya ada 1 (satu) dikenal dengan nama Danau Mawang yang letaknya berada di Kecamatan Somba Opu. Sedangkan bendungan yang dimiliki Kabupaten Gowa dikenal dengan nama Bendungan Bilibili yang terletak di Kecamatan Parangloe, seperti tergambar dalam tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
Panjang Sungai Utama dan Luas Daerah Alirannya  
di Kabupaten Gowa

NAMA SUNGAI	PANJANG SUNGAI	LUAS DAERAH ALIRAN SUNGAI
	(Km)	(Km <sup>2</sup> )
Batang Kaliki	12	18,5



Bikampang	12	6,4
Cadika	48	36
Je'neberang	90	881
Je'nelata	30	226
Koccikang	21	4,25
Lembaya	30	6,1
Malino	45	36
Pa'bundukang	60	38
Pallappakang	23	28
Passosokia	19	17,5
Sapaya	21	9
Sicini	7	8,4
Tanru Rusa	12	15,6
Takapala	12	6,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Gowa

#### 2.1.1.1.5. *Klimatologi*

Tipe Kabupaten Gowa memiliki iklim yang cukup bervariasi. Ini dimungkinkan karena variasi ketinggian tempat wilayah Kabupaten Gowa berkisar dari 0 - 2,83 m dari permukaan laut. Kondisi tersebut menciptakan tipe iklim yg berbeda dimana tipe iklim yang dimiliki yaitu:

- **C2**; daerah yang dapat ditanami tanaman padi terutama palawija 2 kali dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia,
- **C3**; daerah tersebut dapat ditanami padi secara terus menerus dengan jadwal tanam yang tepat sehingga panen jatuh pada saat curah hujan kurang,
- **D3**; daerah tersebut dapat ditanami padi 1 kali dan tanaman palawija 2 kali setahun dengan jumlah air yang tersedia cukup,
- **D4**; daerah tersebut dapat ditanami tanaman padi 1 kali dan tanaman palawija 2 kali dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia.

**Tabel. 2.6**



*Distribusi Tipe Iklim per Wilayah Kecamatan*

*di Kabupaten Gowa*

No	Kecamatan	Tipe Iklim			
		C2	C3	D3	D4
1	ang	0	0	379	4,847
2	angBarat	0	0	0	1,905
3	ombong	0	0	2,076	1,076
4	ngbulu	21,01	0	0	1,281
5	itolempangan	9,88	0	0	0
6	itomarannu	0	0	0	5,175
7	itonompo	0	0	0	3,956
8	itonompo Selatan	0	0	0	3,032
9	ngaya	8,775	0	0	12,783
10	uju	80	0	0	9,474
11	angga	0	0	1,38	3,642
12	angloe	0	0	0	18,906
13	igi	5,748	0	463	587
14	alassang	0	0	0	7,575
15	nba Opu	0	0	0	2,983
16	ggimoncong	1,241	835	9,819	6,479
17	nbolo Pao	0	20,716	732	0
18	npobulu	12,769	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>59,502</b>	<b>21,552</b>	<b>14,85</b>	<b>83,728</b>
<b>PERSENTASE</b>		<b>33.12</b>	<b>12.00</b>	<b>8.27</b>	<b>46.61</b>

Sumber: Sistem Informasi Lahan Kabupaten Gowa, BPS

**2.1.1.1.6. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan merupakan aktifitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan, penggunaan lahan dari sudut pandang kemampuan lahan dengan jalan mengevaluasi lahan dalam hubungannya dengan bermacam-macam karakteristik alami yang disebutkan diatas. penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa pasal (31)



Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gowa ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### **2.1.1.1. 2 Potensi pengembangan wilayah**

Pembangunan wilayah merupakan pembangunan ekonomi dengan mempertimbangkan variable tempat dan waktu. Karakteristik fisik dan sosial wilayah tiap-tiap daerah di Sulawesi Selatan yang beragam memberikan potensi wilayah yang berbeda. Perbedaan Potensi wilayah itu juga menyebabkan terjadinya kesenjangan, baik itu kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar desa dan kota, maupun kesenjangan antar golongan pendapatan. Dikutip dari jurnal Mega aktiva berjudul pengembangan wilayah berbasis potensi sektor unggulan di Kabupaten Gowa yang ditulis oleh P41 Bogor dan PSEKP-UMK lebih lanjut mengemukakan bahwa kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan potensi sektor unggulan selama ini belum disesuaikan dengan daya dukung daerah, ditambah dengan belum tersedianya data sebaran komoditi unggulan daerah yang berbasis sistem informasi geografis atau GIS termasuk di Kabupaten Gowa. oleh sebab itu wilayah harus benar-benar dibangun dengan mempertimbangkan berbagai aspek fisik, sosial ekonomi budaya dan sumber daya alam, terutama dalam proses pemanfaatannya harus mampu mendorong wilayah sekitarnya ikut tumbuh dan berkembang.

Sebagai satu wilayah hinterland ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) letak geografis Kabupaten Gowa merupakan suatu kelebihan berbatasan langsung dengan 6 Kabupaten sekitar yang merupakan bagian dari Kawasan Mamminasata. Mamminasata merupakan konsep untuk membangun wilayah metropolitan di Sulawesi Selatan dengan menggabungkan beberapa wilayah kabupaten/kota diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011, hal ini tentu memudahkan akses dan mobilitas barang dan jasa untuk diperjualbelikan.



Hingga saat ini daerah yang masuk kawasan pengembangan Metropolitan Mamminasata ternyata mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk melihat tingkat kemajuan setiap wilayah di Kawasan Mamminasata menempatkan Kabupaten Gowa sebagai daerah relatif terbelakang yang berarti perolehan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Kabupaten Gowa masih lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita daerah-daerah lain yang masuk pada Kawasan Mamminasata. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Gowa mengacu pada Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2032 dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **2.1.1.2.1 Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud terdiri atas:

##### **1. Kawasan peruntukan hutan produksi;**

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu seluas kurang lebih 20.287 Ha (*dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh hektar*).
- b. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Biringbulu, Bontolempangan, Bungaya, Manuju, Parangloe, Pattallassang, Tinggi Moncong, dan Tombolo Pao seluas kurang lebih 23.102 Ha (*dua puluh tiga ribu seratus dua hektar*).
- c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Biringbulu seluas kurang lebih 309.76 ha (*tiga ratus*



sembilan ribu tujuh puluh enam hektar). Gambaran luasan kawasan hutan produksi Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini :

**TABEL.2.7**

**KAWASAN HUTAN PRODUKSI KABUPATEN GOWA**

<i>Kecamatan</i>	<i>Hutan Produksi Terbatas</i>	<i>%</i>	<i>Hutan Produksi Tetap</i>	<i>%</i>	<i>Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi</i>	<i>%</i>
Kecamatan Biringbulu	3747.75	18.47	4235.78	18.33	309.76	100
Kecamatan Bontolempangan	3775.15	18.61	139.46	0.60		
Kecamatan Bungaya	12.78	0.06	5082.21	22.00		
Kecamatan Manuju		0.00	5851.15	25.33		
Kecamatan Parangloe		0.00	7392.09	32.00		
Kecamatan Parigi	2007.31	9.89		0.00		
Kecamatan Pattallassang		0.00	4.19	0.02		
Kecamatan Tinggimoncong	4432.98	21.85	318.76	1.38		
Kecamatan Tombolo Pao	6246.24	30.79	78.58	0.34		
Kecamatan Tompobulu	65.01	0.32		0.00		
<b>Jumlah</b>	<b>20.287.22</b>	<b>100.00</b>	<b>23.102.22</b>	<b>100.00</b>	<b>309.76</b>	<b>100</b>

**Sumber** : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032

**2. Kawasan Peruntukan Pertanian;**

Penyediaan kawasan peruntukan pertanian menjadi hal sangat penting dikarenakan penduduk Kabupaten Gowa sebagian besar bekerja dan bermata pencaharian pada sektor pertanian atau yang



erat kaitannya dengan sektor tersebut. Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Gowa, terdiri atas:

a. *Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan;*

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas 33.201 Ha (*tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu hektar*), ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Gowa yang beririgasi teknis ditetapkan sebagian sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas 16.409 Ha (*enam belas ribu empat ratus sembilan hektar*) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah





Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.

b. *Kawasan Peruntukan Pertanian Holtikultura;*

Kawasan peruntukan Pertanian Hortikultura dengan luas 12.386 ha (*dua belas ribu tiga ratus delapan puluh enam hektar*) ditetapkan disebahagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

**Tabel. 2.8**  
*Lokasi Kawasan Tanaman Pertanian Pangan Kabupaten Gowa*

No.	Penggunaan	Pertanian Lahan Basah		Hortikultura		Pertanian Lahan Kering	
		Luas (ha)	%	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
1	Kecamatan Bajeng	3,541.68	10.64		-	103.49	0.63
2	Kecamatan Bajeng Barat	1,545.96	4.64		-	29.85	0.18
3	Kecamatan Barombong	1,184.21	3.56		-	1.42	0.01
4	Kecamatan Biring Bulu	1,359.73	4.08	348.21	2.81	3,515.20	21.42
5	Kecamatan Bontolempangan	1,872.04	5.62		-	3,140.60	19.14
6	Kecamatan Bontomarannu	2,051.77	6.16		-	1,061.18	6.47
7	Kecamatan Bontonompo	3,324.38	9.99		-		-
8	Kecamatan Bontonompo Selatan	2,764.42	8.30		-	21.90	0.13
9	Kecamatan Bungaya	1,602.60	4.81		-	6,531.46	39.80
10	Kecamatan Manuju	479.02	1.44		-	1,747.68	10.65
11	Kecamatan Pallangga	3,471.90	10.43		-	105.20	0.64
12	Kecamatan Parangloe	410.22	1.23		-	149.49	0.91
13	Kecamatan Parigi	1,643.72	4.94	1,387.45	11.20		-
14	Kecamatan Pattallassang	1,921.89	5.77		-		-
15	Kecamatan Somba Opu	199.87	0.60		-	0.32	0.00
16	Kecamatan Tinggimoncong	1,043.11	3.13	1,418.13	11.45		-
17	Kecamatan Tombolo Pao	2,700.28	8.11	2,393.92	19.33		-
18	Kecamatan Tompobulu	2,171.53	6.52	6,838.78	55.21	1.60	0.01
	Jumlah	33,288.33	100.00	12,386.49	100.00	16,409.39	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Gowa 2012-2032



c. *Kawasan Peruntukan Perkebunan*

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas **11.029 Ha** (sebelas ribu dua puluh sembilan hektar), ditetapkan disebahagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebahagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebahagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu. Lokasi kawasan dan luasan perkecamatan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel sbb:

**TABEL.2.9**

**LOKASI KAWASAN TANAMAN PERKEBUNAN KABUPATEN GOWA**

No.	Kecamatan	Luas (ha)	%
1	Kecamatan Biringbulu	2.225.25	20.18
2	Kecamatan Bontolempangan	140.35	1.27
3	Kecamatan Bontomarannu	504.47	4.57
4	Kecamatan Bontonompo	42.72	0.39
5	Kecamatan Bontonompo Selatan	6.17	0.06
6	Kecamatan Bungaya	1.174.35	10.65
7	Kecamatan Manuju	82.88	0.75
8	Kecamatan Parangloe	1.153.50	10.46
9	Kecamatan Parigi	312.02	2.83
10	Kecamatan Pattallassang	5.16	0.05
11	Kecamatan Tinggimoncong	4.069.01	36.89
12	Kecamatan Tombolo Pao	1.237.68	11.22
13	Kecamatan Tompobulu	75.20	0.68
<i>Jumlah</i>		<b>11.028.77</b>	<b>100.00</b>

Sumber : RTRW Kab.Gowa



d. *Kawasan Peruntukan Peternakan.*

Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, dan sebagian wilayah Kecamatan Manuju;

e. *Kawasan Peruntukan Perikanan;*

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

✚ *Kawasan peruntukan perikanan tangkap;*

Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada Sungai Je'neberang, Danau Mawang, Danau Tonjong, dan Danau Kalaborang.

✚ *Kawasan peruntukan budidaya perikanan;*

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud, merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar, terdiri dari:

- Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di kawasan waduk Bili-bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe; dan
- Kawasan budidaya minapadi dan budidaya kolam ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan



Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

✚ *Kawasan pengembangan Minapolitan; dan*

Kawasan pengembangan minapolitan, merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga. Kawasan pengembangan minapolitan ini direncanakan terintegrasi dan terpadu dengan Pelabuhan Perikanan (PPI) Barombong di Kecamatan Barombong;

✚ *Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI).*

Pengembangan BBI akan dikembangkan di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bontomarannu, dan Kecamatan Tinggimoncong.

**TABEL.2.10**

**LOKASI KAWASAN PERIKANAN DARAT KABUPATEN GOWA**

No.	LOKASI
1.	<i>Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Barombong, Pallangga.</i>
2.	mbangunan PPI Barombong ( $\pm$ 16 ha).



3.	<i>pengembangan perikanan kolam dan sawah tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Manuju dan Pattallassang.</i>
4.	<i>Salah satu Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bajeng, Bontomarannu dan Tinggimoncong.</i>
5.	<i>pengembangan perikanan air tawar di Waduk Bili-Bili.</i>

Sumber : Dinas Perikanan Kab.Gowa

f. *Kawasan Peruntukan Pertambangan;*

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara terdiri atas:

- Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam meliputi timah hitam dan tembaga yang terletak di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Tinggimoncong, dan Kecamatan Bungaya;
- Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa: zeolit, bentonit, oker, trass, kaolin, sulfur (belerang) yang tersebar di Kecamatan Bungaya, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Biringbulu;
- Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan meliputi: batu kali, batu gunung, tanah urug atau timbunan, pasir, kerikil, dan sertu, terdapat di Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Manuju, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Pallangga, serta di DAS Jeneberang terutama di Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Bontolempangan dan; tanah urug, batu kali, dan kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian



wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong.

*g. Kawasan Peruntukan Industri;*

Kawasan peruntukan industri, meliputi:

- ❖ Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan persampahan ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
- ❖ Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas pertanian dan penduduk KEK Gowa ditetapkan di wilayah Kecamatan Pattallassang;
- ❖ Kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian lagi di wilayah Kecamatan Tompobulu.



#### ***h. Kawasan Peruntukan Pariwisata;***

Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:

❖ *Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud meliputi:*

1. Taman Wisata Budaya Benteng Somba Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;
2. Wisata Makam Syekh Yusuf dan Makam Sultan Hasanuddin, Masjid Tua Katangka dan Obyek Wisata Balla Lompoa; dan
3. Wisata budaya lokal lainnya meliputi Accera' Kalompoang, Appalili, Maudu' Kalompoang, Pa'dekko, Paraga, Pamanca, Pakkarena, dan Songka Bala.

❖ *Kawasan pariwisata alam meliputi:*

1. Pengembangan ruang Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) yang terpadu dengan Taman Wisata Alam Malino di Kecamatan Tinggimoncong;
2. Wisata Alam Bendungan Bili-Bili di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe;
3. Wisata Danau Mawang di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu; dan
4. Wisata Air Terjun Parangloe di Kecamatan Parangloe.

❖ *Kawasan pariwisata buatan meliputi:*

1. Obyek wisata dan olahraga Golf Padivalley di Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang;
2. Pusat rekreasi Gowa Discovery Park (GDP) di Kompleks Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa;



3. Kawasan wisata Ecopolis Pattallasang-Parangloe Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Pattallassang; dan;

❖ Kawasan wisata kuliner di Perkotaan Sungguminasa dan Kota Baru Pattallassang.

*i. Kawasan Peruntukan Permukiman*

Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas:

*i.1. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan;*

a) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luas 5.983 Ha (lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga hektar) ditetapkan di:

b) Kawasan Permukiman Perkotaan Baru Gowa-Maros yang merupakan Kota Satelit Mamminasata bagian timur ditetapkan di Desa Panaikang dan Desa Paccelelang Kecamatan Pattallassang;

- Kawasan peruntukan permukiman Kota Baru Satelit Pattallassang terpadu dengan lapangan Golf Padivalley ditetapkan di Kecamatan Pattallassang;
- Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Parangloe ditetapkan di Kelurahan Parang Kecamatan Parangloe;
- Rencana pengembangan kawasan permukiman ditetapkan bagian selatan Mamminasata meliputi Desa Kanjilo, Desa Tamanyelleng, Kelurahan





Lembangparang di Kecamatan Barombong, Desa Taeng di Kecamatan Pallangga, Desa Panciro di Kecamatan Bajeng serta Kelurahan Bone dan Desa Bontosunggu di Kecamatan Bajeng;

- Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor Jalan Tun Abdul Razak di Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Pattalassang;
- Kawasan permukiman di pusat kegiatan PKN, dan PPK

**i. 2. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan.**

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan luas 216 Ha (dua ratus enam belas hektar) ditetapkan di kawasan permukiman di pusat kegiatan PPL disebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, dan sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao.

**j. Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas:**

**j.1. Kawasan peruntukan perkantoran;**

Kawasan peruntukan perkantoran meliputi:

- Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan.



- Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan skala regional dan kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu dan sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang.
- Kawasan peruntukan pemerintahan skala kecamatan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bajeng, sebagian wilayah Kecamatan Bajeng Barat, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo, sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Parigi, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu .
- Kawasan peruntukan perkantoran swasta.  
Kawasan peruntukan perkantoran swasta ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Barombong, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bajeng.

#### **J.2** Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional



dan skala kabupaten dan/atau kecamatan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi:

**J.2.1** Kawasan peruntukan pasar tradisional ditetapkan di:

1. Kawasan perdagangan tradisional terpadu dengan terminal tipe A di Kecamatan Pattallassang;
2. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malino Kecamatan Tinggimoncong;
3. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao;
4. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Majannang Kecamatan Parigi;
5. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Sapaya Kecamatan Bungaya;
6. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Parang Lompoa Kecamatan Bontolempangan;
7. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Malakaji Kecamatan Tompobulu;
8. Kawasan perdagangan di Kawasan Perkotaan Lauwa Kecamatan Biringbulu;
9. Kawasan perdagangan Limbung di Kecamatan Bajeng;
10. Kawasan perdagangan Tamallayang di Kecamatan Bontonompo;
11. Kawasan perdagangan Pabundukang di Bontonompo Selatan;



12. Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat;
13. Kawasan perdagangan Kanjilo di Kecamatan Barombong;
14. Kawasan perdagangan Borongloe di Kecamatan Bontomarannu;
15. Kawasan perdagangan Lanna di Kecamatan Parangloe;
16. Kawasan perdagangan Moncongloe di Kecamatan Manuju;
17. Kawasan perdagangan Bontoloe di Kecamatan Bontolempangan;
18. Kawasan perdagangan Cappa Bungaya di Kecamatan Pallangga; dan
19. Kawasan perdagangan Panaikang di Kecamatan Pattallassang.

**J.2.2** Kawasan peruntukan pusat perbelanjaan ditetapkan di:

- a. Pasar Induk Regional Mamminasata di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu.
- b. Kawasan pusat perdagangan regional terpadu Kota Baru Mamminasata di Kecamatan Pattallassang.
- c. Kawasan perdagangan Borimatangkasa di Kecamatan Bajeng Barat.
- d. Kawasan perdagangan di Kawasan Kota Baru Satelit Pattallassang di Desa Panaikang dan Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang.



**J.2.3** Kawasan peruntukan pertokoan modern ditetapkan di:

- a. Kawasan perdagangan di Kecamatan Somba Opu;
- b. Kawasan perdagangan di Kecamatan Barombong;
- c. Kawasan perdagangan di Kecamatan Pallangga,
- d. Kawasan perdagangan di Kecamatan Pattallassang; dan
- e. Kawasan perdagangan di Kecamatan Bajeng.

**J.3.** Kawasan peruntukan pelayanan umum, meliputi:

**J.3.1.** Kawasan peruntukan pelayanan olahraga;

- a. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu.
- b. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kecamatan ditetapkan pada kawasan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) secara proporsional.

**J.3.2.** Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kecamatan Somba Opu.
- b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala kabupaten dan/atau kecamatan ditetapkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.

**J.3.3.** Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, sebagian wilayah Kecamatan Somba



Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Pallangga;

**J.3.4.** Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum merupakan kawasan peruntukan pemakaman umum skala regional ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Pattalassang.

**J.4.** Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara

**J.4.1.** Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:

▣ Kawasan Komando Distrik Militer 1409 Gowa di Kecamatan Somba Opu;

▣ Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu;

▣ Kawasan Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VII Wirabuana Pakkatto di Kecamatan Bontomarannu;

▣ Kawasan Komando Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) Bela Negara, Sekolah Calon Tamtama dan Sekolah Calon Bintara Malino di Kecamatan Tinggimoncong;

▣ Kepolisian Resort Gowa di Kecamatan Somba Opu; dan



- Kepolisian Sektor di Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kecamatan Tompobulu.

### 2.1.1.2 Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Tabel dibawah dapat memberi gambaran kawasan lindung dan luas areanya di Kabupaten Gowa:

TABEL.2.11  
KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN GOWA

NO.	KECAMATAN	LUAS (HA)	%
1	Kecamatan Biringbulu	646.73	36.83
2	Kecamatan Bontolempangan	3.18	0.18
3	Kecamatan Bungaya	156.8	8.79
4	Kecamatan Tinggimoncong	678.99	43.68
5	Kecamatan Tombolopao	150.32	7.87
6	Kecamatan Tompobulu	57.22	2.65
	<b>Jumlah</b>	<b>1.693,24</b>	<b>100</b>

Sumber : RTRW Kab.Gowa

*Kawasan lindung meliputi:*

- 2.1.2.2.i.** Kawasan lindung juga merupakan kawasan yang disiapkan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan merupakan kawasan yang



ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan terdiri atas :

▣ *Kawasan Hutan Lindung*

Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.350 (*dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh*) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringbulu dengan luas 4.034 (*empat ribu tiga puluh empat*) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontolempangan dengan luas 481 (*empat ratus delapan puluh satu*) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bungaya dengan luas 5.288 (*lima ribu dua ratus delapan puluh delapan*) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe dengan luas 5 (*lima*) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Parigi dengan luas 2.617 (*dua ribu enam ratus tujuh belas*) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong dengan luas 1.220 (*seribu dua ratus dua puluh*) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 6.784 (*enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat*) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu dengan luas 2.919 (*dua ribu sembilan ratus sembilan belas*) hektar.

▣ Kawasan resapan air ditetapkan dibagian hulu DAS Jeneberang di Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parangloe, dan Kecamatan Manuju serta bagian hulu Sungai Lata di Kecamatan Pallangga.

**2.1.2.2.ii.** Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, danau atau waduk, dan Ruang





Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya, terdiri atas:

- Kawasan sempadan pantai :

Meliputi daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat ditetapkan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Gowa di Kecamatan Bontonompo Selatan.

- Kawasan sempadan sungai;

Kawasan sempadan sungai meliputi:

a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan

c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ditetapkan pada jenis-jenis sungai:

- ✓ Sungai-sungai yang bermuara ke danau dan waduk dan mempengaruhi penyediaan sumber air baku yang ada di danau dan waduk.



- ✓ Sungai-sungai yang bermuara ke lautan. Kawasan sempadan sungai ditetapkan di Sungai Je'neberang, Sungai Je'nelata, Sungai Malino, Sungai Cadika, Sungai Pa'bundukang dan Sungai Pallappakang.
  
- Kawasan sekitar danau atau waduk.  
Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud, meliputi daratan dengan jarak paling sedikit 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi. Kawasan sekitar danau atau waduk, ditetapkan di Danau Mawang di sebagian wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, Waduk Bili-Bili di sebagian wilayah Desa Bili-Bili dan Kelurahan Bontoparang Kecamatan Parangloe, Danau Tonjong di sebagian wilayah Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu, dan Danau Kalaborang di sebagian wilayah Desa Bili-bili Kecamatan Parangloe.
  
- *Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.*  
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dimaksud, terdiri atas RTH Publik yang meliputi lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur dan lahan didominasi komunitas tumbuhan, dan RTH privat. Kawasan RTH kawasan perkotaan ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:



- a) RTH publik minimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 42.096 Ha (empat puluh dua ribu sembilan puluh enam hektar) dilaksanakan melalui pengembangan:
- ▣ Hutan perkotaan dengan luasan 112 Ha (seratus dua belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu, dan sebagian wilayah Kecamatan Barombong;
  - ▣ Kawasan sempadan pantai dengan luasan 8 Ha (delapan hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan;
  - ▣ Kawasan sempadan sungai dengan luasan 43 Ha (empat puluh tiga hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pallangga, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu;
    - ▣ Kawasan sempadan danau atau waduk dengan luasan 46 Ha (empat puluh enam hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang, sebagian wilayah Kecamatan Parangloe, sebagian wilayah Kecamatan Manuju, dan sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu;
    - ▣ TPU dengan luasan 15 Ha (lima belas hektar) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian wilayah Kecamatan Pattallassang dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu;



- ▣ Lapangan olah raga dengan luasan 90 Ha (*sembilan puluh hektar*) ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Pattallassang.
  
- b) RTH privat minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan Kabupaten Gowa atau seluas 21.046 Ha (*dua puluh satu ribu empat puluh enam hektar*). Rencana pemenuhan RTH privat yang dimaksud meliputi:
  - ✚ RTH dikawasan permukiman perkotaan dan di kawasan permukiman perdesaan; dan
  
  - ✚ Pekarangan rumah, serta halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha yang tersebar di kawasan perkotaan PKN, PPK, dan PPL.

**2.1.2.2.iii.** Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, terdiri atas:

- a) *Kawasan taman wisata alam;*

Kawasan taman wisata alam merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Malino dengan luas kurang lebih



3.286 Ha (*tiga ribu dua ratus delapan puluh enam hektar*) ditetapkan di sebagian wilayah Kelurahan Malino, sebagian wilayah Kelurahan Bulutanah, dan sebagian wilayah Desa Bontolerung Kecamatan Tinggimoncong;

- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah ditetapkan di:

- ✚ Benteng Balla Lompoa Sungguminasa di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu;

- ✚ Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Sombu Opu di Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong;

- ✚ Masjid Tua Katangka di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu;

- ✚ Makam Syech Yusuf di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu; dan

- ✚ Makam Sultan Hasanuddin di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu.

b) Kawasan taman buru luas kurang lebih 402 Ha (*empat ratus dua hektar*), terletak di Bissoloro Kecamatan Bungaya;

c) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d luas kurang lebih 41 Ha (*empat puluh satu hektar*) terletak di Kecamatan Biringbulu.

#### **2.1.2.2.iv. Kawasan Lindung Geologi**



Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan sempadan mata air meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dan merupakan wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pattalassang dan sebagian wilayah Kecamatan Bontomarannu.

#### **2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana**

Secara geografis Kabupaten Gowa berada pada kawasan yang rawan bencana alam, bencana alam yang paling sering terjadi adalah tanah longsor dan banjir. selain faktor curah hujan yang cukup tinggi gangguan geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng juga sangat berpengaruh. Meskipun longsor merupakan gejala fisik alami, namun beberapa hasil aktifitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kestabilan lereng. faktor-faktor aktifitas manusia ini antara lain pola tanam, pemotongan lereng untuk aktifitas pertambangan, pencetakan kolam dan sawah baru, drainase, konstruksi bangunan dan kepadatan penduduk. dengan demikian dalam upaya pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan keseimbangan lingkungan diperlukan penataan ruang dan kawasan. Kabupaten Gowa menetapkan beberapa kawasan yang rawan bencana adalah sebagai berikut :

1. Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan gerakan tanah.



- Kawasan rawan abrasi meliputi pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontonompo Selatan;
- Kawasan rawan gerakan tanah meliputi kawasan yang rawan terhadap gerakan tanah ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tinggimoncong, dan sebagian wilayah Kecamatan Parigi.

## **2. Kawasan Rawan Bencana Alam.**

Kawasan rawan bencana alam ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

### **2.1. Kawasan Rawan Banjir.**

Kawasan rawan banjir ditetapkan di Desa Je'nemadingin, Desa Borongpa'lala dan Desa Panaikang di Kecamatan Pattallassang, Desa Borisallo, Desa Belapunranga, dan Desa Bontokassi di Kecamatan Parangloe, Desa Mata Allo, Desa Bili-bili, Desa Sokkolia dan Desa Romanglompoa di Kecamatan Bontomarannu, Kelurahan Samata, Kelurahan Paccinongan, Kelurahan Romangpolong, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Mawang, dan Kelurahan Bontoramba di Kecamatan Somba Opu, Desa Pallangga, Kelurahan Pangkabinanga, Desa Bontoala, Kelurahan Tetebatu, Desa Kampili dan Desa Parangbanoa di Kecamatan Pallangga, dan Desa Pattalikang, Desa Tassese dan Desa Tanakaraeng di Kecamatan Manuju.

### **2.2. Kawasan Rawan Tanah Longsor.**

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di Kelurahan Garassi, Kelurahan Bontolerung dan Kelurahan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong, Desa Bilangrengi, Desa Manimbahoi, Desa



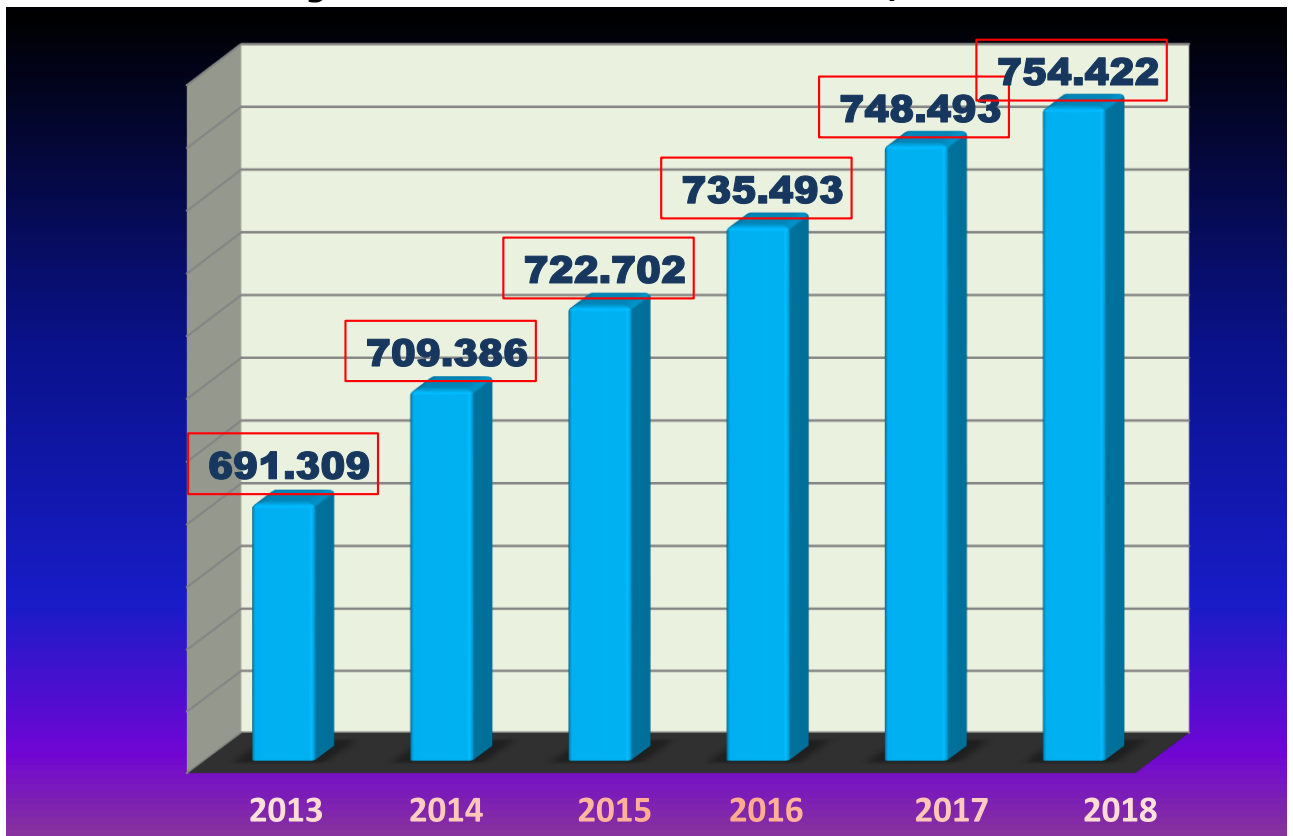
Majannang dan Desa Jonjo di Kecamatan Parigi, Desa Moncongloe dan Desa Tamalatea di Kecamatan Manuju, Desa Pao, Desa Kanreapia, Desa Ballasuka, Desa Erelembang dan Desa Bolaromang di Kecamatan Tombolo Pao, Desa Berutallasa, Desa Taring, Desa Borimasunggu dan Desa Julukanaya di Kecamatan Biringbulu, dan Kelurahan Je'nebatu, Kelurahan Sapaya, Desa Buakkang dan Desa Rannaloe di Kecamatan Bungaya.

### 2.1.1.2. Aspek Demografi

Aspek demografi memberikan ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan. analisis kependudukan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik.2.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2013 s/d 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

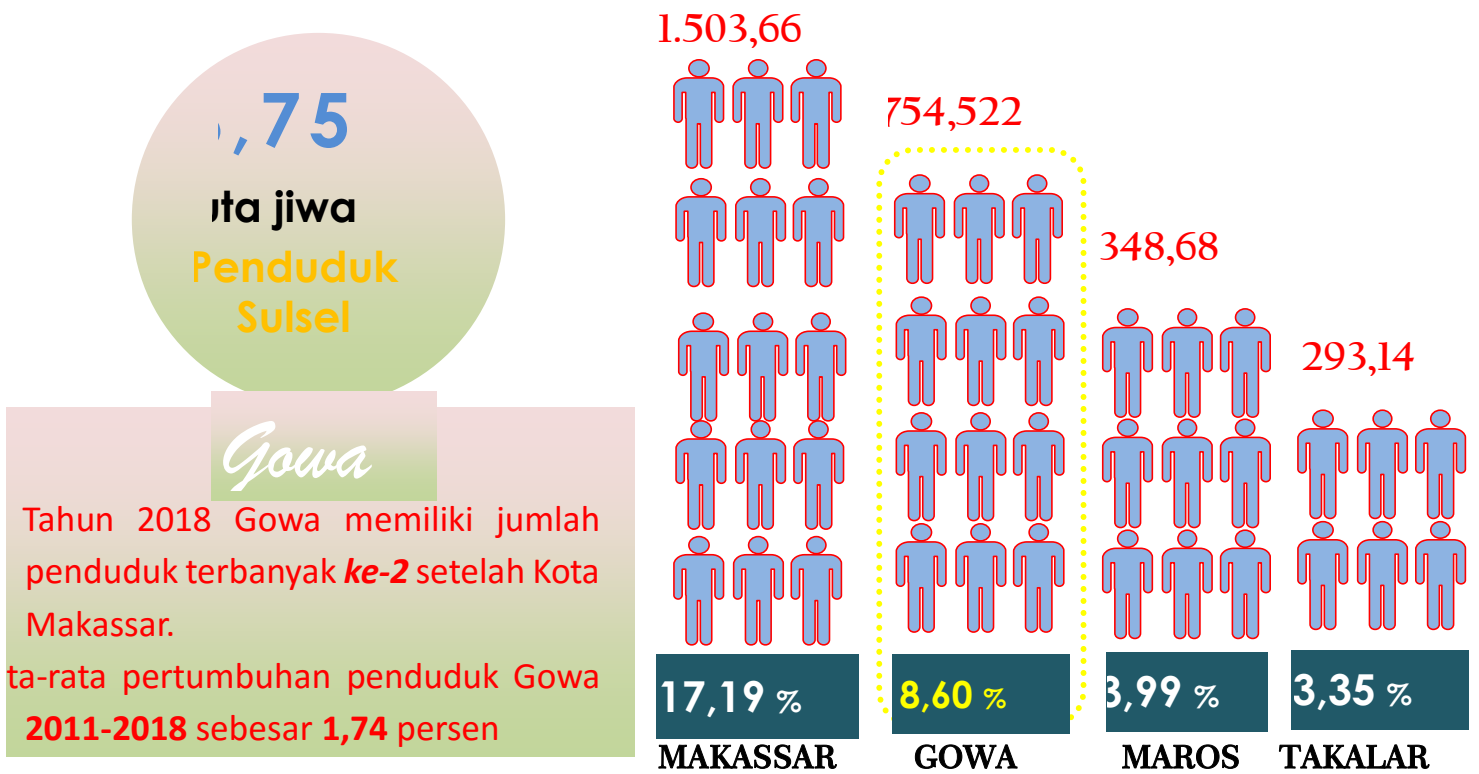
Penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan data BPS pada tahun 2018 tercatat sebanyak 754.422 jiwa meningkat 12.527 jiwa atau meningkat 5,97 persen jika dibandingkan jumlah tahun 2017 yang berjumlah 735.493 jiwa. Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2018 Jumlah penduduk 8,75 Juta Jiwa menjadikan Sulsel





menjadi Provinsi ketujuh dengan tingkat pertumbuhan terbesar, sedangkan Kabupaten Gowa jika dibandingkan dengan 3 daerah sekitarnya (Makassar, Takalar, Maros) Kabupaten Gowa menjadi daerah dengan persentase pertumbuhan penduduk kedua tertinggi yaitu mencapai 8,61 persen. Gambaran Jumlah penduduk di Kabupaten Gowa dan perbandingannya di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini;

**Gambar. 2.3**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk Provinsi Sulsel dan 4 Kab/Kota**  
**Tahun 2018**  
(dalam ribu jiwa)



Sedangkan untuk jumlah dan laju pertumbuhan penduduk perkecamatan di Kabupaten Gowa yang digambarkan dengan menggunakan data tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 mencapai 16,49 persen, berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu menjadi kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi yang mencapai 33,75 persen dan Kecamatan Pallangga dengan laju pertumbuhan 29,85 persen. Perubahan struktur penduduk perkecamatan di Kabupaten Gowa tidak hanya mengalami pertumbuhan jika melihat data yang ada struktur penduduk juga mengalami laju pertumbuhan yang



cenderung berkurang seperti yang terjadi di Kecamatan Bontomarannu yang laju pertumbuhan penduduknya minus 10,74 hal ini juga mencatatkan Kecamatan Bontomarannu sebagai kecamatan dengan laju pertumbuhan terendah disusul oleh Kecamatan Parigi, Biringbulu dan Kecamatan Tompobulu. Penurunan laju pertumbuhan di beberapa kecamatan ini disebabkan perubahan pada struktur penduduk terutama pada proses demografi migrasi penduduk. Untuk memberi gambaran dapat dilihat pada sebagai berikut :

**Tabel. 2.12**  
**Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gowa, 2010, 2016 Dan 2017**

NO	Kecamatan	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			U PERTUMBUHAN PENDUDUK /TAHUN (%)	
		2010	2017	2018	2010-2018	2017-2018
1	tonompo	39.295	42.110	42.368	7,82	0,61
2	tonompo Selatan	28.471	29.882	29.975	5,28	0,31
3	eng	62.334	69.727	70.583	13,23	1,23
4	eng Barat	22.918	25.106	25.338	10,56	0,92
5	langga	98.721	124.049	128.189	29,85	3,34
6	ombong	34.527	40.262	41.000	18,75	1,83
7	nbaopu	130.287	168.021	174.263	33,75	3,72
8	tomarannu	31.250	35.563	36.089	15,48	1,48
9	allassang	21.881	24.366	24.650	12,65	1,17
10	angloe	16.564	18.643	18.889	14,04	1,32
11	uju	14.093	15.057	15.142	7,44	0,56
12	ggimoncong	22.138	24.065	24.262	9,59	0,82
13	nbolopao	26.876	29.463	29.741	10,66	0,94
14	gi	13.089	12.708	12.472	-4,71	-1,86
15	gaya	15.847	16.468	16.328	3,04	-0,85
16	olempangan	13.332	12.326	11.900	-10,74	-3,46
17	npobulu	28.971	28.704	28.269	-2,42	-1,52
18	ngbulu	32.347	31.680	31.149	-3,70	-1,68
<b>GOWA</b>		<b>652.941</b>	<b>748.200</b>	<b>760.607</b>	<b>16,49</b>	<b>1,66</b>

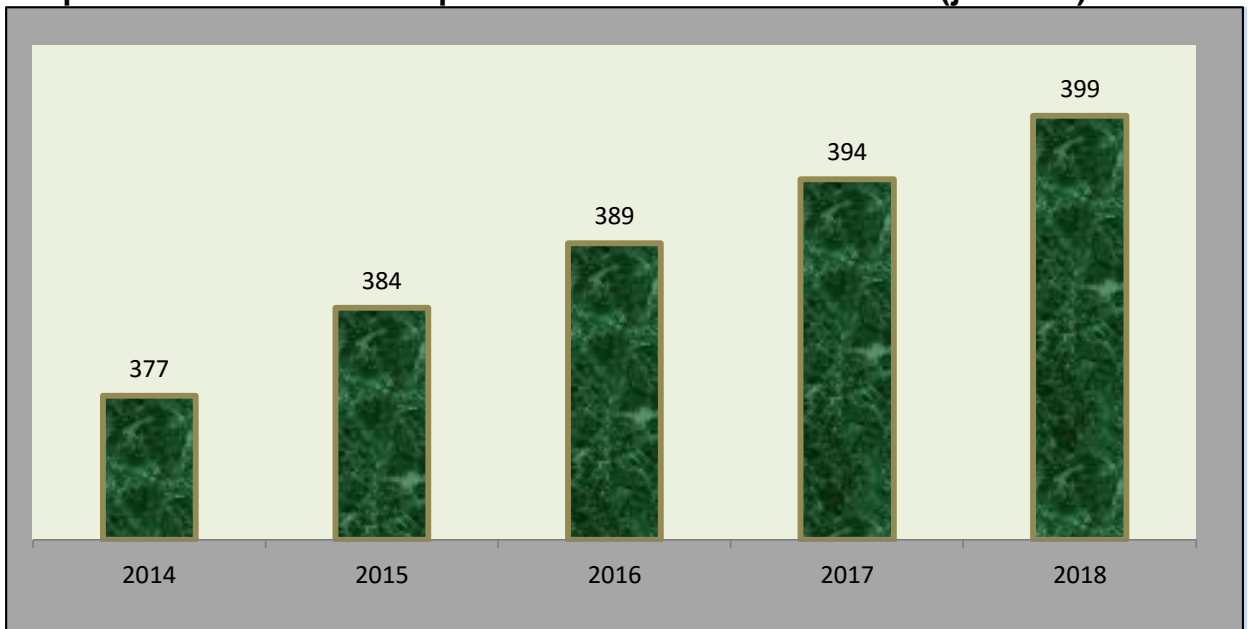
Sumber : Gowa dalam Angka Tahun 2018, BPS

Dengan luas wilayah 1.883,33 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk geografis di Kabupaten Gowa dari tahun ketahun mengalami peningkatan pada Tahun 2017 kepadatan



penduduk mencapai 394 jiwa/km<sup>2</sup> dan untuk Tahun 2018 naik menjadi 399 jiwa/km<sup>2</sup> seperti tergambar pada grafik dibawah ini :

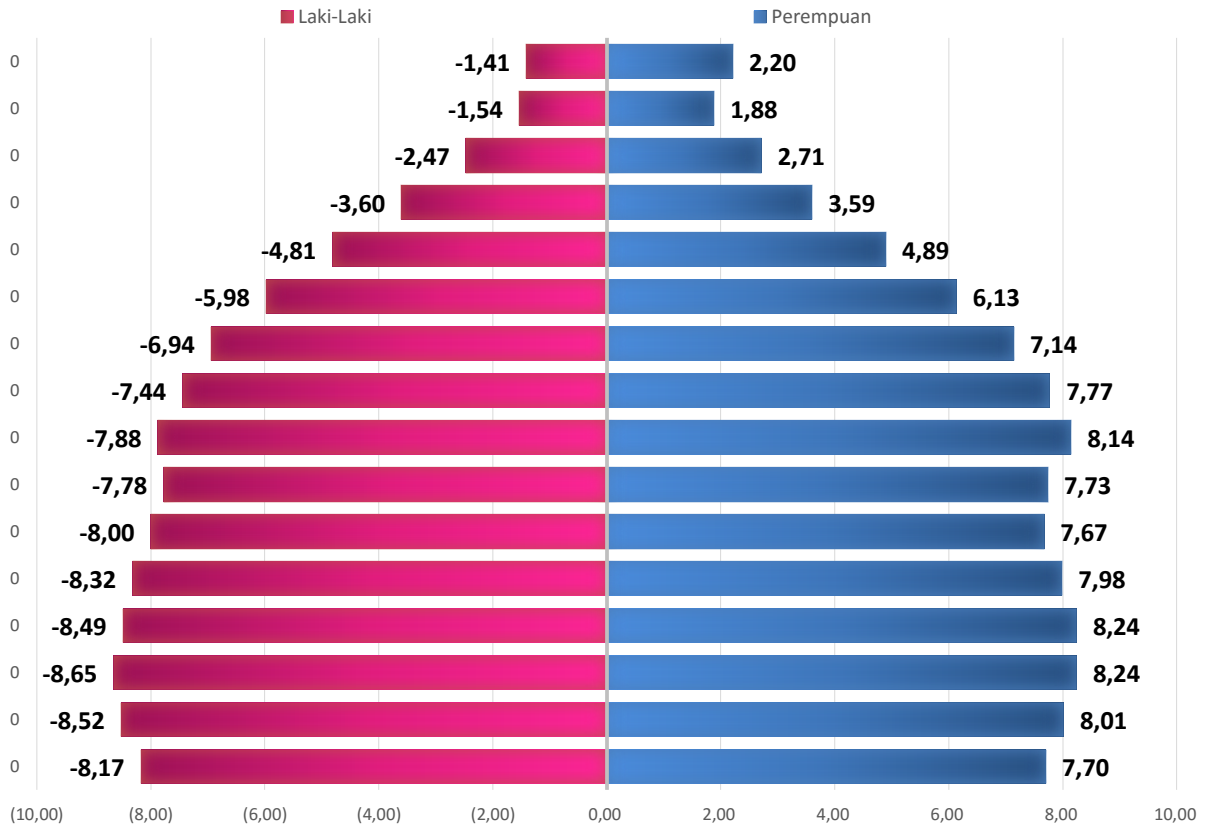
**Grafik 2.2**  
**Kepadatan Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2014 s/d 2018 (jiwa/km<sup>2</sup>)**



Sumber : BPS. Kab.Gowa dan Data Diolah 2019

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data penduduk berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan dan lain-lain. Komposisi penduduk digambarkan dalam piramida penduduk disajikan dua diagram, yakni sisi kiri untuk penduduk Laki-laki dan sisi kanan untuk jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk tahunan. Grafik disajikan menunjukkan jumlah dan persentase penduduk terhadap total penduduk di Kabupaten Gowa, dengan begitu dapat diketahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa (*Tabel 2.12*), distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur terlihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 2.3**  
**Piramida Penduduk Gowa menurut Kelompok Umur Tahun 2018 (%)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2018

Pada grafik diatas terlihat gambaran terhadap komposisi penduduk di Kabupaten Gowa didominasi oleh penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) sekitar 69%. Ini menjadi suatu keuntungan tersendiri jika dikelola oleh pemerintah daerah dengan baik.

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi oleh salah satunya. Dengan demikian kebijakan diambil lebih efektif. Penduduk Kabupaten Gowa dengan angka sex ratio 103,16, masih didominasi dengan penduduk berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 381,8 ribu jiwa dan berjenis kelamin Laki-Laki mencapai jumlah 370,1 ribu jiwa. Untuk melihat gambaran terhadap komposisi persebaran penduduk Kabupaten Gowa untuk setiap kecamatan dengan berbasis gender beserta rasionya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.13**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2018**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Bontonompo	20.195	22.173	42.368	91,08
2	Bontonompo Selatan	14.442	15.533	29.975	92,98
3	Bajeng	34.917	35.666	70.583	97,90
4	Bajeng Barat	12.328	13.010	25.338	94,76
5	Pallangga	63.41	64.776	128.189	97,90
6	Barombong	20.266	20.734	41.000	97,74
7	Sombaopu	87.021	87.242	174.263	99,75
8	Bontomarannu	17.924	18.165	36.089	98,67
9	Pattalassang	12.387	12.263	24.650	101,01
10	Parangloe	9.222	9.667	18.889	95,40
11	Manuju	7.305	7.837	15.142	93,21
12	Tinggimoncong	11.991	12.271	24.262	97,72
13	Tombolopao	15.094	14.647	29.741	103,05
14	Parigi	5.833	6.639	12.472	87,86
15	Bungaya	7.816	8.512	16.328	91,82
16	Botolempangan	5.573	6.327	11.900	88,08
17	Tompobulu	13.619	14.650	28.269	92,96
18	Biringbulu	15.079	16.070	31.149	93,83
<b>Gowa</b>		<b>374.425</b>	<b>386.182</b>	<b>760.607</b>	<b>96,96</b>

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2019, BPS

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di wilayah domestik atau region, yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu **pendekatan produksi**, **penggunaan** dan **pendapatan**. PDRB dengan pendekatan produksi dan pendekatan penggunaan dapat disajikan atas dasar harga berlaku dan konstan. *PDRB pendekatan produksi* diperoleh dari selisih nilai barang dan jasa yang dihasilkan dikurangi bahan baku yang digunakan sebagai input ditambah pajak atas produk dikurangi subsidi atas produk. *PDRB pendekatan penggunaan* diperoleh dari penjumlahan komponen PDRB penggunaan yang terdiri dari konsumsi rumah tangga,



konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto perubahan inventori dan ekspor dikurangi impor. PDRB pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan balas jasa faktor produksi yang terdiri dari kompensasi tenaga kerja, surplus usaha bruto, serta pajak atas produksi dikurangi subsidi atas produksi.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Gowa dari tahun ketahun semakin membaik. Keadaan ini dapat dilihat dari data angka PDRB atas dasar harga yang berlaku yang meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2014 misalnya, nilai yang diperoleh sebesar 12,044 trilyun rupiah dan Tahun 2018 telah mencapai 19,06 trilyun rupiah. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan juga terus menunjukkan trend positif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

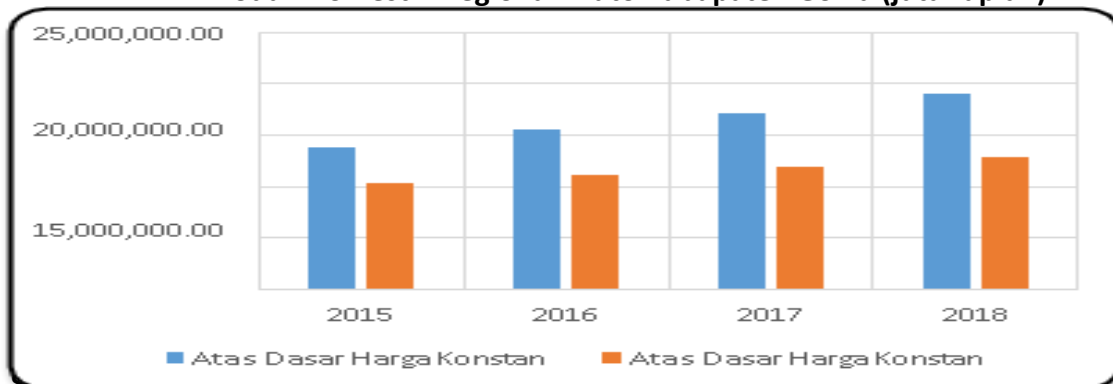
**Tabel. 2.14**  
**PDRB ADHB & PDRB ADHK di Kabupaten Gowa, 2014 – 2018**

Tahun	PDRB ADHB	Penduduk	PDRB ADHK
	(juta rupiah)	(Jiwa)	(Juta rupiah)
1	2	3	4
2014	12.044.433,40	709.386	9.720.169,64
2015	13.752.439,40	722.702	10.380.218,68
2016	15.524.364,50	735.493	11.166.021,93
2017	17.271.382,60	748.200	11.971.358,93
2018(*)	19.063.888,90	751.980	12.822.678,78

Ket : \*) Angka sementara

Sumber : BPS Provinsi Sulsel

**Gambar 2.4**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gowa (juta rupiah)**



Dari tahun ketahun pertumbuhan PDRB Kabupaten Gowa selalu di dominasi oleh beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi. Sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2018 di Kabupaten Gowa terutama didukung



oleh kinerja pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, informasi dan komunikasi serta jasa-jasa yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian bila dilihat dari sisi kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Gowa pada Tahun 2018 belum mengalami perubahan meskipun dalam rentan kurun waktu lima tahun terakhir ada kecenderungan perlambatan dan penurunan nilai kontribusi yang disebabkan oleh pergeseran kepada sektor-sektor jasa akibat percepatan perputaran perekonomian yang dianggap lebih potensial. Sektor tersebut masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkontribusi sebesar 29,11% terhadap nilai PDRB di Kabupaten Gowa. Sebagai gambaran terhadap pertumbuhan PDRB kabupaten Gowa dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.15**  
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2014 – 2018

Atas Dasar Harga konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gowa

(dalam juta rupiah)

Kategori	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.872.846,60	2,29	3.232.797,97	31,66	3.401.020,89	1,01	3.555.186,33	29,81	3.708.332,48	9,11
2	Pertambangan dan Penggalian	412.150,10	3,42	295.061,68	3,9	335.042,54	4,26	379.938,24	3,18	427.992,83	4,57
3	Industri Pengolahan	789.794,80	6,66	663.809,74	6,63	717.786,30	5,62	779.610,50	6,39	811.124,76	5,51
4	Pada Listrik dan Gas	15.236,00	0,14	18.914,95	0,1	21.585,54	0,12	23.068,37	0,18	24.324,25	0,13
5	Pada Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.086,60	0,13	14.076,39	0,12	14.688,72	0,11	15.683,14	0,12	17.265,91	0,11
6	Perdagangan	1.096.429,80	10,10	1.093.063,53	10,24	1.179.306,24	10,37	1.281.846,65	10,61	1.390.947,66	12,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.381.461,50	11,22	1.197.766,19	11,2	1.323.541,32	11,83	1.443.815,78	11,91	1.585.644,38	12,72
8	Transportasi dan Pergudangan	191.848,90	1,56	151.312,00	1,6	159.317,30	1,7	166.749,27	1,51	181.622,81	1,63
9	Perediaan Akomodasi dan Makan Minum	296.476,30	2,46	247.751,01	2,39	267.267,29	2,24	294.345,27	2,43	329.238,00	2,45
10	Informasi dan Komunikasi	1.013.418,50	8,41	1.064.298,49	7,76	1.173.641,38	7,71	1.289.479,78	10,48	1.423.443,84	13,00
11	Keuangan dan Asuransi	306.310,40	2,53	240.210,74	2,54	274.477,05	2,67	279.051,22	2,49	289.657,77	2,50
12	Estate	916.094,00	7,61	776.597,24	8,45	846.879,29	8,64	909.802,43	8,12	963.116,85	8,29
13	Perusahaan	13.926,60	0,11	12.181,92	0,11	13.077,29	0,11	14.149,63	0,12	15.463,14	0,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	696.947,80	5,81	569.307,10	5,92	581.986,17	5,52	610.188,98	5	632.192,43	5,22
15	Pendidikan	515.528,10	4,3	468.941,01	4,17	497.640,20	3,92	540.487,02	4,41	594.121,44	4,00
16	Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209.722,70	1,75	191.462,43	1,8	204.701,36	1,8	219.050,93	1,85	237.653,13	1,85
17	lainnya	167.543,50	1,39	141.524,70	1,4	151.827,70	1,38	168.905,39	1,38	190.537,10	1,51



	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	12.001.822,20	100	10.380.218,68	100	1.166.021,93	100	12.182.251,03	100	12.822.678,78	100
--	--------------------------------	---------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----

Sumber : BPS Kab.Gowa 2019, diolah

Tabel 2.16

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014 – 2018 Kabupaten Gowa

(dalam Juta rupiah)

Kategori	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.872.846,60	2,27	1.347.993,50	1,62	1.796.251,12	1,01	1.173.375,05	0,09	1.550.014,31	9,11
2	Pertambangan dan Penggalian	412.150,10	3,43	535.545,90	3,9	660.113,83	1,26	752.070,39	1,37	871.126,21	4,57
3	Industri Pengolahan	789.794,80	6,58	910.814,80	6,63	1.025.808,31	6,62	1.154.818,64	6,72	1.240.118,53	6,51
4	Padaang Listrik dan Gas	15.236,00	0,13	15.515,90	0,1	17.954,58	0,12	22.557,70	0,13	24.975,39	0,13
5	Padaang Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.086,60	0,13	16.553,81	0,12	17.747,34	0,11	19.494,15	0,11	21.802,76	0,11
6	Konstruksi	1.096.429,80	0,14	1.407.021,48	0,24	1.611.435,41	0,37	1.834.924,22	0,67	2.148.126,11	1,27
7	Retail Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.381.461,50	1,26	1.538.585,70	1,2	1.806.225,93	1,83	2.116.438,90	2,31	2.425.495,00	2,72
8	Sportasi dan Pergudangan	191.848,90	1,6	239.125,04	1,6	258.235,15	1,7	282.193,34	1,64	309.871,95	1,63
9	Pediaan Akomodasi dan Makan Minum	296.476,30	2,47	328.817,97	2,39	365.777,35	2,24	417.351,01	2,43	467.965,85	2,45
10	Informasi dan Komunikasi	1.013.418,50	3,44	1.065.199,30	7,76	1.203.066,78	7,71	1.351.284,61	7,86	1.524.248,04	8,00
11	Keuangan dan Asuransi	306.310,40	2,55	348.741,13	2,54	412.599,86	2,67	440.643,18	2,56	476.987,54	2,50
12	Estate	916.094,00	7,63	1.160.873,89	3,45	1.320.040,87	3,64	1.446.363,57	3,41	1.580.466,24	8,29
13	Perusahaan	13.926,60	0,12	15.766,31	0,11	17.535,29	0,11	19.581,66	0,11	22.258,47	0,12



14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	696.947,80	5,81	810.139,47	5,92	856.196,92	5,52	918.469,62	5,34	995.955,48	5,22
15	Pendidikan	515.528,10	4,3	572.580,79	4,17	608.389,23	4,92	678.719,03	4,95	763.379,72	4,00
16	Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209.722,70	1,75	247.245,03	1,8	279.733,03	1,8	314.559,79	1,83	352.811,83	1,85
17	lainnya	167.543,50	1,4	192.582,10	1,4	213.997,23	1,38	248.813,24	1,45	288.284,48	1,51
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>12.001.822,20</b>	<b>100</b>	<b>3.752.085,30</b>	<b>100</b>	<b>5.471.108,22</b>	<b>100</b>	<b>7.192.664,10</b>	<b>100</b>	<b>9.063.888,90</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah, Diolah



## 2. Tingkat Inflasi

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gowa pada Tahun 2017 telah membuat sebuah aplikasi sederhana untuk memantau kondisi harga kebutuhan pokok di setiap kecamatan. Hal ini disebabkan Kabupaten Gowa tidak termasuk kedalam daerah perhitungan inflasi oleh BPS sehingga untuk mengetahui kondisi kenaikan harga maka dibuatkan aplikasi tersebut.

Aplikasi ini disebut Peta Tanggap Inflasi, adapun secara spesifik aplikasi ini akan memperlihatkan status kondisi suatu kecamatan dengan terjadinya perubahan harga kebutuhan pokok dengan memperhitungkan beberapa variabel seperti jumlah penduduk, jarak ke sentra produksi maupun kondisi infrastruktur.

Selain itu TPID Kabupaten Gowa aktif membangun komunikasi dengan TPID lainnya seperti Takalar dan Enrekang dengan tujuan agar ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat khususnya di Kabupaten Gowa dapat tersedia dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Hal ini disadari karena beberapa kebutuhan pokok seperti bawang merah dan bawang putih sebagian besar dipasok dari daerah lain.

BPS telah membagi kota-kota berdasarkan zona sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.17**  
**Zona Inflasi Menurut Kota**

No	Nama Zona	Kabupaten/Kota
1	Zona Palopo	Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja
2	Zona Parepare	Parepare, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru
3	Zona Bone	Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai
4	Zona Bulukumba	Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Selayar
5	Zona Makassar	Makassar, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar



Kondisi perubahan harga pada setiap kabupaten/kota secara keseluruhan akan menghasilkan kondisi inflasi Provinsi Sulawesi Selatan. Selama tahun 2016 hingga tahun 2018 tren nilai inflasi tahunan di Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuatif, pada tahun 2016 laju inflasi provinsi Sulawesi Selatan mencapai titik terendah selama 5 tahun yaitu sebesar 2,94% naik 4,44% pada tahun 2017 lalu kemudian turun menjadi 3,50% di tahun 2018. Gambaran terhadap tren Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.4**  
Tren Inflasi Sulawesi Selatan

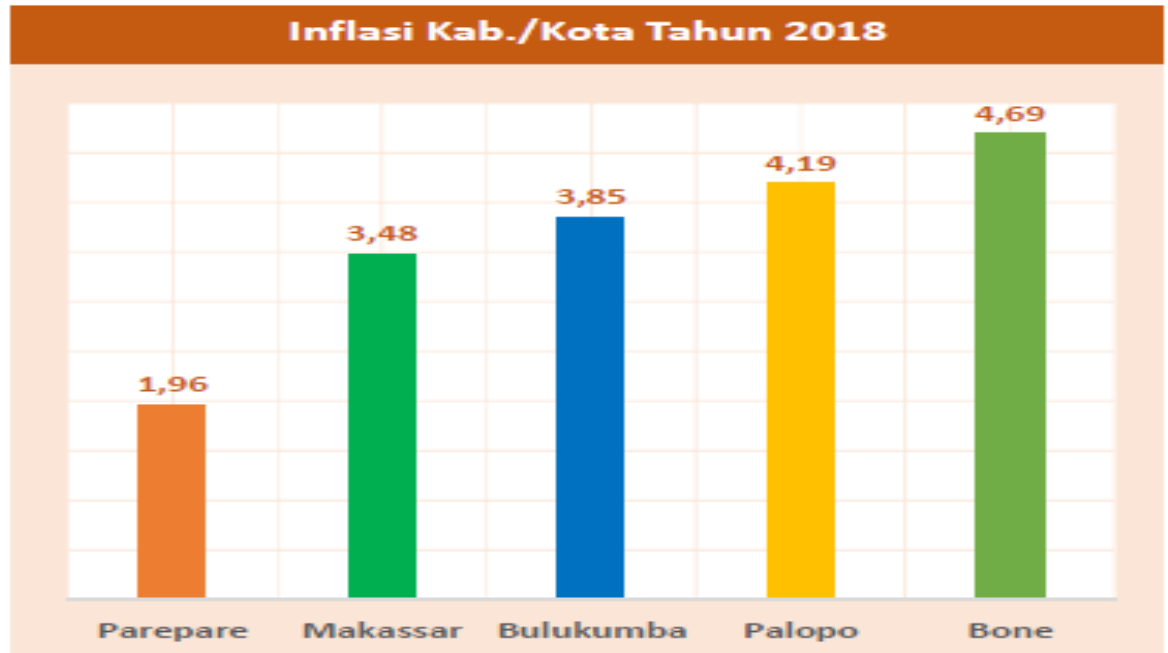


Sumber : BPS Prov.Susel 2019

Laju inflasi yang terjadi di provinsi dipengaruhi juga oleh laju inflasi di zona-zona perhitungan inflasi di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Untuk Zona Makassar sendiri dimana Kabupaten Gowa termasuk didalam zona ini tren pertumbuhan laju inflasi mencapai angka 3,38 persen (yoy) pada tahun 2018 dan menjadi zona kedua terendah pertumbuhan setelah Parepare, sedangkan laju inflasi tertinggi yang mencapai 4,69 persen berada pada Zona Bone. Untuk lebih jelas menggambarkan tren laju inflasi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.4

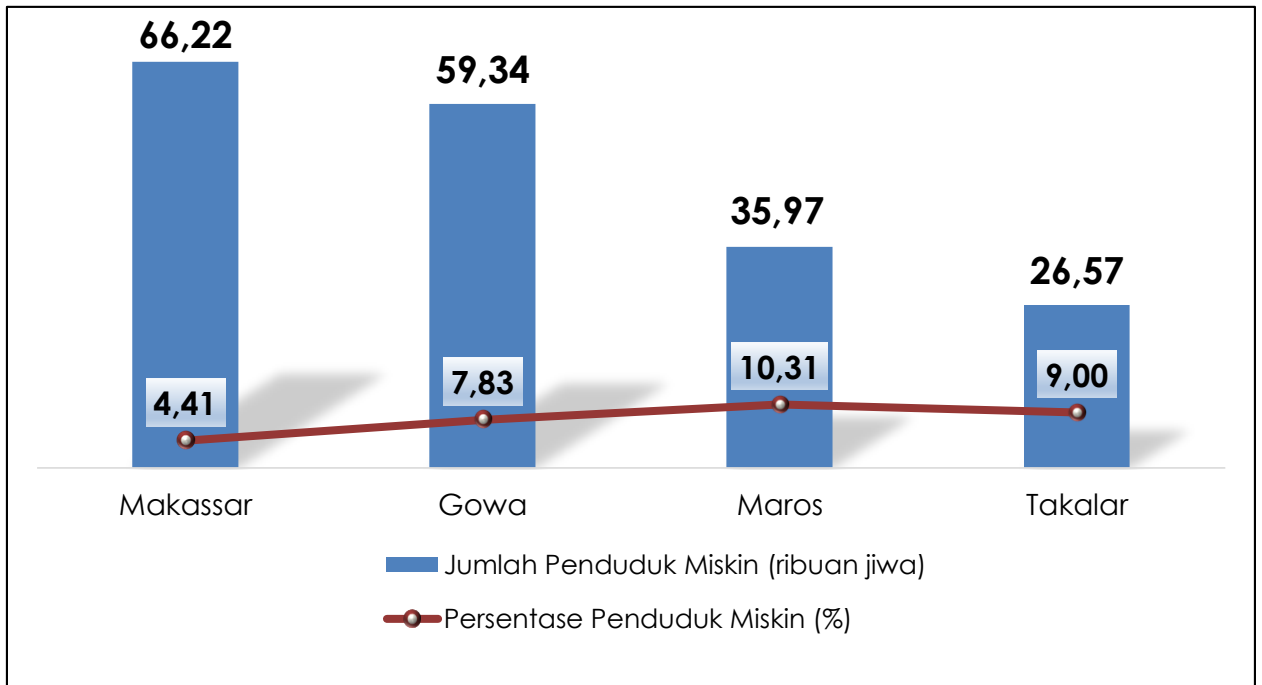


Sumber: BPS Prov.Sulsel 2019

### 3. Kemiskinan

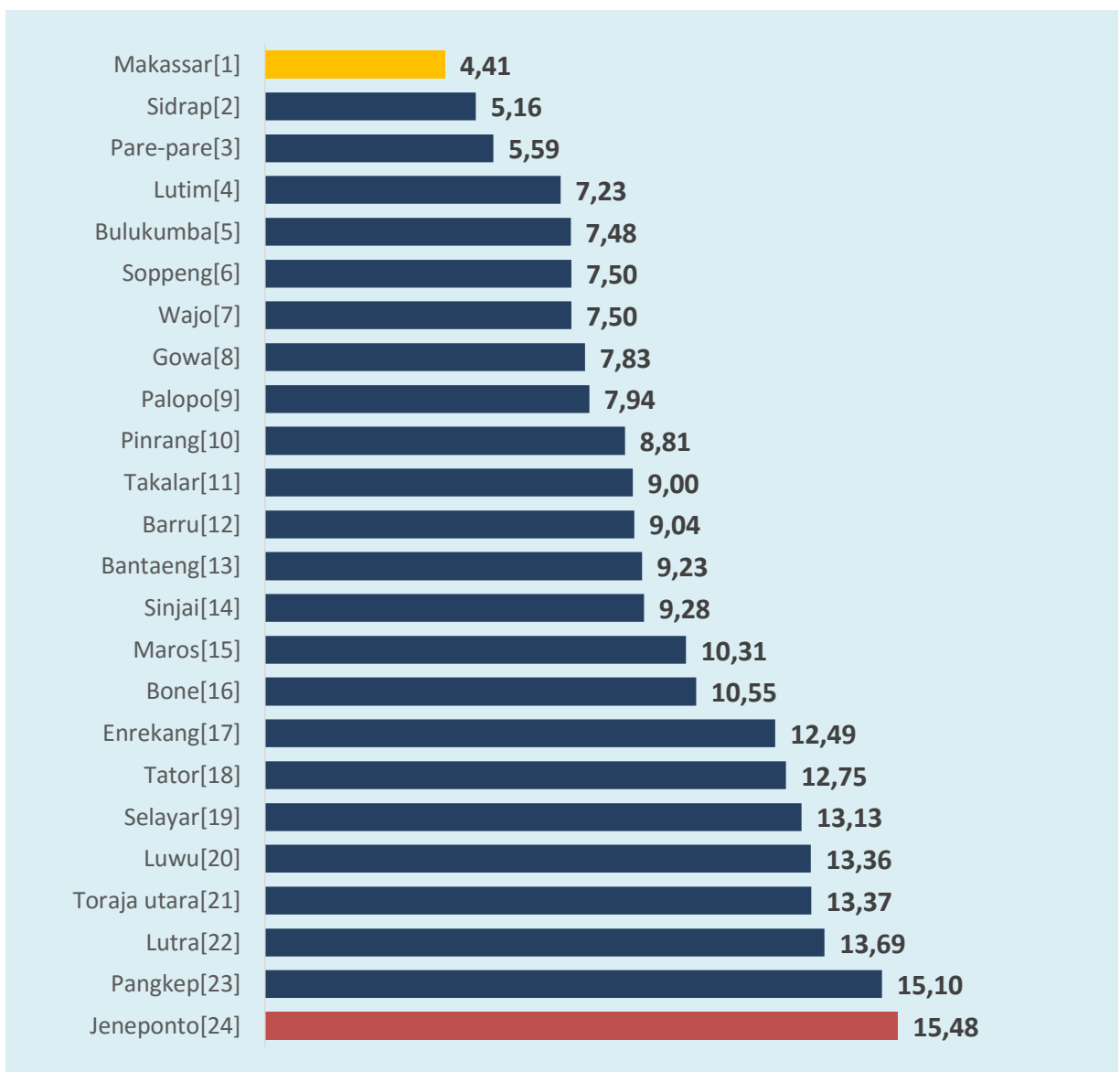
Kemiskinan merupakan permasalahan yang krusial dan sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 mencapai 792,64 ribu jiwa atau sebesar 9,06% dari total jumlah keseluruhan penduduk. Kabupaten Gowa sendiri pada tahun 2018 ini jumlah penduduk miskinnya berjumlah 59,34 ribu jiwa atau 7,83% terhadap total jumlah penduduk keseluruhan. Jumlah ini menempatkan Kabupaten Gowa berada diposisi 8 untuk jumlah penduduk miskinnya jika dibandingkan dengan 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel. Kemudian apabila dibandingkan dengan kabupaten dan kota tetangga Kabupaten Gowa masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Makassar yang jumlah penduduk miskinnya sebesar 66,22 ribu jiwa atau 4,41% penduduknya berada pada garis kemiskinan, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa masih lebih rendah. Berikut adalah gambaran terhadap angka kemiskinan dan perbandingan dengan 4 kabupaten/kota sekitar :

**Gambar 2.5**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**dan Perbandingan Dengan Kabupaten sekitar**  
**(tahun 2018)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Gowa Tahun 2019

Gambar. 2.6  
Persentase Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2018

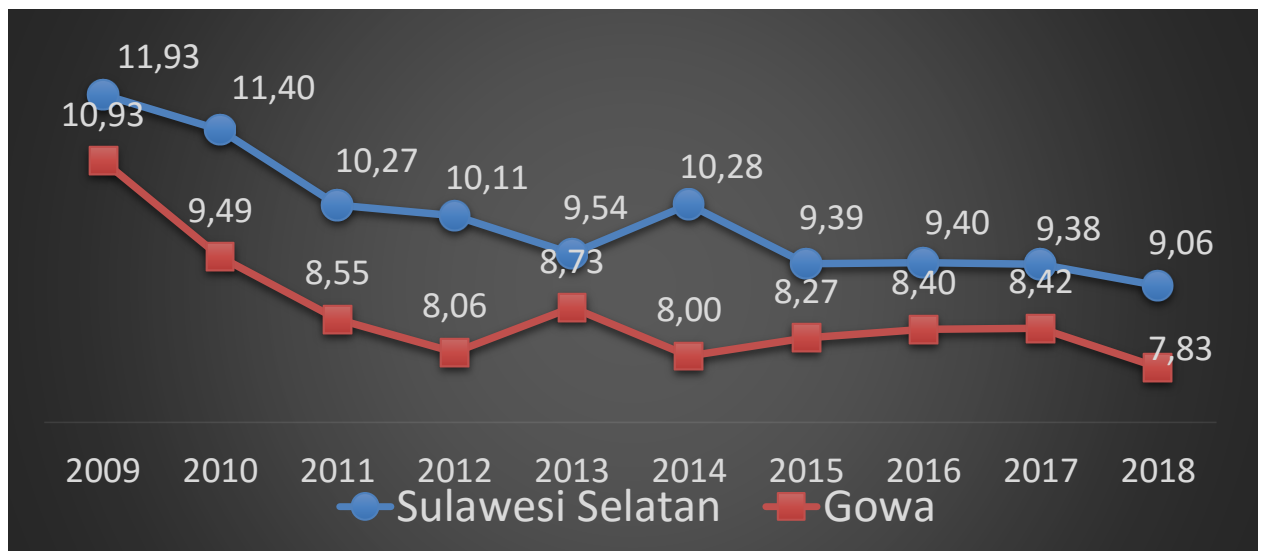


Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2019, diolah



Berdasarkan data yang ada selama 10 tahun terakhir, persentase jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa jumlah penduduk miskin Kabupaten Gowa selalu berada dibawah angka kemiskinan provinsi. Angka kemiskinan di Kabupaten Gowa pada tahun 2009 adalah 10,93 persen lebih rendah jika dibandingkan persentase penduduk miskin provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat pada tahun 2009 adalah sebesar 11,93 persen. Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan secara nasional yang pada tahun 2018 angka kemiskinan nasional adalah sebesar 9,66 persen ini juga merupakan persentase angka kemiskinan terendah selama kurun waktu 10 ini. Angka kemiskinan provinsi pada tahun 2018 adalah 9,06 persen sedangkan Kabupaten Gowa tercatat angka kemiskinannya adalah 7,83 juga merupakan angka kemiskinan terendah selama 1 dekade ini. Gambaran terhadap angka kemiskinan Kabupaten Gowa dan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut :

**Grafik 2.5**  
**Persentase Penduduk Miskin Gowa dan Provinsi Sulawesi selatan**  
**Tahun 2009 s/d 2018**



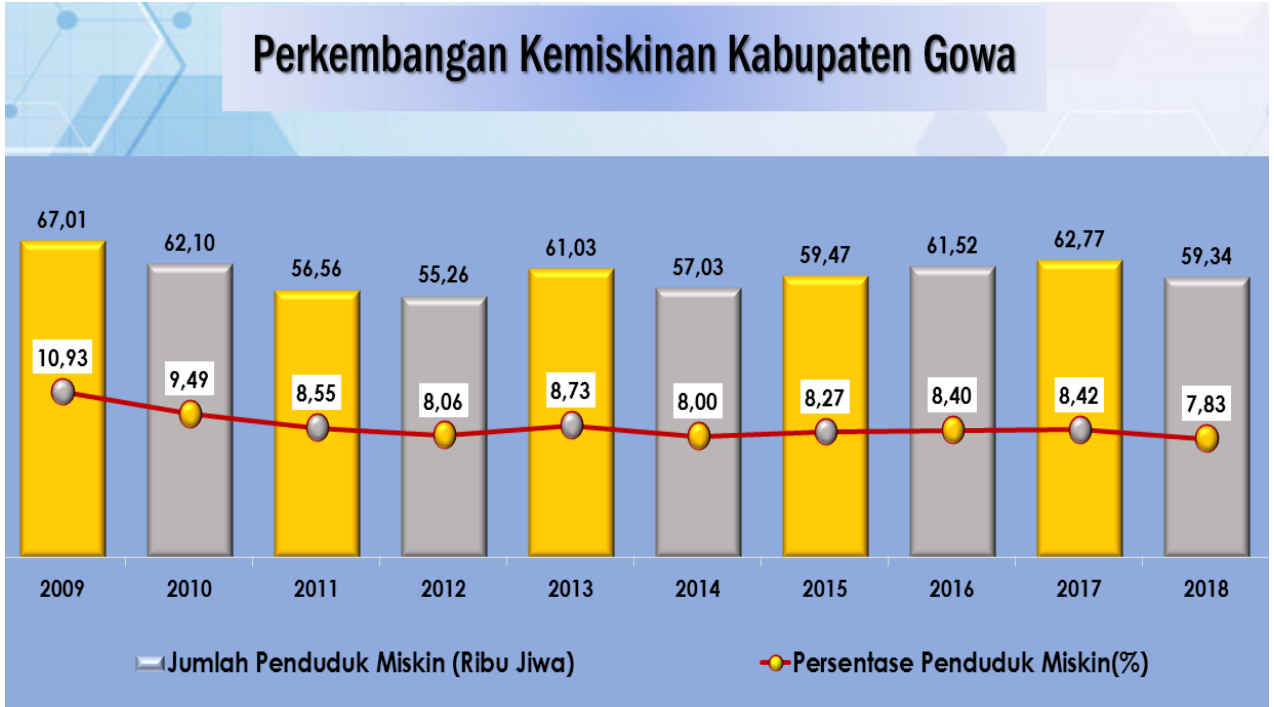
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Gowa 2019,

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Gowa telah mengalami penurunan yang cukup menggembirakan setiap tahunnya. Tahun 2018 ini penurunan angka kemiskinan merupakan penurunan angka kemiskinan terbesar baik dari sisi jumlah penduduk miskinnya dibandingkan total keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Gowa, jumlah penduduk tahun 2018 adalah sebanyak 751,98 ribu jiwa dan 59,34



ribu jiwa diantaranya adalah penduduk miskin atau 7,83 persen. Gambaran terhadap perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Gowa selama 1 dekade ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik.2.6**

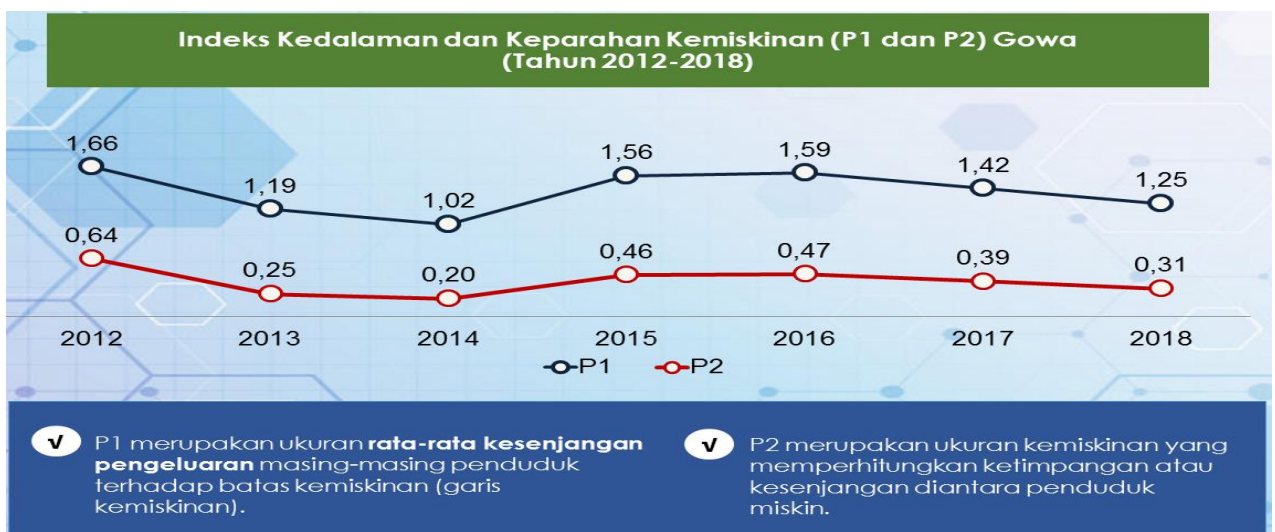


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Gowa

Indeks kedalaman kemiskinan seperti yang dikutip dari penjelasan pada website Badan Pusat Statistik, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

untuk memberi gambaran terhadap 2 indeks ini di Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 2.7**

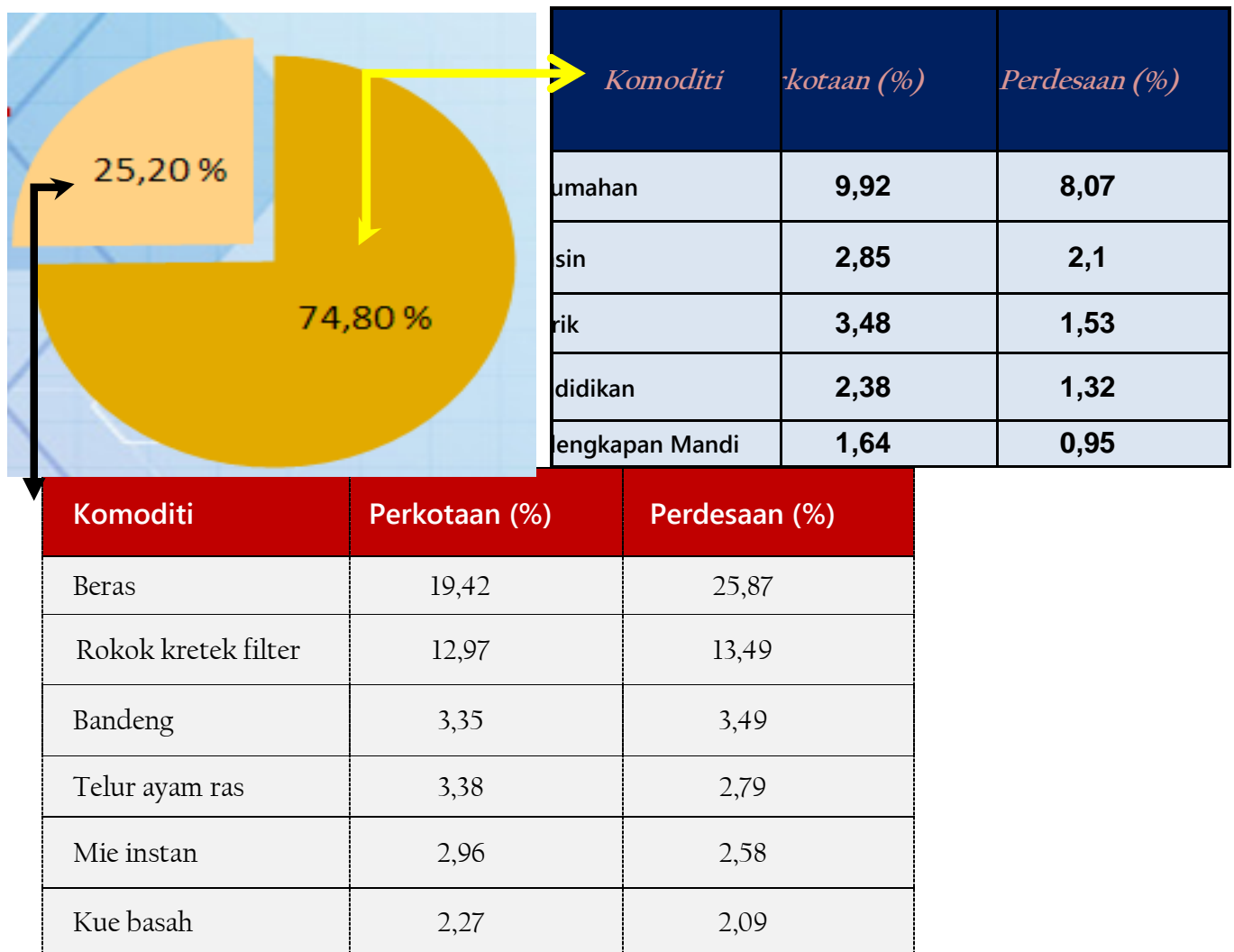




Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Gowa, Diolah

Selain itu komoditi makanan merupakan komoditi yang memberi pengaruh terhadap garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan mencapai angka 74,80%, sedangkan komoditi bukan makanan memberi pengaruh serta menyumbang 25,20% terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Gowa pada maret 2018. Untuk sebagai gambaran terhadap komoditi yang memeberikan pengaruh terhadap garis kemiskinan Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar. 2.8**  
**Komoditi Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan**



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019, Diolah

#### 4. Indeks Gini

Ketimpangan adalah tema yang menarik perhatian dan menjadi “current issue” beberapa tahun terakhir. Ketimpangan jelas menjadi penanda adanya permasalahan pada kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan

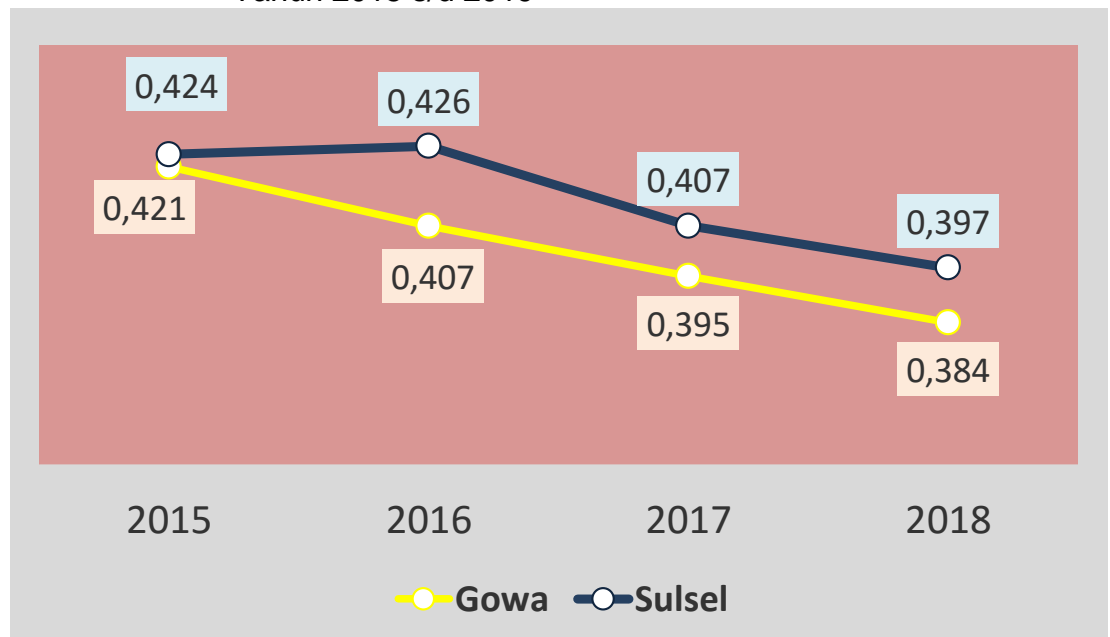


untuk menopang keberlanjutan sebuah negara/daerah. Ketimpangan adalah hasil dari pembangunan yang berfokus pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek sosial. Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Indeks merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini atau gini rasio di Kabupaten Gowa dalam 4 tahun terakhir cenderung terus menurun dari 0,421 menjadi 0,384, artinya kesenjangan antar penduduk di Kabupaten Gowa cenderung semakin menyempit. jika dibandingkan dengan Provinsi Gini rasio di tingkat provinsi lebih tinggi dan menempatkan Kabupaten Gowa berada pada posisi ke 20 untuk Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan pada tahun 2018 ini.

Untuk memberi potret terhadap angka gini rasio Kabupaten Gowa dan perbandingan dengan provinsi serta kabupaten/kota se Sulawesi selatan tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

**Grafik 2.7**

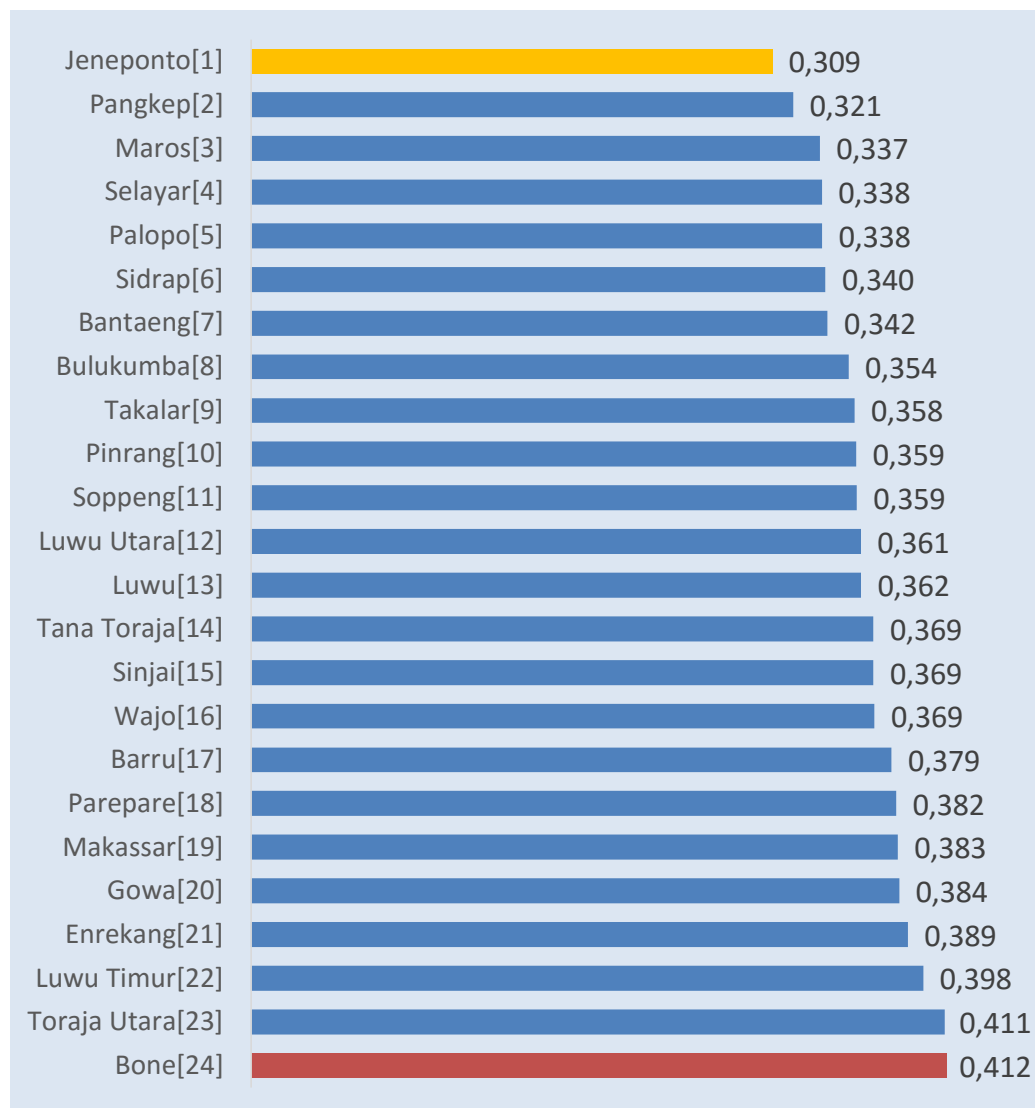
Pertumbuhan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa Tahun 2015 s/d 2019



Sumber : BPS Kab.Gowa 2019, diolah

**Gambar 2.9**

**Gini Rasio Kabupaten/ Kota Tahun 2018**



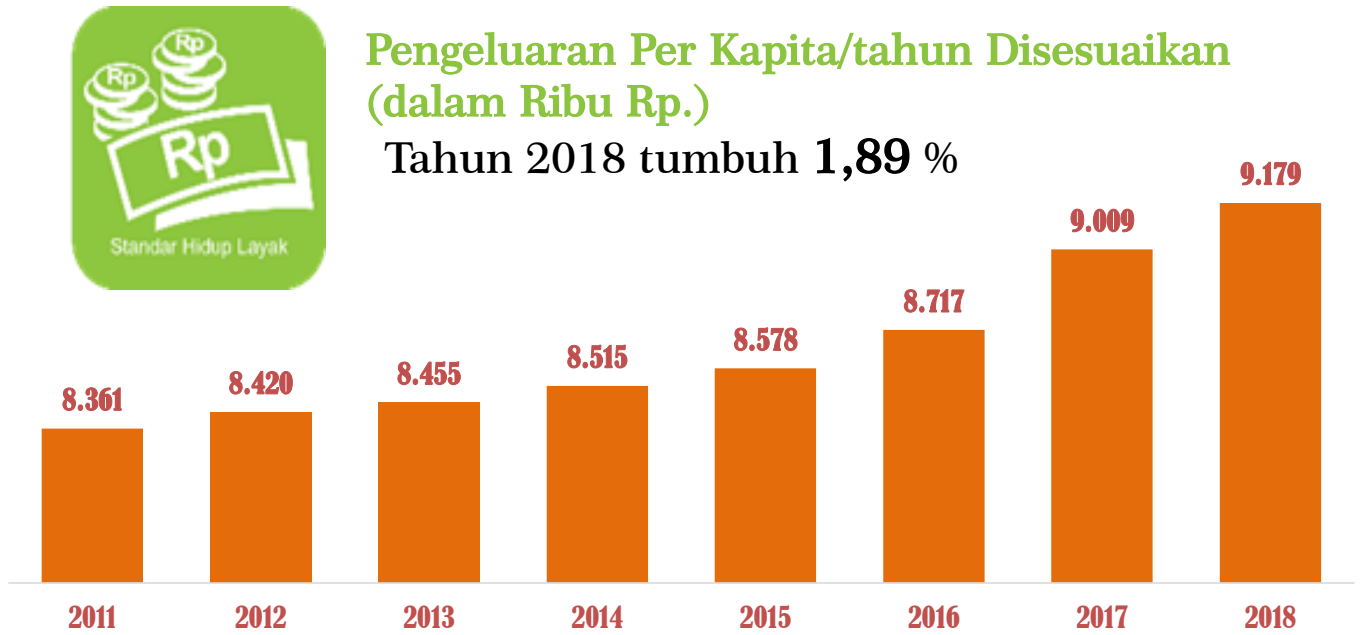
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Gowa 2019, diolah

## 5. Paritas Daya Beli

Paritas daya beli merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antara wilayah dalam konteks paritas daya beli (purchasing power parity) di Indonesia, satu rupiah di suatu daerah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PDB ini dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan dengan Indeks Harapan Konsumen dan penurunan utilitas marginal yang hitung dengan formula Atkinson. Angka PDB di Kabupaten Gowa juga menunjukkan peningkatan yang positif, seperti data yang tergambar dibawah, berdasarkan data tersebut terlihat bahwa paritas daya beli masyarakat Kabupaten Gowa tumbuh 1,89 persen atau meningkat Rp.9.179 Juta pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp.9.009 juta.

Gambar 2.10

### Angka Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Gowa Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019, diolah

#### 6. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani atau NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). NTP untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani.

Indeks harga yang diterima petani (It) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat



dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

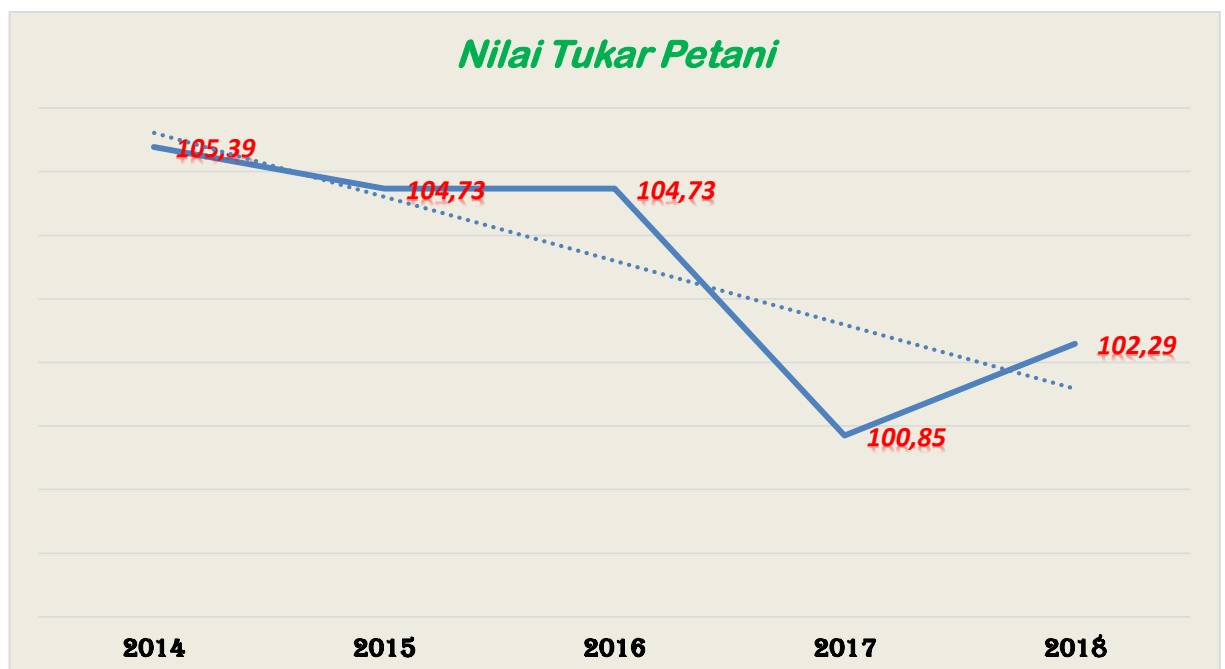
Gambaran terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.11**  
Perkembangan Indeks Perhitungan NTP Kabupaten Gowa  
Tahun 2014 s/d 2018

Tahun	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Indeks yang diterima petani (It)	117,37	124,77	129,60	129,06	135,33
	Indeks yang dibayar petani (Ib)	111,37	119,13	123,75	127,97	132,30
	Nilai tukar Petani	105,39	104,73	104,73	100,85	102,29

Sumber : Gowa Dalam Angka, BPS Kab.Gowa

**Grafik 2.8**  
Nilai Tukar Petani Kabupaten Gowa  
Tahun 2014 s/d Tahun 2018 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Gowa

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### A. Angka Indeks Pembangunan Manusia



Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati angka 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik.

IPM Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun terus menunjukkan trend pertumbuhan yang cukup baik dan masuk pada kategori daerah dengan pertumbuhan IPM kategori sedang, jika pada tahun 2017 angka IPM adalah 68,33 naik menjadi 68,87 di tahun 2018. Pertumbuhan terhadap indeks ini sedikit banyak dipengaruhi dari kebijakan-kebijakan ekonomi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat atau penduduk. Kebijakan yang dimaksud tergolong efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan pengukuran nilai IPM yang dilakukan oleh BPS.

**Gambar 2.11**

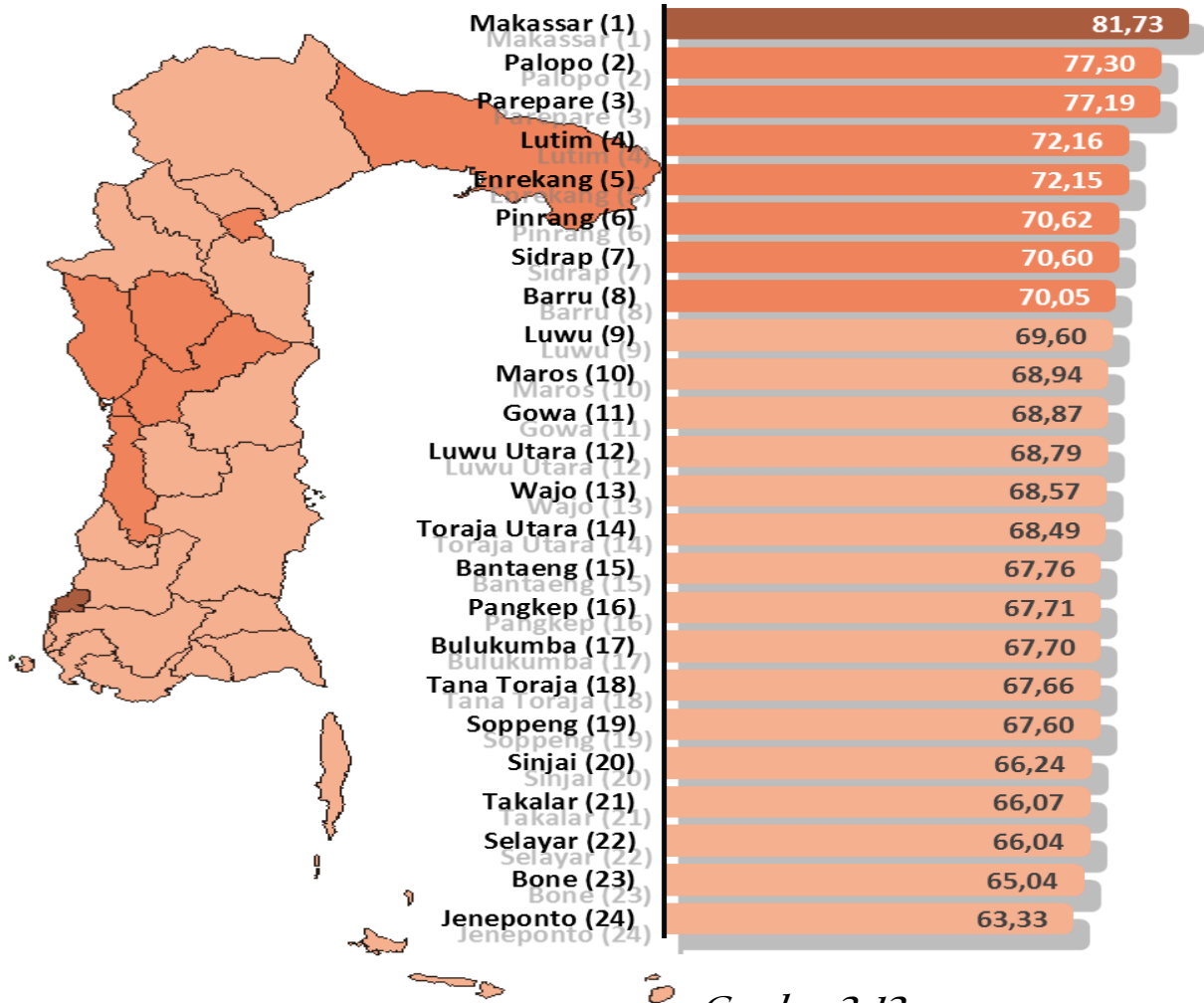
**Tren Pertumbuhan IPM Kabupaten Gowa  
Tahun 2014 s/d 2018**



Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Gowa, diolah



## STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA KAB/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN 2018



Gambar 2.12

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019, diolah

Terlihat pada gambar diatas tingkat Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata angka dan status IPM untuk Kabupaten/Kota berada tingkatan level *Tinggi* berjumlah 16 kabupaten, level 6 kabupaten dan hanya 1 kota yang masuk pada level sangat tinggi yaitu Kota Makassar. Kabupaten Gowa sendiri berada pada level tinggi serta menduduki posisi ke 11 untuk 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.

### B. Angka Harapan Hidup (AHH)

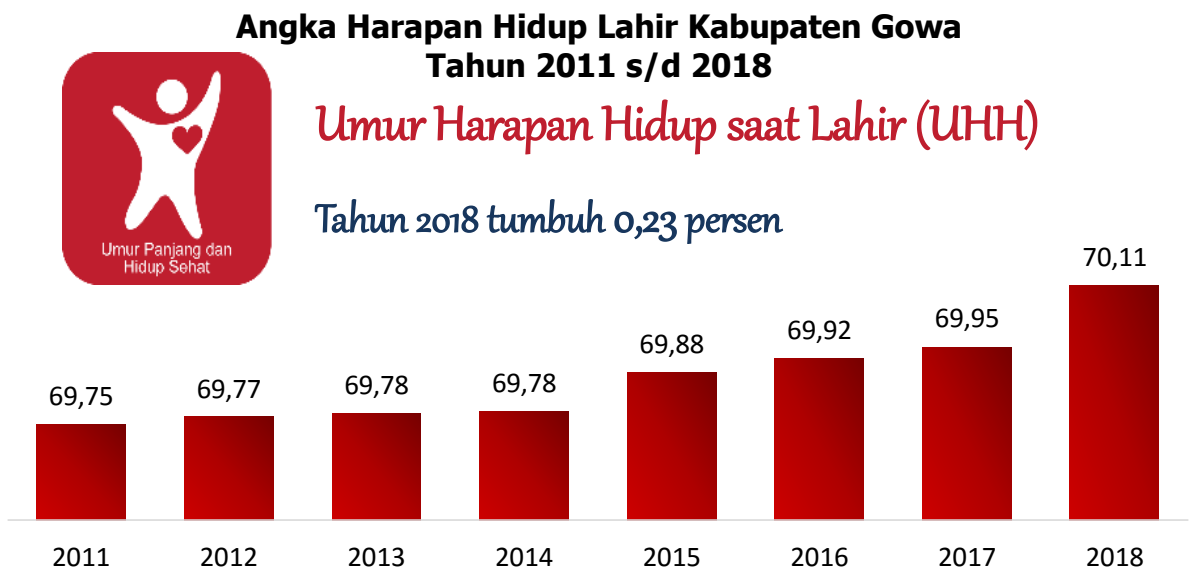
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan



penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan dan program pemberantasan kemiskinan. berdasarkan data rilis BPS Kabupaten Gowa seperti yang tergambar dibawah terjadi kenaikan Angka nilai Harapan Hidup pada tahun 2018 meskipun hanya 0,23 persen yaitu 70,11 Tahun, jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang angkanya mencapai 69,95 tahun.

Gambar 2.13



Sumber : Badan pusat statistik 2019, Diolah

### C. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa akan datang, diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan dibidang pendidikan





diberbagai jenjang terutama jenjang pendidikan dasar sebagai langkah nyata dalam pelaksanaan kewenangan yang diserahkan ke kabupaten yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) diharapkan dicapai setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Gowa pada tahun 2018 ini tumbuh 1,92 persen atau tercatat 13,29 Tahun jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat 13,04 Tahun. Kenaikan ini menandakan bahwa program-program unggulan Pemerintah Kabupaten Gowa khususnya pada bidang pendidikan yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar berjalan dengan baik serta menunjang program nasional yaitu program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun memberikan hasil yang menggembirakan.

#### **D. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).**

Konsep dan definisi rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk Usia 15 Tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitungnya dibutuhkan informasi partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah atau sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki serta tingkat atau kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Kabupaten Gowa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik daerah (BPS) pada tahun 2017 RLS 7,74 tumbuh 0,13 persen di tahun 2018 atau menjadi 7,75 tahun. Gambaran trend pertumbuhan selama lima tahun terhadap angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut:

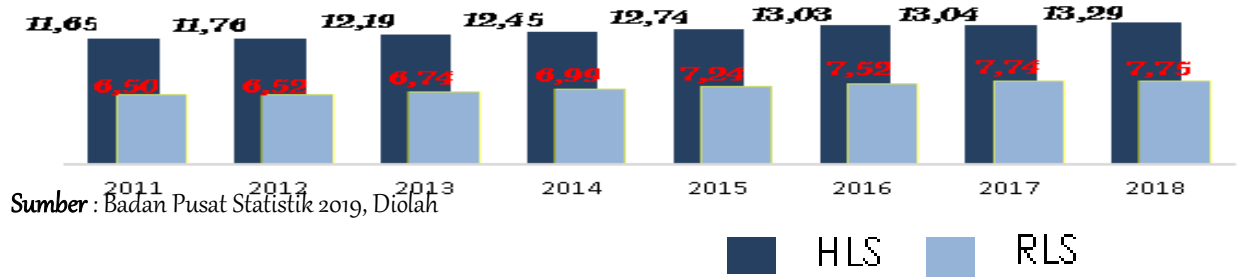
Gambar 2.14



## Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gowa 2011 – 2018



- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**  
Tahun 2018 tumbuh **1,92** persen
- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**  
Tahun 2018 tumbuh **0,13** persen



### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Pembangunan seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Seni budaya dan olahraga difokuskan pada pengembangan jenis kesenian daerah dan pembinaan berbagai cabang olahraga. Dalam hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya pengembangan untuk melestarikan beragam jenis budaya dan kesenian yang menggambarkan karakteristik masyarakat Kabupaten Gowa baik melalui penerbitan buku sejarah dan budaya lokal buku permainan tradisional rakyat dan transliterasi Lontara, serta penyelenggaraan Hari Jadi Gowa, event beautiful malino, Pasukan Tubarania dan Accera Kalompoang serta pembinaan sanggar seni/budaya.

Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, telah dilakukan pembinaan atlet berprestasi baik untuk cabang karate, bulutangkis, sepak bola, volley dan cabang lainnya, sehingga diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet yang dapat mengharumkan nama bangsa



dan negara tidak hanya pada event nasional tetapi juga internasional.

Jumlah gelanggang/balai remaja yang ditargetkan 3 buah dan terealisasi 14 buah, sementara itu jumlah organisasi kepemudaan menurut data yang ada tercatat ada 59 organisasi kepemudaan yang aktif sedangkan untuk bidang olahraga ada 17 cabang olahraga yang aktif dengan jumlah atlit kurang lebih 41 orang.

### 2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

##### 1. Urusan Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Gowa terus melakukan pembenahan pada sektor pendidikan pada tahun 2019. Penerapan Peraturan daerah (Perda) Gowa sebagai kabupaten Pendidikan menjadi payung hukum pengelolaan sistem pendidikan melalui perda pendidikan ini sejumlah sektor akan dibenahi utama dalam sektor persekolahan.

Gambaran terhadap pencapaian terhadap urusan pendidikan di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 2.11**  
Persentase Penduduk berumur 5 Tahun ke atas menurut karakteristik dan status pendidikan 2018

KARAKTERISTIK	TIDAK/BELUM PERNAH BERSEKOLAH	MASIH BERSEKOLAH			TIDAK BERSEKOLAH LAGI	JUMLAH
		SD/SEDERAJAT	SMP/SEDERAJAT	SMA/KEATAS		
1	2	3	4	5	6	7
JENIS KELAMIN						
LAKI-LAKI	9,46	14,70	6,68	8,66	60,49	100
PEREMPUAN	11,05	12,69	6,19	8,62	61,45	100
KELOMPOK PENGELUARAN						
40 PERSEN TERBAWAH	15,07	16,67	7,96	5,16	55,14	100
40 PERSEN TENGAH	7,79	12,66	5,43	10,60	63,52	100
20 PERSEN TERATAS	5,97	9,93	5,47	11,46	67,16	100
<b>KABUPATEN GOWA</b>	<b>10,27</b>	<b>13,68</b>	<b>6,43</b>	<b>8,64</b>	<b>60,98</b>	<b>100</b>



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.Gowa 2018, BPS

**Tabel 2.12**

**Persentase Penduduk Berumur 7 -24 Tahun Menurut Karakteristik Dan Status Pendidikan, 2018**

KARAKTERISTIK	TIDAK/BELUM PERNAH BERSEKOLAH	MASIH BERSEKOLAH			TIDAK BERSEKOLAH LAGI	JUMLAH
		SD/SEDE RAJAT	SMP/SED ERAJAT	SMA/KEA TAS		
1	2	3	4	5	6	7
JENIS KELAMIN						
LAKI-LAKI	0,74	35,55	18,01	21,77	23,93	100
PEREMPUAN	0,56	33,65	17,75	23,49	24,56	100
<b>KELOMPOK PENGELUARAN</b>						
40 PERSEN TERBAWAH	1,21	40,25	21,04	13,18	24,32	100
40 PERSEN TENGAH	0,37	31,28	14,87	28,39	25,09	100
20 PERSEN TERATAS	0,00	29,19	17,5	31,21	22,09	100
<b>KABUPATEN GOWA</b>	<b>0,65</b>	<b>34,61</b>	<b>17,88</b>	<b>22,62</b>	<b>24,24</b>	<b>100</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.Gowa 2019, BPS

**Tabel.2.13**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Nonformal Penduduk Berumur 7 – 18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok umur, 2018

KARAKTERISTIK	7-12	13-15	16-18
1	2	3	4
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	100	94,52	68,86
Perempuan	99,15	97,50	74,27
<b>Kelompok Pengeluaran</b>			
40 PERSEN TERBAWAH	99,17	95,92	57,16
40 PERSEN TENGAH	100	94,09	80,75
20 PERSEN TERATAS	100	100	76,14
<b>KABUPATEN GOWA</b>	<b>99,59</b>	<b>96,07</b>	<b>71,48</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.Gowa 2019, BPS

**Tabel 2.14**

Angka Partisipasi Murni (APM) Formal Dan Nonformal Penduduk Menurut Karakteristik Dan Jenjang Pendidikan, 2018

KARAKTERISTIK	SD	SMP	SMA
1	2	3	4
Jenis Kelamin			



Laki-laki	95,34	75,12	57,37
Perempuan	96,7	72,16	60,83
<b>Kelompok Pengeluaran</b>			
40 PERSEN TERBAWAH	92,82	74,79	46,27
40 PERSEN TENGAH	98,79	68,82	67,35
20 PERSEN TERATAS	100	79,34	63,06
<b>KABUPATEN GOWA</b>	<b>96</b>	<b>73,57</b>	<b>59,04</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.Gowa 2019, BPS

Tabel. 2.15

Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk Menurut Karakteristik dan Jenjang Pendidikan 2018

<b>KARAKTERISTIK</b>	<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SMA</b>
1	2	3	4
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	112,93	98,71	75,54
Perempuan	108,14	87,46	86,00
<b>Kelompok Pengeluaran</b>			
40 PERSEN TERBAWAH	106,38	99,7	70,76
40 PERSEN TENGAH	114,45	90,11	87,11
20 PERSEN TERATAS	115,65	81,98	83,35
<b>KABUPATEN GOWA</b>	<b>110,61</b>	<b>92,85</b>	<b>80,61</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.Gowa 2019, BPS

## 2. *Urusan Kesehatan*

Tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan berupa derajat kesehatan masyarakat yang optimal ditandai dengan adanya; kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk; terselenggaranya upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang diselenggarakan untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.



Urusan kesehatan menjadi prioritas pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 dengan sasaran yaitu **“Meningkatnya Layanan Kesehatan Yang Terjangkau Dan Berkualitas”**. Melalui pembangunan urusan kesehatan Pemerintah Kabupaten Gowa terus berupaya agar kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, masyarakat miskin, menengah ataupun kaya. Pembangunan kesehatan ini memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas SDM.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam usaha mencapai tujuan tersebut diatas, telah melakukan beberapa program seperti program pemerataan kesehatan, peningkatan status gizi, dan meningkatkan peran serta masyarakat. Indikator yang menjadi pengukuran dalam hal ini adalah indeks harapan II - 136 hidup seseorang sejak dilahirkan. Angka tersebut diharapkan dapat mencerminkan tingkat/ derajat kesehatan penduduk, karena apabila seseorang mempunyai derajat kesehatan yang baik maka ia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan orang yang derajat kesehatannya buruk.

Strategi yang dilakukan adalah peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik pada upaya yang bersifat promotive dan preventif maupun pada upaya yang bersifat kuratif dan rehabilitative secara proporsional.

#### **Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup**

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir,



yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

#### **Angka Kelangsungan Hidup Bayi**

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas) Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan



berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

**Tabel 2.16**  
**Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran bayi Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Tahun)	10	16	23	15	42
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	12.627	12.274	12.616	12.655	13.051
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per-1000 kelahiran bayi	0,79	1,3	1,82	1,19	3,22
4	AKHB (1-AKB)	0,21	-0,3	-0,82	-0,19	-2,22

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Gowa

Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

#### Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup.

Kasus kematian Balita dari tahun 2014 sampai 2017, cenderung meningkat namun terjadi penurunan pada tahun 2018. Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh Diare dan Phemonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor resiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit yang belum kuat.

**Tabel 2.17**





**Angka Kematian Balita/1000 kelahiran hidup Kabupaten Gowa Tahun  
2014 - 2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 5 Tahun) pada 1 tahun tertentu.	10	42	88	24	53
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	12.627	12.274	12.616	12.655	13.051
3	Angka kematian balita per-1000 kelahiran hidup.	0,79	3,42	6,98	1,9	4,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gowa, 2019

Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2014 hingga 2018 Cakupan Kematian Neonatus masih fluktuatif, hal ini disebabkan diantaranya adalah kualitas kesehatan ibu hamil yang masih rendah, kompetensi petugas dalam penatalaksanaan bayi baru lahir masih kurang, dukungan sarana prasarana yang kurang memadai serta deteksi faktor resiko yang belum akurat. Kematian neonatal dari tahun 2014 hingga 2018 rata-rata disebabkan oleh BBLR dan Asfiksa, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.

**Tabel 2.18**

**Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Gowa Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 Bulan) pada 1 tahun tertentu.	80	87	82	60	35



2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu.	12.627	12.274	12.616	12.655	13.051
3	Angka kematian neonatal per-1000 kelahiran hidup.	6,34	7,09	6,5	4,74	2,68

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Gowa,2019

- Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi  $\frac{3}{4}$  resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Kasus kematian ibu pada tahun 2014 angkanya mencapai 131,49 dan meningkat pada tahun selanjutnya sebesar 137,49. Pada tahun 2016 jumlah kematian ibu menurun menjadi 55,16 dari 45,16 pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 angka kematian mengalami kenaikan sebesar 80,03.

**Tabel2.19**

**Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran Hidup Kabupaten Gowa Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
----	--------	------	------	------	------	------



1	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 Tahun	12	14	18	13	17
2	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama.	12.627	12.274	12.616	12.655	13.051
3	Angka kematian Ibu per-100.000 kelahiran hidup.	0,95	1,14	1,43	1,03	1,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Gowa,2019

Upaya-upaya di bidang kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta. Pemerintah dan swasta dalam memberikan upaya pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan fasilitas kesehatan. Gambaran terhadap penyediaan sarana dan prasarana kesehatan pada tahun 2018 di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.20**

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gowa 2018

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	pustu	Poskesdes
Bontonompo	-	1	53	12	1
Bontonompo Selatan	-	1	41	8	1
Bajeng	1	2	69	11	1
Bajeng Barat	-	1	32	5	1
Pallangga	-	2	82	11	6
Barombong	-	2	46	5	2
Sombaopu	1	2	67	3	4
Bontomarannu	-	1	34	4	0
Pattallassang	-	2	41	4	1
Parangloe	-	1	25	5	1



Manuju	-	1	26	7	0
Tinggimoncong	-	1	24	6	0
Tombolopao	-	1	40	6	3
Parigi	-	1	18	4	0
Bungaya	-	1	28	6	5
Botolempangan	-	2	30	7	3
Tompobulu	-	1	40	7	8
Biringbulu	-	3	79	8	3
<b>Gowa</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>775</b>	<b>119</b>	<b>40</b>

Sumber : Gowa Dalam Angka 2019, BPS

Angka kesakitan/morbiditas/persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat yang bersangkutan. Gambaran terhadap Angka kesakitan masyarakat di Kabupaten Gowa Berdasarkan jenis kelamin dan kelompok pengeluaran pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

**TABEL. 2.21**  
**Angka Kesakitan Menurut Karakteristik, 2018**

<b>KARAKTERISTIK</b>	<b>ANGKA KESAKITAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Jenis kelamin</b>	
<b>Laki-laki</b>	<b>20,92</b>
<b>Perempuan</b>	<b>19,33</b>
<b>Kuintil pengeluaran</b>	
<b>40 PERSEN TERBAWAH</b>	<b>22,45</b>



<b>40 PERSEN TENGAH</b>	<b>19,46</b>
<b>20 PERSEN TERATAS</b>	<b>16,73</b>
<b>KABUPATEN GOWA</b>	<b>20,11</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.Gowa 2018, BPS

Secara persentase hingga akhir tahun 2018 masyarakat Kabupaten Gowa yang memanfaatkan Jaminan kesehatan untuk berobat terus meningkat. Pemerintah secara nasional selama 5 tahun ini terhitung mulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018 mengeluarkan anggaran untuk layanan kesehatan disetiap tingkatan layanan mencapai 874,1 juta pemanfaatan atau rerata ditahun 2018 sebanyak 640.821 untuk setiap harinya. Biaya kesehatan yang telah dikeluarkan hingga sekarang mencapai Rp.302,2 trilyun.

Gambaran pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Gowa sendiri adalah sekitar 60,34 persen penduduk memanfaatkan Jaminan kesehatan untuk berobat jalan yang didominasi oleh kelompok pengeluaran 40 persen menengah kebawah. Untuk lebih jelas dapat digambarkan pada tabel sbb :

**Tabel. 2.23**

Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Karakteristik, 2018

<b>KARAKTERISTIK</b>	<b>Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan</b>
1	2
Jenis kelamin	
Laki-laki	<b>45,98</b>
Perempuan	<b>58,58</b>
Kekompok Pengeluaran	
40 PERSEN TERBAWAH	<b>50,61</b>
40 PERSEN TENGAH	<b>60,34</b>
20 PERSEN TERATAS	<b>41,39</b>
<b>KABUPATEN GOWA</b>	<b>52,85</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.Gowa 2018, BPS

**Tabel 2.24**



Persentase Perempuan pernah kawin berumur 15 – 49 tahun yang pernah melahirkan di fasilitas Kesehatan menurut karakteristik, 2018

KARAKTERISTIK	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
Kelompok Pengeluaran	
40 PERSEN TERBAWAH	86,98
40 PERSEN TENGAH	91,27
20 PERSEN TERATAS	84,65
Pendidikan Tertinggi	
Laki-laki	79,67
Perempuan	94,94
<b>KABUPATEN GOWA</b>	<b>88,33</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab.Gowa 2018, BPS

Dari sisi jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Gowa yang melayani seluruh masyarakat berdasarkan kecamatan untuk tahun 2018, tergambar dari data sebagai berikut :

**Tabel.2.25**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa, 2018**

No	Kecamatan	Tenaga Kesehatan	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Gizi
1	Bontonompo	3	14	17	2	1
2	Bontonompo Selatan	6	12	10	2	3
3	Bajeng	3	26	21	5	5
4	Bajeng Barat	3	30	18	6	3
5	Pallangga	3	30	18	6	3
6	Barombong	4	18	11	3	4
7	Sombaopu	11	23	21	12	6
8	Bontomarannu	4	18	11	3	1
9	Pattallassang	4	16	10	3	3
10	Parangloe	2	6	8	1	2
11	Manuju	1	4	7	3	0
12	Tinggimoncong	3	8	7	1	1
13	Tombolopao	0	3	3	0	1



14	Parigi	1	7	7	1	1
15	Bungaya	1	11	7	1	0
16	Botolempangan	0	6	8	1	0
17	Tompobulu	3	2	8	2	0
18	Biringbulu	2	10	19	1	0
<b>Gowa</b>		<b>54</b>	<b>229</b>	<b>204</b>	<b>50</b>	<b>32</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Gowa

### **Rasio Dokter Per Satuan Penduduk**

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.26

Rasio Dokter Tahun 2014 s/d 2018

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Dokter	119	128	130	138	142
2	Jumlah Penduduk	709.386	722.702	735.493	748.200	760.607
3	Rasio dokter per satua penduduk	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Gowa

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

- Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik  
Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.27

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Gowa Tahun 2013 s.d 2018

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kondisi Baik	920,18	848,12	885,07	967,66	1.049.96	1.487



No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.	Kondisi Rusak Sedang	75,43	70,51	63,76	59,60	61.09	-
3.	Kondisi Rusak	264,71	269.56	262,15	243,81	220.34	-
4.	Kondisi Rusak Berat	1.208,64	1.198,67	1.185,50	1.125,46	1.065.14	918,78
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	2.468,96	2.386,85	2.396,52	2.396,52	2.396.52	2.396.52

**Tabel 2.28**  
Panjang Jalan berdasarkan Kondisi  
Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2018

Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Jalan Secara Keseluruhan
Bontonopmo	94.61	6.35	13.02	23.24	137.214
Bonsel	12.07	0.51	1.77	1.88	16.219
Bajeng	104.04	12.91	31.07	35.13	183.146
Bajeng Barat	37.90	0.00	4.25	3.60	45.747
Pallangga	91.16	4.05	14.39	24.93	134.531
Barombong	68.10	2.80	6.44	6.41	83.752
Somba Opu	77.85	6.10	4.85	0.00	88.799
Bontomarannu	94.69	5.50	5.00	85.07	190.263
Pattallassang	11.96	0.00	1.35	0.00	13.317
Parangloe	85.31	6.16	37.10	211.60	340.169
Manuju	16.12	0.77	0.77	5.38	23.128
Tinggimoncong	115.01	4.10	41.45	140.39	300.943
Tombolopao	41.12	0.40	22.77	195.03	259.318
Parigi	2.20	0.00	0.00	2.65	4.852
Bungaya	63.25	3.01	7.00	125.19	198.445
Bontolempangan	6.15	0.00	2.73	1.03	9.906
Tompobulu	66.30	5.85	21.08	97.00	190.228
Biringbulu	62.04	1.85	3.90	108.77	176.555
<b>Jumlah</b>	<b>1,049.96</b>	<b>60.35</b>	<b>218.93</b>	<b>1,067.29</b>	<b>2.396.53</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Gowa

- Rasio Jaringan irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air





irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan kedalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Adapun Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.29.**  
Rasio Jaringan Irigasi Tahun  
di Kabupaten Gowa Tahun 2014 s.d 2018

	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jaringan primer					
2.	Jaringan Sekunder	13.984	22.772	35.147	61.977	74.607
3.	Jaringan Tersier	6.248	779	288		
4.	Luas lahan budidaya	14.137	14.737	15.874	17.407	20.929
5.	<b>Rasio</b>	<b>1,43</b>	<b>1,60</b>	<b>2,23</b>	<b>3,56</b>	<b>2,78</b>

Sumber : Dinas PU & PR Kab.Gowa

**Tabel 2.30.**  
Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa tahun 2017

NO	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi (6=3+4+5)	Luas lahan budidaya (7)	Rasio (8=6/7)
		Primer	Sekunder	Tersier			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8=6/7)
1	Bontonampo **						
2	Bonsel **						
3	Bajeng **						
4	Bajeng Barat						
5	Pallangga **						
6	Barombong **						
7	Somba Opu *						
8	Bontomarannu *						
9	Pattallassang		10.501		10.501	710	14.79
10	Parangloe		23.889		23.889	2.815	13.10
11	Manuju		8.121		8.121	678	11.98
12	Tinggimoncon		29.051		29.051	2.191	13.26
13	Tombolopao		84.288		84.288	4.919	17.13
14	Parigi		36.899		36.899	2.815	13.1
15	Bungaya		58.498		58.498	3.338	17.52
16	Bontolempang		58.813		58.813	3.113	18.89
17	Tompobulu		65.846		65.846	3.413	19.29



18	Biringbulu		72.453		72.453	4.545	15.94
	<b>Jumlah</b>		<b>448.359</b>		<b>448.359</b>	<b>26.831</b>	<b>163</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

**Tabel 2.31**  
Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan jaringan Irigasi di Kabupaten Gowa Tahun 2014 s.d 2018

No	Pasokan irigasi	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pasokan Irigasi per Area	01.32	01.30	01.27	01.25	01.21
2	Pasokan Irigasi Relatif	01.35	01.30	01.28	01.26	01.21
3	Pasok Air Relatif	0,13	0,13	02.55	02.50	02.14
4	Indek Luas Areal	75%	76%	77%	78%	79%
5	Rancangan Luas Areal	14.137	14.737	15.874	17.407	26.831

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

- Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.

**Tabel 2.32**  
Rasio Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Layak Huni	Rasio
-1	-2	-3	-4	-5
1	Bontonompo	42.495	7.309	0,17
2	Bonsel	31.713	5.518	0,17
3	Bajeng	70.500	12.211	0,17
4	Bajeng Barat	24.639	4.238	0,17
5	Pallangga	120.243	20.610	0,17
6	Barombong	41.553	7.230	0,17
7	Somba Opu	151.031	26.430	0,17
8	Bontomarannu	37.939	6.495	0,17
9	Pattallassang	24.823	4.294	0,17



10	Parangloe	18.458	3.182	0,17
11	Manuju	15.305	2.632	0,17
12	Tinggimoncong	23.571	4.054	0,17
13	Tombolopao	29.573	5.146	0,17
14	Parigi	12.623	2.156	0,17
15	Bungaya	17.511	3.029	0,17
16	Bontolempangan	17.537	2.992	0,17
17	Tompobulu	30.548	5.297	0,17
18	Biringbulu	38.102	6.609	0,17
	<b>Jumlah</b>	<b>748.164</b>	<b>129.433</b>	<b>00.17</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan

- Rasio Permukiman layak huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.

**Tabel 2.33.**

Rasio Permukiman Layak Huni Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah Permukiman	Luas Wilayah Permukiman Layak Huni	Rasio
-1	-2	-3	-4	-5
1	Bontonompo	124,8	87,3	0,7
2	Bonsel	90,4	54,2	0,6
3	Bajeng	197,9	148,4	0,75
4	Bajeng Barat	72,7	47,3	0,65
5	Pallangga	313,5	232	0,74
6	Barombong	109,6	87,7	0,8
7	Somba Opu	413,8	335,1	0,81
8	Bontomarannu	99,2	81,3	0,82
9	Pattallassang	69,4	48,6	0,7
10	Parangloe	52,6	39,4	0,75
11	Manuju	44,7	29	0,75



12	Tinggimoncong	70,3	49,9	0,65
13	Tombolopao	85,3	46,9	0,71
14	Parigi	41,5	24,9	0,55
15	Bungaya	50,3	27,6	0,6
16	Bontolempangan	42,3	25,4	0,55
17	Tompobulu	92	64,4	0,6
18	Biringbulu	102,7	77	0,7
<b>Jumlah</b>		<b>2.073</b>	<b>1.506,40</b>	<b>0,69</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan

**Tabel 2.34.**  
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Gowa Tahun 2013 s.d 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	54.912	56.890	60.878	65.191	69.945	75.116
2	Jumlah rumah tinggal	130.588	131.903	134.093	138.262	141.877	149.633
3	Persentase (%)	42,05	43,13	45,4	47,15	49,3	50,2

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan

**Tabel 2.35.**  
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tinggal	Jumlah Rumah Tinggal Berakses	Persentase
-1	-2	-3	-4	(5=4/3x100)
1	Bontonompo	8.499	5.545	65,2
2	Bonsel	6.343	3.774	59,5
3	Bajeng	14.100	8.345	59,2
4	Bajeng Barat	4.928	2.548	51,7
5	Pallangga	24.049	12.998	54
6	Barombong	8.311	5.446	65,5
7	Somba Opu	30.206	11.526	38,2
8	Bontomarannu	7.588	2.759	36,4
9	Pattallassang	4.962	2.401	48,4
10	Parangloe	3.692	1.341	36,3
11	Manuju	3.061	1.170	38,2



12	Tinggimoncong	4.714	1.437	30,5
13	Tombolopao	5.915	2.695	45,6
14	Parigi	2.525	983	38,9
15	Bungaya	3.502	1.413	40,4
16	Bontolempangan	3.507	1.426	40,7
17	Tompobulu	6.110	3.573	58,5
18	Biringbulu	7.620	5.735	75,3
<b>Jumlah</b>		<b>149.633</b>	<b>75.116</b>	<b>50,2</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

## 5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

- Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat

**Tabel 2.36.**  
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja  
di Kabupaten Gowa Tahun 2016 s.d 2017

NO	Uraian	2016	2017
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	667	595
2	Jumlah Penduduk	691.309	709.386
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0.096	0.084

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

- Angka kriminalitas

**Tabel 2.37.**  
Angka Kriminalitas di Kabupaten Gowa Tahun 2013 s.d 2017

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus Narkoba	11	11	16	22	28
2	Jumlah kasus Pembunuhan	11	9	4	4	5
3	Jumlah Kejahatan Seksual	17	5	9	7	4
4	Jumlah kasus Penganiayaan	423	424	393	358	355
5	Jumlah kasus Pencurian	638	676	853	834	412
6	Jumlah kasus Penipuan	139	104	107	97	113
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	1	-	-



8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	1.239	1.229	1.383	1.322	913
9	Jumlah Penduduk	652.941	659.513	670.465	691.309	670.465
10	Rasio Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,0018	0,0018	0,002	0,0019	0,0013

Sumber : Kab.Gowa dalam Angka 2018, BPS

**Tabel. 2.38**  
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,48	0,48	0,43	0,48	0,47

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Gowa

## 6. Urusan Sosial

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disamping itu juga memberdayakan sumber potensi kesejahteraan sosial (PSKS). Beberapa masalah yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya masih rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Gambaran terhadap capaian Kabupaten Gowa untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat dilihat pada **Tabel. 2.39** dibawah ini :

**Tabel.2.39**



Indikator sosial Kabupaten Gowa Tahun 2014 s/d 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	94,24%	82,10%	59,89%	83,84%	77,13%
2	Persentase PMKS yang tertangani	-	31,73%	26,60%	35,38%	64,80%
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	95,34%	80,69%	60,20%	83,11%	70,33%
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	19,01%	19,60%	10,38%	61,84%	94,28%

**Tabel 2.39**

Jumlah Disabilitas Tahun 2017 di Kabupaten Gowa

Kecamatan	Daksa Kaki	Daksa Tangan	Tuna Wicara	Tuna Netra	Disabilitas Ganda	Tuna Grahita	Lain-2	Jumlah
Bontonompo	41	10	34	19	69	-		173
Bontonompo Selatan	26	3	35	33	35	-		132
Bajeng	20	3	49	27	73	-		172
Bajeng Barat	10	2	23	11	34	-		80
Pallangga	26	8	21	14	40	-		109
Barombong	13	3	11	13	22	-		62
Somba Opu	18	5	21	19	48	-		111
Bontomarannu	7	1	14	18	25	-		125
Pattallassang	10	1	23	19	38	-		91
Parangloe	18	3	10	14	35	-		80
Manuju	11	4	9	7	27	-		58
Tinggimoncong	10	5	13	11	15	-		54
Tombolo Pao	16	6	19	8	22	-		71
Parigi	15	6	16	9	25	-		71
Bungaya	11	3	10	7	23	-		54
Bontolempangan	8	1	6	13	17	-		45
Tompobulu	11	4	10	10	16	-		51
Biringbulu	19	3	10	13	15	-		60
<b>Jumlah</b>	<b>290</b>	<b>71</b>	<b>334</b>	<b>265</b>	<b>579</b>	<b>-</b>		<b>1.599</b>

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gowa

**7. Urusan Tenaga Kerja**



- Ketenaga kerjaan

Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

- Angkatan Kerja

**Tabel 2.40.**

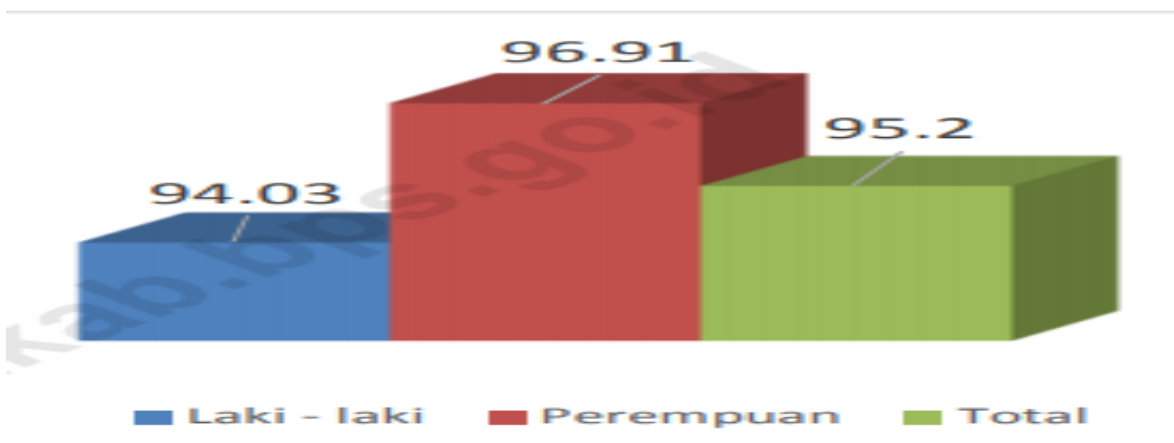
Penduduk usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Gowa Tahun 2018

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>218.728</b>	<b>149.738</b>	<b>368.466</b>
- bekerja	205.672	145.112	350.784
- pengangguran terbuka	13.056	4.626	17.682
<b>Bukan angkatan Kerja</b>	<b>46.306</b>	<b>131.725</b>	<b>178.031</b>
- Sekolah	23.194	33.707	56.901
- mengurus rumah tangga	10.214	91.704	101.918
- lainnya	12.898	6.314	19.212
<b>Jumlah</b>	<b>265.034</b>	<b>281.463</b>	<b>546.497</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk angkatan kerja terbanyak pada penduduk laki – laki dibandingkan penduduk perempuan. Ini juga sejalan dengan jumlah pengangguran terbuka yang lebih banyak pada penduduk laki-laki. Jumlah pengangguran pada penduduk perempuan yang lebih sedikit dibandingkan penduduk laki – laki sehingga meningkatkan nilai tingkat partisipasi angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran untuk penduduk perempuan.

**Grafik.2.9**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa Tahun 2018







Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2019, BPS

Berdasarkan grafik diatas diketahui TPAK Kabupaten Gowa tahun 2018 yaitu 95,2 persen, artinya 95 sampai 96 orang penduduk usia kerja (15 tahun keatas) tergolong angkatan kerja (bekerja dan pengangguran). Peningkatan TPAK menunjukkan semakin meningkatnya pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Gowa untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Terdapat perbedaan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas sebagian besar (94,03 persen) tergolong angkatan kerja (TPAK). Sedangkan untuk TPAK perempuan sebesar 96,91 persen.

### 8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan dilembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

**Tabel 2. 41**

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Gowa Tahun 2013 s/d 2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II (Gol IV)	2	2	2	2	2	1
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	38	40	42	46	48	54
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	210	215	225	233	277	285
4	Pekerja Perempuan di pemerintah	87.115	87.252	87.385	87.588	88.215	88.215
5	Jumlah pekerja perempuan	149.965	157.135	159.715	171.865	181.886	196.453
6	Presentasi pekerja perempuan di lembaga pemerintah	58,09	55,52	54,71	50,96	48,50	44,90

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2019, BPS

### 9. Urusan Pangan



Potensi Kabupaten Gowa yang terbesar adalah di sektor pertanian. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil pertaniannya berupa padi, palawija dan tanaman pangan hortikultura. Selain bertani dengan masa tanam yang pendek, para petani di Gowa juga banyak yang bertani tanaman umur panjang, salah satu tanaman markisa yang menjadi buah khas daerah Sulawesi Selatan. Desa kanreapia, Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu daerah penghasil markisa di Kabupaten Gowa. Namun kian lama lahan kebun markisa kian berkurang diganti dengan kebun sayur-sayuran seperti kibs dan kentang.

Tabel.2.42

Luas panen pertanian tanaman pangan menurut jenis Kabupaten Gowa Tahun 2017 – 2018

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Padi Sawah	64.121	64.243
2. Jagung	48.467	46.579
3. Kedelai	196	147
4. Kacang Tanah	357	566,7
5. Kacang Hijau	3.881	2.185,50
6. Ubi Kayu	7.740,9	5.934
7. Ubi Jalar	451	893,50

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam angka 2019, BPS

Kabupaten Gowa merupakan daerah agraris. Mayoritas lahan pertaniannya digunakan untuk menanam jenis tanaman padi sawah. Berdasarkan data Kabupaten Gowa dalam Angka 2019, luas panen padi sawah meningkat dari 64.121 hektar pada tahun 2017 menjadi 64.243 hektar pada tahun 2018.



Tabel. 2.43

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan Kabupaten Gowa Tahun 2018

Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
010. Bontonompo	1.655	940	2.595
011. Bontonompo Selatan	562	1.556	2.118
020. Bajeng	3.112	153	3.265
021. Bajeng Barat	1.425	75	1.500
030. Pallangga	2.680	58	2.738
031. Barombong	1.539	111	1.650
040. Somba Opu	1.084	62	1.146
050. Bontomarannu	645	308	953
051. Pattallassang	657	1.270	1.927
060. Parangloe	446	583	1.029
061. Manuju	399	1.570	1.969
070. Tinggi Moncong	1.100	253	1.353
071. Tombolo Pao	956	1.429	2.385
072. Parigi	806	450	1.256
080. Bungaya	1.438	500	1.938
081. Bontolempangan	1.586,25	750,25	2336,50
090. Tompobulu	2.150	423	2.573
091. Biringbulu	830	801	1.631
<b>Jumlah</b>	<b>23.070</b>	<b>11.292</b>	<b>34.362</b>

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2019, BPS

## 10. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan hidup sebagaimana dalam undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Urusan lingkungan hidup ditangani oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Gowa. Gambarn terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

- o Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Tabel 2.44.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Gowa Tahun 2010 s/d 2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	41	46	51	56	64	70
2	Jumlah Daya Tampung TPS	328	368	408	448	512	560
3	Jumlah Penduduk	652.941	659.513	670.465	691.309	709.492	748.164
4	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah Penduduk	0,502	0,567	0,608	0,648	0,721	0,748

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gowa



**Tabel 2.46.**  
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk  
Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	TPS		Rasio
		Jumlah (Unit)	Jlh Daya Tampung (M <sup>3</sup> )	
-2	-3	-4	-5	(6=5/3)
Bontonompo	42.495	1	8	0,131
Bonsel	31.713	0	0	0
Bajeng	70.500	4	32	0,315
Bajeng Barat	24.639	0	0	0
Pallangga	120.243	15	120	0,692
Barombong	41.553	2	16	0,267
Somba Opu	151.031	37	296	1.959
Bontomarannu	37.939	6	48	1.265
Pattallassang	24.823	5	40	1.611
Parangloe	18.458	0	0	0
Manuju	15.305	0	0	0
Tinggimoncong	23.571	0	0	0
Tombolopao	29.573	0	0	0
Parigi	12.623	0	0	0
Bungaya	17.511	0	0	0
Bontolempangan	17.537	0	0	0
Tompobulu	30.548	0	0	0
Biringbulu	38.102	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>748.164</b>	<b>70</b>	<b>560</b>	<b>0,5194</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gowa



## 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2018 DAN REALISASI RPJMD

### 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2018

Dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diperlukan adanya kegiatan pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Gowa 2018 untuk memastikan dan menilai target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD tercapai agar sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan lima tahunan daerah atau RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 -2021 dapat diwujudkan.

Adapun dasar pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020, dimana pada pasal 13 menyatakan, evaluasi hasil sebagaimana yang dimaksud didalam peraturan ini dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan peraturan acuan permendagri tersebut pula, ditetapkan 5 (lima) kriteria pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan yang diukur dengan melihat tingkat capaian indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta realisasi anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Adapun kriteria penilaian tersebut seperti tergambar dibawah ini:

**KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100 %	ST = Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	T = Tinggi
3.	66% ≤ 75 %	S = Sedang
4.	51% ≤ 65 %	R = Rendah



5.	≤ 50 %	SR = Sangat Rendah
----	--------	--------------------

## Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

**Sasaran Tahunan Pembangunan Daerah :** Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi & sumber daya manusia yang berkualitas dengan tata kelola pemerintahan yang baik

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		Rp. (000)		Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.
1	DINAS PENDIDIKAN						66.814.042	64.917.329						
1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	70,24	6.468.325	6	720.165	240.055	226.555	97,5	95,8	66,25	65,97	
1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun	Angka Partisipasi sekolah 7 -15 tahun	1.000 orang	8.444.763.770	12	9.133.716	38.007.511	37.033.853	92,67	88,83	65,44	64,81	
1	18	Program Pendidikan Non Formal	angka melek huruf	97,02 %	3.311.881	12	9.133.716	3.044.572	3.008.141	94,98	94,74	65,83	65,79	
1	20	Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan	angka kelulusan		70.106.077	39	21.889.800	7.296.600	7.152.179	97,48	96,95	66,25	66,16	
1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya SDM Masyarakat Kabupaten Gowa		9.501.151	48	9.537.996	3.179.332	3.111.915	98,6	98,31	66,43	66,39	
1	23	Program DAK Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar			18	37.209.414	12.403.138	12.047.422	81,93	81,64	55,32	55,27	
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>										94,76	93,45	65,79	65,57	
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>										ST	ST	S	S	



Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp.	K	Rp. (000)	K		Rp.
2	1		DINAS KESEHATAN						79.940.739	74.480.976						
2	1	5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Obat dan Perbekalan Kesehatan	6,00	paket	42.700.182	3	21.350.091	7.116.697	6.840.101	96,11	3,97	28.190.192	5,17	5,02
2	1	6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	100	%	62.274.426	48	167.869.698	55.956.566	54.739.979	98,21	63,77	22.609.677	5,42	5,37
2	1	9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat	80	%	759.532	30	1.175.865	391.955	390.155	98,82	40	1.566.020	5,50	5,47
2	1	0	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	persentase jumlah gizi buruk	0,04 (10)	%	85.310	381	406.800	135.600	131.574	89,32	495,47	538.374	5,07	4,89
2	1	1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	persentase kasus penyakit menular, tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan	100	%	238.532	24	1.102.101	367.367	259.182	86,77	30,95	1.361.283	4,48	4,46
2	1	2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	persentase penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	100	%	524.520	840	2.163.510	721.170	718.774	99,86	1.119	2.882.284	5,65	5,64
2	1	4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	persentase peserta kesehatan gratis terintegrasi	100	%	4.066.613	3,00	9.881.655	3.293.885	1.600.178	48,58	3,49	11.481.833	3,17	3,10





2	1	5	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	persentase puskesmas perawatan	100	%	7.662.688	3,00	609.000	203.000	203.000	100,00	4,00	812.000,00	5,67	5,67	
2	1	0	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	persentase peningkatan kesehatan lansia	100	%	19.200	78	65.850	21.950	21.950	100,00	104	87.800	5,67	5,67	
2	1	2	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Adanya Peningkatan Penanganan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	198	kegiatan	27.261.432	99	13.630.716	4.543.572	2.922.449	95,42	132	16.553.165	5,25	5,90	
2	1	4	Program Perencanaan Sistem Perencanaan	Terlaksananya Sistem Perencanaan	18	kegiatan	3.033.498	9	1.516.749	505.583	100.000	99,05	11,98	2.015.032	5,53	5,51	
2	1	5	Program DAK Bidang Kesehatan	Terlaksananya DAK Bidang Kesehatan						5.707.302	5.667.830	97,48			6,30	6,25	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												91,98			5,45	5,33	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST					

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
2	2	RSUD SYEKH YUSUF					115.586.984	108.611.312										
2	2	3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	penyempurnaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan	24	bulan	3.276.300	12	1.638.150	546.050	382.522	0,13	3,49	15	2.020.672	3,35	63,08	
2	2	6	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	tingkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	6,00	bulan	50342424	18,00	5171212,00	8.390.404	6.839.184	2,72	2,00	24	32.010.396	65	65	



2	2	7	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Penyempurnaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	24,00	-	16.732.938	12,00	8.366.469	2.788.823	2.701.214	5,90	4,64	5,84	11.067.683	65,98	65,77
2	2	3	Program Peningkatan Pelayanan RSU	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	36	ihun	303.939.396	18	969.698	50.656.566	46.150.938	97,30	96	24	198.120.636	66,22	66,05
2	2	5	Program DAK Bidang Kesehatan	Penyempurnaan DAK Bidang Kesehatan	12	ihun	269.784.762	6	134.892.381	44.964.127	44.668.687	8,95	8,62			66,49	66,44
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												5,32	4,39			5,89	5,73
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Catatan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	K	(000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
3	1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					326.700.329	316.396.787								
3	1	5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan dan Jembatan	36	atan	33.045.026	18	666.522.513	222.174.171	216.490.017	6,67	5,32	3,80	883.012.530	66,11	65,89
3	1	6	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	6	in	850.462,00	3	4.425.231	1.475.077	1.475.013	0,00	0,00			66,67	66,67
3	1	8	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rasio Permukaan Jalan Dengan Baik	12	in	13.176.756	6	6.588.378	2.196.126	2.193.624	0,00	9,88	8,00	3.782.002,00	66,67	66,65
3	1	0	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Terwujudnya Pemutakhiran Data Di Bidang Perencanaan	6,00	in	313.488	3,00	156.744,00	52.248	52.161	0,00	9,83			66,67	66,64
3	1	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	12	in	760.200	6	380.100	126.700	125.036	9,25	9,17	8	505.136	66,54	66,53



3	1	4	Program Pengembangan dan Pengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jaringan Irigasi Yang Berfungsi Dengan Lebih Baik	48		131.212.590	24	65.606.295	21.868.765	21.771.695	99,25	98,88	32	87.377.990	66,54	66,48			
3	1	6	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konsevasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	Intensitas Tanam Meningkat	24 tahun		32.387.496	12	16.193.748	5.397.916	4.828.887	97,00	96,09	16	21.022.635	66,17	66,02			
3	1	0	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Biaya Operasional Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIPI)	6,00 tahun		3.409.878	3	1.704.939	568.313	567.518	0,00	9,86			66,67	66,64			
3	1	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang	12 TAHUN		2.659.704	6	1.329.852	443.284	426.144	5,50	5,70			66,08	65,95			
3	1	2	Program Pemanfaatan Tata Ruang	Pemanfaatan Tata Ruang	6 tahun		612.840	3,00	306.420	102.140	102.140	0,00	0,00			66,67	66,67			
3	1	3	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya Pengawasan Bangunan IMB	12 KEGIATAN		509.676	6	254.838	84.946	68.011	0,00	7,78	8	322.849	63,33	62,96			
3	1	4	Program Perencanaan Pekerjaan Umum Daerah	Perencanaan Pekerjaan Umum Daerah	42 KEGIATAN		15.315.198	21	7.657.599	2.552.533	2.532.903	95	94	28	10.190.502	65,80	65,66			
3	1	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakarya	Terpeliharanya Pedestrian Dalam Kota Sungguminasa	30 KEGIATAN		284.700.948	15	142.350.474	47.450.158	44.968.629	5,20	5,85			66,03	65,98			
3	1	6	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih / Air Minum	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih / Air Minum	18 KEGIATAN		43.735.950	9	21.867.975	7.289.325	6.142.095	3,33	1,51	12	28.010.070	65,56	65,25			
3	1	8	Program Lingkungan Sehat	Terciptanya lingkungan yang sehat	24 LINK		53.815.698	12	26.907.849	8.969.283	8.904.477	3,75	3,29			66,46	66,38			
3	1	9	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Kualitas Prasarana Jalan Lingkungan	6 KEGIATAN		14.057.454	3,00	7.028.727	2.342.909	2.342.659	0,00	9,99			66,67	66,66			
3	1	0	Program Kabupaten Sehat	Kabupaten Sehat	6 KEGIATAN		390.000	3	195.000	65.000	64.686	0,00	9,52	4	259.686	66,67	66,59			
3	1	1	Program Pendampingan Kegiatan	Terlaksananya biaya pendampingan kegiatan	6 KEGIATAN		4.606.698	3,00	2.303.349	767.783	767.627	100,00	99,98	4	3.070.976	66,67	66,66			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												7,44	5,87					24	66,15	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST					S	S	



Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
4	1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					20.745.480		9.107.414									
04	01	1	5	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	42 %	9.489.330	21	4.744.665	1.581.555	7	1.553.704	96,43	95,98	28	6.298.369	66,07	66,00
04	01	2	1	Program Peningkatan Kualitas Rumah / BSPS	Peningkatan Kualitas Rumah / BSPS	30 Unit	294.000	3	147.000	49.000		49.000	100,00	100,00	4	196.000	66,67	66,67
04	01	2	3	Program Penatausahaan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penatausahaan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	18 Kegiatan	111.567.078	9	55.783.539	18.594.513		8.585.724	66,67	64,64	11	64.369.263	61,11	60,77
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											81,93	81,07			63,66	63,51		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											T	T			S	S		

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
5	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							7.269.849	7.264.342							



5	1	5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	meningkatnya keamanan dan nyaman lingkungan	20	Persen	28.423.662	177	4.211.831	4.737.277	4.737.262	0,00	99,99	236	8.949.093	66,67	66,66
5	1	6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Menurunnya tingkat kriminalitas	10	Persen	2.156.640	6	1.078.320	359.440	359.380	0,00	99,99	8	1.437.700	66,67	66,67
5	1	7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	6	tahun	1.711.992	6	855.996	285.332	285.293	0,00	99,99	8	1.141.289	66,67	66,66
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												9,88	99,83			66,65	66,64
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		eterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
6	1		<b>DINAS SOSIAL</b>														
6	1	5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya	18	516.518	9	58.259	752.753	3	632.094	2,83	9,39	12	2.890.353	65,47	64,90
6	1	6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	42	179.070	21	89.535	1.529.845		1.304.081	0,71	0,04	27	5.893.616	65,12	65,01
6	1	8	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	30	1.622.838	12	811.419	270.473		199.500	4,00	8,76	3,84	1.010.919	64,00	62,29
6	1	9	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	30	321.318	12	160.659	53.553		53.503	0,00	9,91	4	214.162	66,67	66,65



6	1	0	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan lainnya)	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan lainnya)	30	423.588	9	211.794	70.598	70.548	0,00	9,93	4	282.342	66,67	66,65
6	1	1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	60	605.838	6	302.919	100.973	89.440	2,50	0,83	7,85	392.359	65,42	65,14
6	1	2	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan / Kejuangan	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan / Kejuangan	100	16.800.048	33	8.400.024	2.800.008	1.927.463	7,50	3,36	41,50	10.327.487	64,58	63,89
6	1	3	Program Pembinaan Keagamaan	Pembinaan Keagamaan	66	18.104.598	33	9.52.299	3.017.433	2.832.517	5,36	4,23	43,49	11.884.816	65,89	65,71
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											1,37	9,06			5,23	4,84
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											ST	ST			S	S

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
6	2	DINAS PEMADAM KEBAKARAN					3.111.587	3.045.478									
6	2	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	0	atan	813.116	06.558	2.802.186	2.746.118	3,20	2,26	20	152.676	65,53	65,38		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											4,06	3,71			5,68	5,62	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											ST	ST			S	S	



Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
1	1		<b>DINAS TENAGA KERJA &amp; TRANSMIGRASI</b>														
1	1	5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	76.864	8	92.288	146.144	146.144	0,00	0,00	12	438.432	50,00	50,00		
1	1	6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja	30.454	5	76.818	238.409	237.903	0,00	9,67	9	714.721	50,00	49,94		
1	1	7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	88.358	3	62.786	81.393	81.393	0,00	0,00	12	244.179	50,00	50,00		
1	1	8	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	09.494	5	36.498	118.249	117.589	9,33	8,99			49,89	49,83		
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>										9,30	9,03			5,79	5,74		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>										ST	ST			R	R		

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	(000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	



2	1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.110.796	1.095.651							
2	1	5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	atan	853.200	3	426.600	142.200	142.200	00,00	00,00	24	568.800	66,67	66,67	
2	1	6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	atan	360.750	3	180.375	60.125	57.575	96,00	95,76	3,96	237.950	66,00	65,96	
2	1	7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	atan	1.087.180	2	543.590	514.530	514.434	00,00	99,83	16	2.058.024	66,67	66,64	
2	1	8	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	tahun	62.028	3	31.014	10.338	9.588	96,00	92,75	3,96	40.602	66,00	65,46	
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>											7,43	6,68			66,24	66,11	
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>											ST	ST			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
2	3	4	5		6		7	12	13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16				
3	01	DINAS KETAHANAN PANGAN						586.337	583.445									
3	1	5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Program Ketahanan Pangan	60	kegiatan	716.880	30	358.440	119.480	119.477	00,00	00,00	40	477.917	67	66,67	
3	1	6	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	Meningkatnya Program Diservifikasi Pangan	60	kegiatan	1.140.870	30	570.435	190.145	190.077	00,00	99,97	40	60.512	67	66,66	
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>											99,61	99,45			60	66,58		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>											ST	ST			S	S		





Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
5	1		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>													
5	1	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	atan	437.238	218.619	72.873	72.873	00,00	00,00	16	291.492	66,67	66,67	
5	1	6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat/Pelaku Usaha	atan	112.392	56.196	18.732	18.732	0,00	0,00	4	74.928	66,67	66,67	
5	1	7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	atan	643.394	821.697	273.899	270.451	9,75	9,59	16	992.148	66,63	66,60	
5	1	8	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Peningkatan Pengendalian Polusi	atan	200.586	100.293	33.431	32.860	8,00	8,29	3,98	133.153	66,33	66,38	
5	1	9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	in	942.662	971.331	9.323.777	9.234.371	9,17	9,04	24	205.702	66,53	66,51	
5	1	0	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	en	4.036.236		672.706	672.582	0,00	9,98	4,00	2.690.700	66,67	66,66	
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>										9,31	9,19			6,55	6,53	
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>										ST	ST			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	Keterangan
------	--------------------	---	---	--	---	---	--	---	--	------------



								2018 (TAHUN N)				s/d Tahun 2018 (%)										
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.							
2		3		4		5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
6	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								3.595.600	3.370.536											
6	1	5	Program Penataan Adminitrasi Kependudukan	Penataan Adminitrasi Kependudukan	90	kegiatan	1.786.112	45	5.893.056	1.964.352	1.946.774	7,17	5,68	60	7.839.830	66,19	66,11					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											4,08	2,95			5,68	5,49						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											ST	ST			S	S						

Kode		Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		eterangan		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
2		3		4		5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
7	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								5.954.814	4.829.979											
7	1	5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Kapasitas dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan	24	keg	1.575.276	12	787.638	262.546	210.983	82,50	80,85	15	998.621	63,75	63,47					
7	1	6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Berkembangnya Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat dan Keluarga	30	persen	94.380	12	47.190	15.730	15.602	100,00	99,19	4	62.792	66,67	66,53					
7	1	7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan	12	kegiatan	8.802.530	6	1.401.265	3.133.755	2.060.836	90	83	8	11.462.101	65,00	63,77					



7	1	8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	tingkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	24	Keg	2.058.050	12	1.029.025	2.009.675	2.009.600	100,00	100,00	16	8.038.625	66,67	66,67	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											96,56	95,32			66,09	65,89		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											ST	ST			S	S		

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan			
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
8	1		<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>															
8	1	5	Program Pelayanan Kontrasepsi	Pelayanan Kontrasepsi	18	Kegiatan	295.500	9	147.750	49.250	49.250	100	100	12	197.000	66,67	66,67	
8	1	6	Program Peningkatan Fungsi dan Jaringan KB	Peningkatan Fungsi dan Jaringan KB	72	Keg	1.368.018	36	684.009	228.003	228.003	100,00	100,00	48	912.012	66,67	66,67	
8	1	7	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	36	keg	7.627.302	18	3.813.651	1.271.217	1.270.717	99,83	99,74	23,99	5.084.368	66,64	66,62	
8	1	9	Program Penggerakkan KIE mengenai KKBPK bagi Masyarakat	Penggerakkan KIE mengenai KKBPK bagi Masyarakat	42	keg	954.000	21	477.000	159.000	159.000	100,00	100,00	28	636.000	66,67	66,67	
8	1	0	Program DAK Bidang Keluarga Berencana	DAK Bidang Keluarga Berencana	30	Persen	9.004.992	15	4.502.496	1.500.832	1.439.294	97,00	96,22	9,85	1.941.790	66,17	66,04	
8	1	1	Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	30	Persen	26.800.740	15	13.400.370	4.466.790	4.456.224	99,40	99,13	9,97	7.856.594	66,57	66,52	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											98,86	8,45			66,48	66,41		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											ST	ST			S	S		



Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Anggaran Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
9	1						1.042.687	1.038.338										
9	1	5	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang terbangun	100	rsen	146.802	12	73.401	24.467	24.467	00,00	00,00	4	97.868	66,67	66,67	
9	1	6	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang terpelihara dengan baik dan berfungsi dengan optimal	100	rsen	411.534	3	205.767	68.589	68.486	00,00	99,85	4	274.253	66,67	66,64	
9	1	7	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pelayanan Angkutan Umum Menjadi Lebih Baik	100	rsen	482.106	12	241.053	80.351	80.192	00,00	99,80			66,67	66,63	
9	1	8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	100	rsen	1.263.402	24	631.701	210.567	210.567	00,00	00,00	32,00	842.268	66,67	66,67	
9	1	9	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pelayanan dalam hal torPeningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	100	rsen	936.894	3	468.447	156.149	155.449	00,00	99,55	4,00	623.896	66,67	66,59	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											99,91	99,75			66,65	66,63		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											ST	ST			S	S		



Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
010	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						8.987.434	7.723.065									
0105	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	42	persen	8.202.622	21	14.101.311	4.700.437	3.497.131	85,64	85,45	27,00	17.598.442	64,27	64,24		
0106	Program Kerja sama Informasi dengan Mas Media	Informasi Pemerintah tersedia	24	persen	1.611.498	12	805.749	268.583	268.380	99,75	99,58			66,63	66,60		
0107	Program Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Informasi	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Informasi	24	egiatan	1.452.918	12	726.459	242.153	229.870	97,50	96,81	16	956.329	66,25	66,13		
0108	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	optimalisasi penyebaran informasi public	80	persen	243.108	3	121.554	40.518	37.568	93,00	92,72	3,93	159.122,00	65,50	65,45		
0109	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Jaring Komunikasi Sandi	100	persen	148.956	6	74.478	24.826	24.798	100	99,93	8	99.276	66,67	66,65		
0110	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	20	persen	282.672	6	141.336	47.112	47.112	100,00	100,00			66,67	66,67		
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>										95,10	94,89			65,85	65,81		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>										<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>S</b>	<b>S</b>		

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Keterangan
------	--------------------	---	---	--	---	--	--	---	---	------------



			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.																		
2			3			4			5			6			7			12			13			14 = 6 + 12			15 = 14/5*100			16		
1	01		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					1.127.370			1.093.073																					
1	1	5	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	24	egiatan	2.643.390	2	1.321.695	440.565		427.923	98,00	97,66	16	1.749.618	66,33	66,28														
1	1	6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	30	egiatan	629.610	5	314.805	104.935		104.935	100,00	100,00	20	419.740	66,67	66,67														
1	1	7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	36	persen	638.508	8	319.254	106.418		106.383	100,00	99,97	24	425.637	66,67	66,66														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												98,57	98,40			66,43	66,40															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										ST	ST			S	S																	

Kode			Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		eterangan	
2			3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
2	1		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							1.233.278		1.181.159								
2	1	5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Jumlah Investasi yang masuk Ke Kab.Gowa	25	persen	657.222	9	328.611	109.537	109.537	100,00	100,00	12	438.148	66,67	66,67			
2	1	6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan Tehnologi dalam menunjang Iklim Investasi	80	persen	2.402.844	9	1.201.422	400.474	350.474	96,00	95,28	12	1.551.896	66,00	65,88			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,24	99,06			66,54	66,51			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										ST	ST			S	S					



Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
3	1		<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>														
3	1	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda	persentase sarana dan prasarana Olahraga dan pemuda	60	persen	2.263.674	6	1.131.837	377.279	377.104	100,00	99,97			66,67	66,66
3	1	6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	prosentase pemuda yang aktif berperan dalam pembangunan	80	persen	11.765.586	435	5.882.793	1.960.931	1.960.931	100,00	00,00	580	7.843.724	66,67	66,67
3	1	7	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	persentase olahraga yang berprestasi	80	persen	11.957.670	93	5.978.835	1.992.945	1.967.844	100,00	99,58	124	7.946.679	66,67	66,60
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>											86,71	86,57			4,45	4,43	
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>											S	S			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)		Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
7	1		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>														
7	1	6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	60	persen	964.896	12	482.448	160.816	160.752	00,00	99,95	16	643.200	66,67	66,66



7	1	8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	peningkatan sistem Administrasi kearsipan	20	persen	574.788	3	287.394	95.798	95.715	00,00	99,91	4	383.109	66,67	66,65
7	1	9	Program Peningkatan pengelolaan Kearsipan	peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai standar	54	erangkat daerah	255.762	6	127.881	42.627	42.624	00,00	99,99	8	170.505	66,67	66,67
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,54	99,45			66,59	66,57
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	p. (000)	p. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
1	1		<b>DINAS PERIKANAN</b>														
1	1	7	Program Pendataan Statistik Perikanan	Pendataan Statistik Perikanan	00	persen	137.706	3	68.853,00	22.951	22.951	100	100	4	91.804	66,67	66,67
1	1	8	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan	00	persen	728.858	2	864.429	288.143	287.993	100	100	16	1.152.422	67	67
1	1	9	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	peningkatan produktifitas ikan tangkap	80	persen	256.506	9	128.253	42.751	42.751	100	100	12	171.004	66,67	66,67
1	1	0	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	25	persen	67.002	9	33.501,00	11.167	11.167	100	100	4,00	44.668	66,67	66,67





1	1	1	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Pembinaan Usaha	meningkatkan produktifitas pengelolaan perikanan dan usaha perikanan	80	persen	483.378	5	241.689	80.563	80.525	100	100	8	322.214	66,67	66,66	
1	1	2	Program Pemberdayaan Sumberdaya Perairan Umum	Pemberdayaan Sumberdaya Perairan Umum	80	persen	194.160	3	97.080,00	32.360	32.340	100	100	4	129.420	67	66,66	
1	1	3	Program Pemberdayaan Kelompok Perikanan	meningkatkan kelompok perikanan yang berkualitas	58	klp	249.126	5	124.563	41.521	41.521	100	100	8	166.084	66,67	66,67	
1	1	5	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan	75	persen	816.538	3	4.408.269	1.469.423	1.456.726	100	99	4,00	5.864.995	66,67	66,52	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,48	99,37			66,58	66,56	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
2	3	4	5		6	7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16				
2	1	DINAS PARIWISATADAN KEBUDAYAAN					4.046.649		4.004.291									
2	1	5	Program Pengembangan Pemasaran Parawisata	peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun asing	8	persen	.858.608		929.304	1.309.768	1.305.568	100	100	16	5.234.872	,67	66,65	
2	1	6	Program Pengembangan Destinasi Parawisata	persentase peningkatan jumlah destinasi wisata baru	10	persen	.177.590		088.795	1.696.265	1.661.411	99,33	99,28	12	6.750.206	,56	66,55	
2	1	7	Program Pengembangan Kemitraan	persentase peningkatan SDM aparat dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata daerah	60	persen	241.662		120.831	40.277	40.277	100	100	8,00	161.108,00	67	67	



2	1	9	Pogram Pengelolaan Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Pengembangan Nilai Budaya	25 persen	857.338	428.669	476.223	475.223	96,67	99,48	11,99	1.903.892	67	67
2	1	0	Pogram Pengelolaan Kekayaan Budaya	peresentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	50 persen	377.100	188.550	62.850	62.850	100	100	8	251.400	67	67
2	1	1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan Keragaman Budaya	6 kegiatan	88.290	34.145	14.715	14.715	100	100	4,00	58.860	6,67	66,67
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										99,91	99,81			65	66,63
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										ST	ST			S	S

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
3	1		<b>DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>				6.049.339	5.927.291									
3	1	5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan	00 persen	762.788	9881.394	1.293.798	1.279.242	96,67	99,28	12	5.160.636	5,61111	5,5462048		
3	1	6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Hortikultura	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Hortikultura	18 kegiatan	1.070.856	9535.428	178.476	178.008	100	100	12,00	13.436,00	66,67	66,62		
3	1	7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	80 persen	456.642	6228.321	76.107	73.107	7,50	96,24	7,95	301.428	66,25	66,04		
3	1	8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana	60 persen	107.802	953.901	17.967	17.967	100	100			66,67	66,67		



3	1	9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Hortikultura	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Hortikultura	60	persen	300.000	3	150.000	50.000	49.840	100	100	4,00	199.840	66,67	66,61
3	1	0	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	6	kegiatan	178.020	3	89.010	29.670	29.670	100	100	4,00	118.680	66,67	66,67
3	1	1	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Peningkatan Peningkatan Produksi Pertanian	28	persen	.677.246	9	838.623	279.541	269.301	7,00	96,34	3,97	1.107.924	66,17	66,06
3	1	2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani	80	persen	855.642	9	427.821	142.607	142.087	100	100	4,00	569.908	66,67	66,61
3	1	3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pengolahan Lahan dan Air	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pengolahan Lahan dan Air	18	keg	20.593.104	9	0.296.552	3.432.184	3.418.276	100	100	12	3.714.828	66,67	66,64
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>												5,14	94,36			65,86	65,73
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>												ST	ST			s	s

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	p. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
6	1		<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>														
6	1	5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	40	ersen	496.128		248.064	82.688	82.688	100	100	8	330.752	66,67	66,67
6	1	6	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	20	ersen	3.308.034		1.654.017	551.339	543.045	99,5	99,3165	15,98	2.197.062	66,58	66,55
6	1	7	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	10	ersen	437.928		218.964	72.988	72.988	100	100	16	291.952	66,67	66,67



6	1	3	Program Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan	Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan	30	ersen	25.560.750	15	12.780.375	4.260.125	4.180.080	99	99	20	16.960.455	66,57	66,47		
6	1	0	Program Revitalisasi melalui Pengembangan Agribisnis/Agroindustri	Revitalisasi melalui Pengembangan Agribisnis/Agroindustri	42	keg.	2.380.812	21	1.190.406	396.802	395.429	99,86	99,61	27,99	1.585.835	66,64	66,60		
6	1	1	Program Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar	Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar	60	ersen	3.084.054		1.542.027	514.009	508.539	99,56	99,21	35,96	2.050.566	66,59	66,54		
6	1	2	Program Penataan Struktur Industri	Penataan Struktur Industri	50	dustri	362.148		181.074	60.358	60.358	100	100	4	241.432	66,67	66,67		
6	1	3	Program Peningkatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Peningkatan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	60	ersen	264.420		132.210	44.070	44.069	100	99,9977			66,67	66,67		
6	1	4	Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi	Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi	50	ersen	356.166		178.083	59.361	56.025	95	91,9455	7,9	234.108	65,83	65,32		
6	1	5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	18	dustri	193.290		96.645	32.215	32.215	100	100	4	128.860	66,67	66,67		
6	1	6	Program Pengembangan Sentra-Sentra IKM yang Potensial	Pengembangan Sentra-Sentra IKM yang Potensial	68	entra	177.720		88.860	29.620	29.620	100	100	4	118.480	66,67	66,67		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												97,48	97,13				66,25	66,19	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST				S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
3	3	1	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA					6.049.339	5.927.291								



3	3	1	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan	100	persen	7.762.788	9	3.881.394	1.293.798	1.279.242	99,67	99,28	12	5.160.636	66,6111	66,5462048
3	3	1	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Hortikultura	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Hortikultura	18	kegiatan	1.070.856	9	535.428	178.476	178.008	100	100	12	713.436,00	66,67	66,62
3	3	1	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	80	persen	456.642	6	228.321	76.107	73.107	97,5	96,24	7,95	301.428	66,25	66,04
3	3	1	18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana	60	persen	107.802	9	53.901	17.967	17.967	100	100			66,67	66,67
3	3	1	19	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Hortikultura	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Hortikultura	60	persen	300.000	3	150.000	50.000	49.840	100	100	4	199.840	66,67	66,61
3	3	1	20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	6	kegiatan	178.020	3	89.010	29.670	29.670	100	100	4	118.680	66,67	66,67
3	3	1	21	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Peningkatan Peningkatan Produksi Pertanian	28	persen	1.677.246	9	838.623	279.541	269.301	97	96,34	3,97	1.107.924	66,17	66,06



3	3	1	2	2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani	80	persen	855.642	9	427.821	142.607	142.087	100	100	4	569.908	66,67	66,61	
3	3	1	2	3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pengolahan Lahan dan Air	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pengolahan Lahan dan Air	18	keg	20.593.104	9	10.296.552	3.432.184	3.418.276	100	100	12	13.714.828	66,67	66,64	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													95,14	94,36			65,86	65,73		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													ST	ST			s	s		
Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan			
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
3	3	2	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN																	
3	3	2	1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	40	persen	12.880.824	27	6.440.412	2.146.804	2.146.604	100	100	12	8.587.016	66,67	66,65		



3	3	2	24	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Perkebunan	Peningkatan Ketahanan Pangan	25 persen	1.940.124	18	970.062	323.354	323.234	100	100	8	1.293.296	66,7	66,7
3	3	2	25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	12 teknologi	385.380	6	192.690	64.230	64.230	100	100	8	256.920	66,7	66,7
3	3	2	26	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	20 persen	78.432	3	39.216	13.072	13.072	100	100	4	52.288	66,7	66,7
3	3	2	27	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	100 persen	1.018.446	9	509.223	169.741	169.741	100	100	12	678.964	66,67	66,67
3	3	2	28	Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak	Peningkatan Produksi Hasil Ternak	60 persen	1.081.692	12	540.846	180.282	180.282	100	100	16	721.128	66,67	66,67
3	3	2	29	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	25 persen	56.316	3	28.158	9.386	9.386	100	100		67	67	



3	3	2	30	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	80	persen	81.462	3	40.731	13.577	13.577	100	100			66,67	66,67	
3	3	2	31	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	40	persen	5.700.000	3	2.850.000	950.000	947.957	100	99,78			66,67	66,63	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													99,56	99,39			66,59	66,57	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													ST	ST			S	S	

z	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
3	3	1	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA					6.049.339	5.927.291								





3	3	1	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan	100	persen	7.762.788	9	3.881.394	1.293.798	1.279.242	99,67	99,28	12	5.160.636	66,61111	66,5462048	
3	3	1	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Hortikultura	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Hortikultura	18	kegiatan	1.070.856	9	535.428	178.476	178.008	100	100	12	713.436,00	66,67	66,62	
3	3	1	17	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	80	persen	456.642	6	228.321	76.107	73.107	97,5	96,24	7,95	301.428	66,25	66,04	
3	3	1	18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana	Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana	60	persen	107.802	9	53.901	17.967	17.967	100	100			66,67	66,67	



3	3	1	19	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Hortikultura	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Hortikultura	60	persen	300.000	3	150.000	50.000	49.840	100	100	4	199.840	66,67	66,61
3	3	1	20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pasca Panen dan Pembiayaan	6	kegiatan	178.020	3	89.010	29.670	29.670	100	100	4	118.680	66,67	66,67
3	3	1	21	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Peningkatan Peningkatan Produksi Pertanian	28	persen	1.677.246	9	838.623	279.541	269.301	97	96,34	3,97	1.107.924	66,17	66,06
3	3	1	22	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani	80	persen	855.642	9	427.821	142.607	142.087	100	100	4	569.908	66,67	66,61



3	3	1	23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pengolahan Lahan dan Air	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Bidang Pengolahan Lahan dan Air	18	keg	20.593.104	9	10.296.552	3.432.184	3.418.276	100	100	12	13.714.828	66,67	66,64	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													95,14	94,36			65,86	65,73	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													ST	ST			s	s	
Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
3	3	2	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN						4.630.926	4.572.656									
3	3	2	21	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	40	persen	12.880.824	27	6.440.412	2.146.804	2.146.604	100	100	12	8.587.016	66,67	66,65	



3	3	2	24	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Perkebunan	Peningkatan Ketahanan Pangan	25 persen	1.940.124	18	970.062	323.354	323.234	100	100	8	1.293.296	66,7	66,7	
3	3	2	25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	12 tehnologi	385.380	6	192.690	64.230	64.230	100	100	8	256.920	66,7	66,7	
3	3	2	26	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	20 persen	78.432	3	39.216	13.072	13.072	100	100	4	52.288	66,7	66,7	
3	3	2	27	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	100 persen	1.018.446	9	509.223	169.741	169.741	100	100	12	678.964	66,67	66,67	
3	3	2	28	Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak	Peningkatan Produksi Hasil Ternak	60 persen	1.081.692	12	540.846	180.282	180.282	100	100	16	721.128	66,67	66,67	



3	3	2	29	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	25 persen	56.316	3	28.158	9.386	9.386	100	100			67	67	
3	3	2	30	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	80 persen	81.462	3	40.731	13.577	13.577	100	100			66,67	66,67	
3	3	2	31	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	40 persen	5.700.000	3	2.850.000	950.000	947.957	100	99,78			66,67	66,63	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,56	99,39			66,59	66,57	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16



1	3		SEKRETARIAT DAERAH							73.661.352	71.266.666							
1	3	7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100	persen	6.225.000	3	3.112.500	1.037.500	1.037.499	100	100	4	4.149.999	66,67	66,67	
1	3	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intenal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tercapainya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	100	persen	7.423.050	6	3.711.525	1.237.175	877.219	9,50	63,23	7,39	4.588.744	61,58	60,54	
1	3	4	Program Peningkatan Kegiatan Pemerintahan	Peningkatan Kegiatan Pemerintahan	100	persen	1.374.984	9	687.492	229.164	228.521	100	99,76			66,67	66,63	
1	3	6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	24	embaga	1.117.968	12	558.984	186.328	182.539	9,25	99,22	15,97	741.523	66,54	66,54	
1	3	7	Program Pembinaan Keagamaan	Pembinaan Keagamaan	100	persen	287.310	6	143.655	47.885	47.795	100	100	8	191.450	66,67	66,64	
1	3	3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	persen	38.442.546	9	19.221.273	6.407.091	6.001.701	7,33	96,41	11,92	25.222.974	66,22	66,07	
1	3	9	Program Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan	100	persen	501.774	6	250.887	83.629	82.440	9,00	98,51	7,98	333.327	66,50	66,42	
1	3	0	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	100	persen	4.425.018	9	2.212.509	737.503	693.297	5,33	95,99	11,89	2.905.806	66,06	66,00	
1	3	2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100	persen	4.518.684	18	2.259.342	753.114	752.113	9,83	99,64	23,99	3.011.455	66,64	66,61	
1	3	3	Program Peningkatan Ketatalaksanaan	Peningkatan Ketatalaksanaan	100	persen	1.937.100	15	968.550	322.850	322.299	100	99,83	20	1.290.849	66,67	66,64	
1	3	4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	100	persen	276.000	3	138.000	46.000	46.000	100	100	4	184.000	66,67	66,67	
1	3	5	Program Pembinaan Ketenaga Listrikan	Pembinaan Ketenaga Listrikan	100	persen	50.689.574	9	25.344.787	25.114.929	24.925.698	100	99,25	4	00.270.485	66,67	66,54	
1	3	6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100	persen	294.822	6	147.411	49.137	48.871	100	99	8	196.282	66,67	66,58	
1	3	7	Program Perlindungan Konsumen dan Perdagangan	Perlindungan Konsumen dan Perdagangan	100	persen	1.964.994	9	982.497	327.499	326.980	100	100	12	1.309.477	66,67	66,59	

1	3	8	Program Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga	Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga	100 persen	355.140	3	177.570	59.190	59.168	100	100	4,00	236.738	66,67	66,66	
1	3	9	Program Peningkatan Layanan Keprotokoleran	Peningkatan Layanan Keprotokoleran	100 persen	1.263.270	6	631.635	210.545	206.474	100	98	8	838.109	66,67	66,30	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											97,62	96,83			66,27	66,14	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											ST	ST			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	4	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT						26.801.127	25.408.494								
1	4	5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 persen	116.994.108	7	58.497.054	19.499.018	18.892.366	1,56	0,51	35,24	77.389.420	65,26	65,08	
1	4	6	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	Penataan Peraturan perundang-undangan	100 persen	2.681.520	3	1.340.760	446.920	239.940	0,00	3,69	3,60	1.580.700	60	59	
1	4	7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100 persen	2.229.000	3	1.114.500	371.500	371.485	100	100	4	1.485.985	66,67	66,67	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											97,74	8,20			64,96	64,70	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											T	T			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)	Keterangan
------	--------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------	---	---	------------



					(2018) (TAHUN N+1)				Tahun 2018 (TAHUN N)		Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)								
			K	p. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)		Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3		4		5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	5		<b>AN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>						<b>746.470</b>		<b>715.070</b>								
1	5	9	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam Sosial	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam Sosial	100	persen	98.418	6	49.209	16.403	16.403	100	100	8	65.612	66,67	66,67		
1	5	0	Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	100	persen	223.524	6	111.762	37.254	37.254	100	100	8	149.016	66,67	66,67		
1	5	1	Program Peningkatan Koordinasi Penyelamatan Korban Bencana Alam	Pelaksanannya Peningkatan Koordinasi Penyelamatan Korban Bencana Alam	100	persen	426.132	3	213.066	71.022	70.891	100	100	4	283.957	66,67	66,64		
1	5	2	Program Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan	Peningkatnya kesadaran masyarakat akan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	persen	429.540	6	214.770	71.590	58.480	5,00	72,78	7,50	273.250	62,50	62,13		
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>											5,33	74,67			65,89	65,78			
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>											<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>S</b>	<b>S</b>			

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)		Rp. (000)		K	Rp.	K	p. (000)	K	Rp.	
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16





1	6			<b>BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						631.873	626.161								
1	6	8		Program Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Politik dan Ormas	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial Politik dan Ormas	12	embaga	172.890	6	86.445	28.815	27.765	5,00	3,22	7,70	114.210	64,17	63,87	
1	6	9		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	6	egiatan	711.990	3	355.995	118.665	118.665	100	100	4	474.660	66,67	66,67	
1	6	0		Program Pembentukan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	pengurangan angka kriminalitas	20	bersen	49.800	3	24.900	8.300	8.300	100	100	4	33.200	66,67	66,67	
1	6	1		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya Kesamaan Pandangan tentang Solidaritas Sosial	12	egiatan	260.850	6	130.425	43.475	43.475	100	100	8	173.900	66,67	66,67	
1	6	2		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	6	egiatan	198.000	3,00	99.000	33.000	33.000	100	100	4	132.000	66,67	66,67	
1	6	3		Program Pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak Kriminal	persentase peningkatan pemeliharaan kamtibmas	18		318.438	9	159.219	53.073	53.073	100	100	12	212.292	66,67	66,67	
1	6	4		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	persentase pengendalian PEKAT	10	bersen	542.538	3	271.269	30.141	30.066	0,00	0,75	12,00	361.467	66,67	66,63	
1	6	5		Program Pendidikan Politik Masyarakat	persentase peningkatan pemahaman politik masyarakat	10	bersen	334.218	9	167.109	55.703	55.666	100	100	12	222.775	66,67	66,66	
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>												<b>96,57</b>	<b>6,38</b>				<b>6,10</b>	<b>6,06</b>	
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>												<b>ST</b>	<b>ST</b>				<b>S</b>	<b>S</b>	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Keterangan
------	--------------------	---	---	--	---	--	--	---	--	------------



												RPJMD s/d Tahun 2018 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
2	1	INSPEKTORAT DAERAH						1.875.566	1.705.432								
2	1	5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	80	persen	8.454.120	33	1.227.060	1.409.020	1.270.476	5,18	2,81	42	5.497.536	64,20	63,80
2	1	6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengawasan	persentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengawasan	80	persen	602.820	9	301.410	100.470	81.718	0,00	5,66	11,40	383.128	65,33	65,05
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										3,56	2,35			5,93	5,77		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										ST	ST			S	S		

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		eterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
3	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						3.901.976	3.621.450								
3	1	5	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Data&Informasi yang dikembangkan	25	persen	211.362	6	105.681	35.227	35.177	100	100			66,67	66,64
3	1	6	Program Kerjasama Pembangunan	persentase peningkatan Kerjasama dalam Pembangunan	00	persen	3.603.132	3	1.801.566	600.522	600.000	100,00	99,91	4,00	2.401.566	66,67	66,65
3	1	7	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	persentase pengembangan perencanaan Kota menengah dan besar	00	persen	1.969.506	9	984.753	328.251	269.700	90,00	89,47	1,70	1.254.453	65,00	64,91



3	1	8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase perencanaan Pembangunan	00	persen	566.700	45	3.283.350	1.094.450	899.997	90,00	89,00	4,50	4.015.151	65,00	64,83	
3	1	9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	persentase Perencanaan Pembangunan sektor Ekonomi	00	persen	706.092	6	353.046	117.682	117.660	100	100	8,00	470.706	66,67	66,66	
3	1	1	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase pembinaan Efisiensi Pemanfaatan Air dan Penyehatan Lingkungan	00	persen	296.016	9	3.486.006	387.334	372.630	97,00	96,20	3,97	1.534.632	66,17	66,03	
3	1	2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	00	persen	509.052	3	254.526	84.842	77.961	92,00	91,89	3,92	332.487	65,33	65,31	
3	1	3	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	persentase peningkatan mutu Perencanaan Program Bidang Sosial Budaya	00	persen	696.020	9	848.010	282.670	279.962	99,67	99,52	1,99	1.127.972	66,61	66,59	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												97,56	97,31			6,26	6,22	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
4	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					4.627.735	3.812.794										
4	1	5	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik	100	persen	926.738	963.369	2.321.123	1.806.214	82,89	79,66	68,92	8.769.583	63,81	63,28		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												6,46	5,12			62,74	62,52	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												T	T			S	S	



Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
4	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH					4.101.680		3.940.328								
4	2	5	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik	0	ersen	.670.506		335.253	2.111.751	2.017.491	8,89	98,62			6,481	56,437
4	2	6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	persentase peningkatan Penerimaan Daerah	5	ersen	.972.590		486.295	828.765	828.513	100	9,9691	16,00	3.314.808	66,67	66,66
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										7,37	96,75			6,23	56,12		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										ST	ST			S	S		

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
5	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.093.713		2.852.716								
5	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemkab. Gowa	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemkab. Gowa	40	en	1.258.908	12	629.454	209.818	206.652	9,25	8,99	15,97	836.106	66,54	66,50
5	1	6	Program Pendidikan Kedinasan	Pendidikan Kedinasan	6	n	3.885.990	3	1.942.995	647.665	647.627	100,00	9,99	4,00	2.590.622	66,67	66,67



5	1	7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bidang Mutasi	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bidang Mutasi	00	en	5.449.932	9	2.724.966	908.322	680.099	100,67	7,19	11,42	3.405.065	63,44	62,87
5	1	8	Program Pengembangan Data Informasi	Pengembangan Data Informasi	80	en	714.120	6	357.060	119.020	119.001	100	100	8,00	476.061	66,67	66,66
5	1	9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	00	en	372.354	9	186.177	62.059	62.059	100	100	12,00	248.236	66,67	66,67
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												7,73	7,12			56,29	66,19
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
1	4						2.094.285		410.307									
1	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	100	en	10.101.360	100	persen	1.683.560	1.683.559	100	100	200	734.239	66,67	66,67	
1	4	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	207.600	108	103.800	34.600	34.182	99,72	99,52	43,90	137.982	66,62	66,59	
1	4	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	en	217.950	12	108.975	36.325	36.325	100	100	16	145.300	67	66,67	
1	4	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	100	en	45.000	12	22.500	7.500	7.500	100	100	16	30.000	67	66,67	



1	4	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat	100	ersen	1.890.000	6	945.000	315.000	315.000	100	100	8	260.000	67	67
1	4	7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah	100	ersen	103.800	3	51.900	17.300	17.300	100	100	4	69.200	67	67
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,95	99,92			6,66	6,65
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2	3	4	5		6		7	12	13	14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
1	5						1.080.084	1.077.583									
1	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	100	ersen	3.167.532	252	1.583.766	527.922	527.922	100	100	336	2.111.688	66,67	66,67
1	5	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	100	ersen	1.245.072	15	622.536	207.512	205.012	99,20	8,46	19,96	827.548	66,53	66,41
1	5	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	ersen	194.400	12	97.200	32.400	32.400	100	100			67	66,67



1	5	6	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN APARATUR DAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase peningkatan pemberdayaan aparatur dan masy.perdesaan	80	en	1.873.500	18	936.750	312.250	312.250	00,00	100	24,00	1.249.000	66,67	66,67
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,80	99,61			6,63	66,60
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	p. (000)	K	(000)	K	Rp.	K	p. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
1	6		KANTOR KECAMATAN BAJENG				1.010.636	1.002.283									
1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran	100	en	3.208.416	108	.604.208	534.736	528.135	94,44	92,67	142	2.132.343	,74	5,44
1	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	644.100	15	322.050	107.350	105.598	99,40	99,26	19,97	427.648	66,57	66,54
1	6	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	en	162.300	9	81.150	27.050	27.050	100	100	12	108.200	67	6,67
1	6	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	100	ersen	2.049.000	24	.024.500	341.500	341.500	100	100	32	1.366.000	67	67
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												98,46	97,98			66,41	66,33
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S



Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	K	(000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
1	7		KANTOR KECAMATAN BONTONOMPO															
1	7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	100	en	2.493.726	216	1.246.863	415.621	408.661	98,54	97,83	86,95	1.655.524	66,42	66,31	
1	7	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	100	111	165.450	55.150	55.150	100	100	48,00	220.600	66,67	66,67	
1	7	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	en	151.200	9	75.600	25.200	25.200	100	100	12	33.600	67	67	
1	7	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	en	10.800	9	5.400	1.800	735	46,67	40,83	10	6.135	58	57	
1	7	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	100	bersen	1.950.750	21	975.375	325.125	325.125	100	100	28	1.300.500	67	67	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											89,04	87,73			4,84	4,62		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											T	T			S	S		

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran	Target Capaian Kinerja dan Realisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018	Target Capaian Kinerja dan Realisasi	Keterangan
------	--------------------	---	---	--	----------------------------------	--	--------------------------------------	---	--------------------------------------	------------





								Tahun 2018 (TAHUN N)	RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)				Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)						
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.					
2		3		4		5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1	8	KANTOR KECAMATAN BONTOMARANNU						753.050		745.390										
1	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran	100	en	2.261.118	144	1.130.559	376.853	374.172	98,88	98,69	91,46	1.504.731	66,48	66,45			
1	8	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	172.494	36,00	86.247	28.749	28.749	100	100	48	114.996	66,67	66,67			
1	8	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	en	93.000	6	46.500	15.500	15.500	100	100	8	62.000	67	67			
1	8	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	en	47.208	9	23.604	7.868	2.888	42,50	37,84	10	26.492	57	56			
1	8	6	Program Peningkatan Keberdayaan Aparatur dan Masyarakat Pedesaan	Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	100	ersen	1.890.840	36	945.420	315.140	315.140	100	100	48	1.260.560	67	67			
1	8	7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	100	en	53.640	3	26.820	8.940	8.940	100	100	4	35.760	67	67			
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>											90,23	89,42			5,04	4,90				
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>											<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>S</b>	<b>S</b>				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Anggaran Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Anggaran Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Anggaran Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			



2		3		4		5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	
1	9			KANTOR KECAMATAN PARANGLOE						691.466		687.601									
1	9	1		Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	100	en	873.896	83	936.948	312.316	308.451	99,83	99,72	43,99	1.245.399	66,64	66,62			
1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	339.900	3	169.950	56.650	56.650	100	100	4	226.600	66,67	66,67			
1	9	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	en	93.000	6	46.500	15.500	15.500	100	100	8	62.000	66,67	66,67			
1	9	6		Program Peningkatan Keberdayaan Dan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	ersen	842.000	6	921.000	307.000	307.000	100	100	8	1.228.000	67	67			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,96	99,93			6,66	6,65				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2018 (TAHUN N)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan		
			K	Rp. (000)	K	rp. (000)	rp. (000)	rp. (000)	K	Rp.	K	rp. (000)	K	Rp.					
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
1	9		KANTOR KECAMATAN BAJENG BARAT					441.996	438.296										
1	9	1		Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan umum administrasi perkantoran	100	en	287.676	144	143.838	47.946	44.996	98,33	98,01	91,20	188.834	66,39	66,34	
1	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	295.800	72	147.900	49.300	48.550	99,42	99,22	96	196.450	66,57	66,54	
1	9	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	60	en	133.500	9	66.750	22.250	22.250	100	100	12	89.000	66,67	66,67	
1	9	6		Program Peningkatan Keberdayaan dan Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan	100	en	1.935.000	21	967.500	322.500	322.500	100	100	28	1.290.000	66,67	66,67	



TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													99,44	99,31			6,57	6,55	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													ST	ST			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan			
			K	Rp. (000)	K	p. (000)	K	p. (000)	K	p. (000)	K	Rp.	K	p. (000)	K	Rp.				
2	3	4	5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
1	8						443.471		430.527											
1	8	1	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan umum administrasi perkantoran	100	pen	309.924	144	154.962	51.654	43.876	86,03	79,85	85,30	198.838	64,34	63,31			
1	8	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100,00	pen	237.780	36,00	118.890	12,00	39.630	11,70	38.528	97,50	97,22	48	57.418	66,25	66,20	
1	8	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	pen	117.000	9	58.500	19.500	19.500	100	100	12	78.000	67	66,67			
1	8	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	pen	32.250	3,00	16.125	5.375	1.311	30	24,39	3	17.436	55	54			
1	8	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan	100	persen	1.933.650	21	966.825	322.275	322.275	100	100	28	289.100	67	67			
1	8	7	Program Peningkatan Masyarakat Membangun Desa	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat membangun desa	100	persen	30.222	3	15.111	5.037	5.037	100	100	4	20.148	67	67			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													95,59	93,58			4,26	3,93		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													ST	ST			S	S		



Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
1 7	KANTOR KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN						529.350	529.350									
1 7 1	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan umum adminstrasi perkantoran	100	1.040.898	180	520.449	173.483	173.483	100	100	240	693.932	66,67	66,67			
1 7 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100,00	182.802	39	91.401	30.467	30.467	100	100	52	121.868	66,67	66,67			
1 7 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	93.000	6	46.500	15.500	15.500	100	100	8	62.000	66,67	66,67			
1 7 6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terpenuhinya keberdayaan masyarakat pedesaan	100	1.859.400	18	929.700	309.900	309.900	100	100	24	239.600	67	67			
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>										100,00	100,00			6,67	6,67		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>										ST	ST			S	S		

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
1 6	KANTOR KECAMATAN PATTALLASSANG						451.476	450.854									



1	6	1	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan umum adminstrasi perkantoran	100	ersen	365.916	2,00	82.958	60.986	60.986	100	100	96	243.944	6,67	6,67
1	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya prasarana aparatur	100	ersen	303.690	12	51.845	50.615	49.993	99,50	99,28	16	201.838	6,58	6,55
1	6	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	ersen	157.350	9	78.675	26.225	26.225	100	100	12	104.900	67	6,67
1	6	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terpenuhinya keberdayaan masyarakat pedesaan	100	ersen	1.881.900	1,00	40.950	313.650	313.650	100	100	28	254.600	6,67	6,67
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,88	99,82			6,65	6,64
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan		
			K	Rp. (000)	K	p. (000)	p. (000)	. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
1	5						686.413	685.109									
1	5	1	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan umum adminstrasi perkantoran	100	ersen	1.844.070	52	22.035	307.345	307.343	100	100	336	229.378	6,67	6,67
1	5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya prasarana aparatur	100	ersen	233.184	08	16.592	38.864	38.863	100	100	144	155.455	6,67	6,67
1	5	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	ersen	100	9	93.750	31.250	31.250	100	100	12	125.000	67	6,67



1	5	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	ersen	19.944	00	9.972	3.324	2.024	80	60,89	4	11.996	63	0,15	
1	5	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terpenuhinya keberdayaan masyarakat pedesaan	100	ersen	1.833.780	6	16.890	305.630	305.629	100	100	8	222.519	6,67	6,67	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												96,00	92,18			6,00	5,36	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Anggaran Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 (TAHUN N)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	p. (000)		(000)	K	(000)	K	Rp.	K	p. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
1	4		TOR KECAMATAN TOMBOLOPAO				597.857	579.760										
1	4	1	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan umum adminstrasi perkantoran	100	ersen	1.267.668	180	633.834	211.278	200.352	61,67	0,50	217	834.186	60,28	3,42	
1	4	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	ersen	358.074	9	179.037	59.679	52.508	93,33	3,18	12	31.545	65,56	5,53	
1	4	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	ersen	161.400	12	80.700	26.900	26.900	100	100	16	107.600	67	6,67	
1	4	6	Program Peningkatan Keberdayaan Aparatur dan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Keberdayaan Aparatur dan Masyarakat Pedesaan	100	ersen	1.800.000	3	900.000	300.000	300.000	100	100	4	200.000	67	67	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												88,75	3,42			64,79	5,57	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S	



Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Anggaran Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Angkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Angkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
1	3						771.677	771.645										
1	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	100	en	1.726.200	219	863.100	287.700	287.700	100	100	292	.150.800	66,67	66,67	
1	3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	810.258	111	405.129	135.043	135.043	100	100	148	540.172	66,67	66,67	
1	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	en	120.000	9	60.000	20.000	20.000	100	100	12	80.000	67	67	
1	3	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	en	31.932	3	15.966	5.322	5.290	100	99			60	57	
1	3	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	ersen	1.894.200	153	947.100	315.700	315.700	100	100	204	1.262.800	67	67	
1	3	7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah	100	ersen	47.472	3	23.736	7.912	7.912	100	100	4	31.648	67	67	
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>											99,93	99,90			6,66	6,65		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>											ST	ST			S	S		

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Anggaran Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Angkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Angkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			



2		3		4		5		6		7		12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
1	2			KANTOR KECAMATAN TOMPOBULU						849.108		837.593											
1	2	1	1	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan umum administrasi perkantoran	100	en	2.033.190	288	1.016.595	338.865	337.320	97,89	97	81,97	353.915	66,31	66,21					
1	2	2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	775.158	117	387.579	129.193	129.150	99,97	99,96	156	16.729	66,66	66,66					
1	2	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	en	188.700	9	94.350	31.450	21.550	83,33	79,31	12	115.900	64	63,22					
1	2	6	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	en	18.000	6	9.000	3.000	3.000	100	100	8	12.000	6,67	6,67					
1	2	6	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	ersen	2.079.600	24	1.039.800	346.600	346.573	99,99	99,98			67	67					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													96,24	95,31					104	105,88			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													ST	ST					S	S			

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan			
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.						
2	3	4	5		6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16				
1	1		KANTOR KECAMATAN BUNGAYA					741.922	721.637											
1	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	100	en	1.775.928	78	887.964	295.988	295.488	99,98	99,95	104	1.183.452	66,66	66,66		





1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	534.000	18	267.000	89.000	69.215	83,00	82,90	23	836.215	63,83	63,82	
1	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	100	en	133.500	9	66.750	22.250	22.250	100	100	12	89.000	67	67	
1	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaannya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	en	14.580	9	7.290	2.430	2.430	100	100	12	9.720	67	67	
1	1	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	en	1.950.000	21	975.000	325.000	325.000	100	100	28	1.300.000	66,67	66,67	
1	1	7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	Peningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah	100	en	43.524	3	21.762	7.254	7.254	100	100	4	29.016	67	67	
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>												97,16	97,14			6,19	6,19	
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>												ST	ST			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Anggaran Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 (TAHUN N)		Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16		
1 0	KANTOR KECAMATAN TINGGIMONCONG						1.203.413	1.201.120									
1 0 1	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	100	en	4.940.430	108	4.470.215	823.405	822.320	99,97	99,95	43,99	3.292.535	66,66	66,66		
1 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	282.966	9	141.483	47.161	47.153	100,00	99,98	12	188.636	66,67	66,66		
1 0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Peningkatan Disiplin Aparatur	100	en	60.600	9	30.300	10.100	8.900	66,67	66,66	11	39.200	61	61		



1	0	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	en	12.282	9	6.141	2.047	2.047	100	99,98	12	8.188	67	67	
1	0	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	en	1.924.200	21	962.100	320.700	320.700	100	100	28	1.282.800	67	67	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												93,33	93,32			5,55	5,55	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												ST	ST			S	S	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Anggaran Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan			
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
2	3	4	5		6		7	12	13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16			
1	1		KANTOR KECAMATAN MANUJU				422.304	413.064										
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan adminstrasi perkantoran	100	en	214.626	72	07.313	35.771	35.771	100	100	96	143.084	66,67	66,67	
1	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	en	275.448	39	37.724	45.908	44.708	99,17	99,18	52	182.432	66,53	66,36	
1	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	en	120.000	9	60.000	20.000	20.000	100	100	12	80.000	66,67	66,67	
1	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	en	34.500	9	17.250	5.750	5.750	100	100	12	23.000	66,67	66,67	
1	1	6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Untuk lebih memberdayakan masyarakat	100	en	1.889.250	21	44.625	314.875	306.835	99,71	99,62	28	1.251.460	66,62	66,60	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												99,78	99,56			6,63	6,59	



PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

ST

ST

S

S

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun ini (2018) (TAHUN N+1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018 (TAHUN N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Keterangan
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	Rp. (000)	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
2	3	4	5			6		7	12		13		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
1 0	KANTOR KECAMATAN PARIGI						531.163	510.308									
1 0 1	Program Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan umum administrasi perkantoran yang efektif	100	ersen	556.158	108	278.079	92.693	85.466	87,50	85,07	39,50	363.545	64,58	64,18		
1 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah	100	ersen	536.538	9	268.269	89.423	86.281	88,33	88,27	12	54.550	66,39	66,38		
1 0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Disiplin Aparatur	100	ersen	155.700	12	77.850	25.950	24.050	95	90,91	16	101.900	66	65		
1 0 6	Program Peningkatan Keberdayaan Aparatur dan Masyarakat Pedesaan	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Aparatur dan Masyarakat Pedesaan	100	ersen	1.910.100	21	636.700	318.350	309.764	92,8	92,3626	27	946.464	65	63,73		
1 0 7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa	Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Aparatur dan Masyarakat Pedesaan	100	ersen	28.482	3,00	9.494	4.747	4.747	100	100	4	14.241	67	60,00		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										94,73	93,32			5,79	8,89		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										ST	ST			S	S		



## 2.2.2. Realisasi Capaian RPJMD :

Realisasi Capaian RPJMD : A. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021 telah menetapkan 53 (lima puluh tiga) Indikator Kinerja Utama dan dengan didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa, untuk mewujudkan target kinerja sasaran-sasaran strategis di Kabupaten Gowa. Adapun hasil pengukuran atas indikator-indikator kinerja dari setiap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Gowa, diuraikan dalam penjelasan berikut dibawah ini :

**Tabel.2.48**

**Capaian Indikator kinerja Daerah 2016-2018 dan Target Kinerja Daerah Tahun 2020**



TUJUAN	INDIKATOR	Capaian			Target		TARGET KONDISI AKHIR 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif (1)</b>	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7	7.52	7.74*	7.96	8.14	8.32
	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	13	13.03	13.04*	13.8	14.06	14.32
	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	69,90	69.92	69.95*	70.01	70.04	70.07
	Ketersediaan pangan utama (ton)	214,250	250	315	163,886	168,886	173,886
	Rasio rumah layak huni (%)	73.33	72	73	72.32	73.32	73.95



Angka pengangguran terbuka (%)	4.95	3.6	4.8*	3.37	3.22	3.17
Angka kriminalitas (kasus)		1.485	1.359	842	827	812
Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Bencana (menit)		<60	<60	< 60	< 60	< 60

<b>Meningkatkan kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</b>	Indeks Pembangunan Gender	88.95	90.03	90.48	90.59	91.14	91.69
	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus)	205	98	54	190	185	180
	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2.65	1.7	1.77	2.03	1.96	1.9
	Angka Kelahiran Total/TFR (%)	2.57	2.47	2.47	2.47	2.43	2.4
	Tingkat kemiskinan (%)	5.42	7.96	8.42*	7.25	7.1	6.95
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	5.99	5.9	5.39	5.06	4.98	4.91
	Organisasi kepemudaan yang aktif (%)	37	48.9	49.42	49.64	49.9	50.16



	Cabang olah raga yang berprestasi (%)	27	28.34	31.01	32.33	33.67	35
<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan religius (3)</b>	Cakupan keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan (%)	38.46	48	58	61.54	69.23	76.92
	Rasio tempat ibadah terhadap penduduk (%)	1 : 468	1 : 440	0.20208	0.293055556	0.288888889	1 : 345

<b>Mengembangkan potensi sumber daya alam lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan (4)</b>	Produksi padi (ton)	401979	408.099	412.964	401,599	405,616	409,672
	Produksi jagung (ton)	275.461	304.621	337.174	401,599	405,616	255,632
	Produksi kakao (ton)	1.457	1.350.20	1.485	250,595	253,101	2
	Produksi kopi (ton)	2.108	2.029.69	2.572	1,700	1,850	2,8
	Populasi sapi potong (ekor)	107.13	109.577	111.925	2,500	2,650	119,287
	Produksi ikan (ton)	693,20	727.2	781.5	805	851	900



	Tingkat pencemaran lingkungan (baku mutu)	≤ baku mutu	≤ Baku Mutu	≤ Baku Mutu	≤ baku mutu	≤ baku mutu	≤ baku mutu
	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100	100
	Persentase penanganan sampah (%)	94.3	94.7	60.45	57.48	59.66	61.5
<b>Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (5)</b>	Pertumbuhan koperasi (%)	3.5	3.82	4.22	4.38	4.59	4.77
	Pertumbuhan UMKM (%)	2.73	2.74	3.85	2.77	2.78	2.8
	Paritas daya beli (Rp)	857800	871.7	900.9	882.44	888.6	894760
	Kunjungan wisata (orang)	180.988	234.706	212.773	120473	127092	133,711
	Nilai investasi (Rp)	454.183.423.500	1.444.148.216.605	1.960.011.45	692305.03	796496.94	916.369.730.000
	Laju inflasi (%)	4.11	1.09	3.38	4	4	4





<b>Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar (6)</b>	Tingkat kemantapan jalan (%)	89.92	71.89	81.82	70.64	76.4	82.45
	Angka kecelakaan lalu lintas (kasus)	477	337	299	189	169	149
	Persentase luas areal irigasi (%)	82.15	108	87.72	86.5	90.16	93.41
<b>Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang (7)</b>	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah (%)	31	27.09	35.02	27.1	27.11	27.12
	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	70.75	65.07	71.79	77.76	79.42	80.91
<b>Meningkatkan kualitas kawasan permukiman (8)</b>	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	73.3	75.46	76.46	71.85	72.93	73.8
	Kawasan kumuh (ha)	230	223.5	218.5	214	209	204
	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	52.07	60.2	70	70.2	75.2	80.2
<b>Meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan (9)</b>	Persentase desa/ kelurahan berstatus cepat berkembang (%)	10.18	12.57	23.95	17.96	20.96	23.95
<b>Meningkatkan kerjasama dan keintegrasian pengembangan wilayah (10)</b>	Persentase kawasan yang dikelola (%)	100	15.38	23.07	30.77	38.46	46.15



<b>Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan akuntabilitas kinerja birokrasi (11)</b>	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	90	100	100	100
	Penjabaran program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100	0	0	100
	Proporsi PNS dengan Standar Kompetensi Pegawai (SKP) pada kategori baik (%)	53.35	99.9	99.73	100	100	100
	Nilai Satuan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	B	0	CC	B	B
	Kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik (12)</b>	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori baik (%)	33.33	46.94	62	60	70	80
	Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi (%)	54.16	54.16	68	70.59	76.47	82.35
<b>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis (13)</b>	Pertumbuhan kerugian negara/daerah (%)	9.68	9,71	0.48	8.13	7.52	6.99
	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu (%)		-	76.18	78	72	72

Keterangan : 76.18 Kinerja dibawah Target yang ditetapkan



## 2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan RPJMD Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan, tantangan pembangunan daerah tercermin dari isu dan permasalahan strategis yang dihadapi sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1) Belum Optimalnya Kualitas Hidup Masyarakat Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa dalam 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun masih tetap berada pada kelompok menengah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun angka kemiskinan dan pengangguran terus menunjukkan penurunan, namun permasalahan kemiskinan dan pengangguran bukanlah permasalahan statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas sumber daya manusia harus lebih dimaksimalkan lagi. Persoalan akses dan mutu pelayanan dasar juga perlu terus ditingkatkan. Program-program pro rakyat, pro growth, pro jobs, pro poor, dan pro environment harus terus dikembangkan secara lebih adil dan proporsional.
- 2) Belum optimalnya perekonomian daerah dan masyarakat. Berbagai indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi makro dan sektoral, peningkatan PDRB, pendapatan per kapita, dan jumlah tabungan masyarakat, serta maraknya berbagai investasi menandakan adanya kondisi ekonomi yang terus membaik. Meskipun indikator makro ekonomi menunjukkan kemajuan yang berarti, namun belum menjamin adanya distribusi pendapatan yang proporsional. Sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok berpendapatan rendah dan menengah, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi masih dinikmati sebagian kecil penduduk. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan bergeraknya sektor riil terutama sektor yang menyerap



banyak tenaga kerja, seperti di sektor pertanian dan UMKM. Permasalahan lainnya adalah sulitnya memprediksi perkembangan variabel makro ekonomi seperti suku bunga global, harga minyak, nilai mata uang rupiah, harga BBM, dan inflasi. Variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga barang dan jasa yang berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh karenanya, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal harus lebih ditingkatkan.

- 3) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Gowa masih terbatas. Meskipun anggaran untuk pembangunan infrastruktur selalu menyerap porsi anggaran yang besar dalam APBD, namun karena luasnya wilayah Kabupaten Gowa, maka kebutuhan terhadap infrastruktur selalu jauh lebih besar dari pada kemampuan anggaran yang ada. Belum lagi infrastruktur yang harus diperbaiki karena sudah rusak juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Infrastruktur yang ada juga belum merata pada semua wilayah kecamatan. Masih terdapat kesenjangan infrastruktur pada daerah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, dukungan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, adil, proporsional, dan berkualitas tetap harus dimaksimalkan agar ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Gowa bergerak sehingga investasi dan daya saing pun kian meningkat.
- 4) Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, terutama pada pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan perizinan dan investasi agar bisa memberikan pelayanan prima yang lebih cepat, mudah, murah, dan transparan. Kapasitas birokrasi juga masih perlu dimaksimalkan. Masih terdapat organisasi perangkat daerah yang belum optimal kinerjanya karena masih terkendala soal kelembagaan dan ketatalaksanaan. Penggunaan teknologi informasi, sistem informasi dan manajemen serta e-government juga belum diterapkan secara terintegrasi dan komprehensif. Selain itu, upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas



KKN masih perlu diperhatikan. Organisasi perangkat daerah masih perlu didorong dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat, efektif, produktif, bersih, transparan dan akuntabel. Sedangkan PNS perlu didorong untuk lebih taat asas, tertib administrasi, disiplin, pegang teguh etika organisasi dan profesi, serta lebih inovatif dan menjaga integritas diri selaku aparat sipil negara

- 5) Belum optimalnya pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan. Pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan belum optimal. Kinerja Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Rentang kendali pelayanan publik perlu diperpendek dengan memberdayakan peran kecamatan. Jenis pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien dikelola oleh kecamatan seyogyanya diserahkan kepada kecamatan. Penyerahan tersebut tentu disertai dengan dukungan regulasi, sarana prasarana, sumber daya manusia, kelembagaan, sistem, dan penganggaran. Dengan demikian jangkauan pelayanan akan lebih dekat dengan masyarakat yang tersebar di 18 kecamatan. Penguatan desa dan kelurahan juga perlu mendapat perhatian. Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa akan mengelola dana yang cukup besar, maka kesiapan desa perlu difasilitasi dan didorong untuk mewujudkan desa yang mandiri. Sejauh mana dana tersebut efektif berdampak pada perbaikan kinerja sektor pertanian yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta bagaimana meminimalkan penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana tersebut akibat keterbatasan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas sumber daya manusia khususnya di perdesaan. Sedangkan kelurahan sebagai perangkat di bawah kecamatan juga perlu didorong agar dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di kelurahan

### **2.3.2. Permasalahan Yang Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan.**

#### **2.3.2.1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar**



## 1. Pendidikan

- a) Masih rendahnya tingkat literasi penduduk usia 15 – 59 tahun yang disebabkan oleh kurangnya akses khususnya daerah-daerah yang terpencil. berdasarkan data hasil susenas yang dirilis oleh BPS Kab.Gowa tahun 2018 persentase penduduk 15 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis sebesar 88,04 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 89,82 persen, seperti tahun-tahun sebelumnya persentase penduduk laki-laki 15 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis masih lebih tinggi dibandingkan perempuan.
- b) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. meski Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Gowa meningkat dimana APS KAbupaten Gowa untuk kelompok umur 16 -18 tahun pada tahun 2018 mencapai 71,48 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 64,44 tapi masih harus terus dioptimalkan.
- c) Masih rendahnya penduduk usia sekolah mendapatkan pendidikan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kab.Gowa masih terdapat 5,25 persen penduduk yang tidak pernah sekolah.
- d) Masih terbatasnya sarana dan prasarana sekolah. Jumlah sekolah di Kabupaten Gowa Pada tahun 2018 sebanyak 283 unit taman kanak-kanak (TK), 415 unit sekolah Dasar, 111 unit sekolah menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan 47 unit Sekolah Menengah Tingkat Akhir (SMTA).
- e) Masih kurangnya tenaga pendidik. adapun 1 orang guru rata-rata mengajar sebanyak 14 murid untuk TK, 17 murid untuk SD, 16 murid untuk SMP dan 17 murid untuk SMTA. UNESCO menetapkan rasio untuk negara asia 26:1 dan 24:1 untuk negara yang berpenghasilan menengah.



- f) Masih tingginya Angka Putus Sekolah. BPS Kabupaten Gowa mencatat 27,86 persen penduduk usia antara 7 – 24 tahun pada tahun 2018 tidak bersekolah lagi. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan;
- g) Belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu;
- h) Belum meratanya penempatan guru yang sesuai standar dan kualifikasi yang dibutuhkan utamanya di daerah-daerah dataran tinggi;
- i) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan PAUD.

## 2. Kesehatan

- 1). Tingginya angka kematian ibu. Kematian ibu merupakan isu nasional dan menjadi target dalam SDGs. Kabupaten Gowa sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Oktober pada tahun 2018 tercatat ada 13 kasus kematian ibu saat melahirkan jumlah ini dikategorikan tinggi dan sekaligus mencatatkan Kabupaten Gowa sebagai kabupaten dengan jumlah kematian ibu tertinggi se Sulawesi Selatan.
- 2). Pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat penularan penyakit seperti TB dan HIV AIDS meningkat. Sedangkan rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menyebabkan tingginya kasus DBD dan Diare. Untuk menggambarkan jumlah kasus penyakit menular data RSUD. Syekh Yusuf Kab. Gowa yang menghitung berdasarkan jumlah kunjungan pasien pada tahun 2017 untuk kasus HIV terdapat 191 kunjungan pasien yang mengidap penyakit ini, sedangkan untuk kasus penyakit TB jumlah kunjungan mencapai 1437 kunjungan pasien rawat jalan dan 302 kunjungan pasien rawat inap. Sedangkan untuk penyakit tidak menular berdasarkan rilis data BPS kasus DBD pada tahun 2017 terjadi 147 kasus dan 20.234 kasus diare.
- 3) Angka kematian Ibu bersalin dan angka kematian bayi di Kabupaten Gowa juga masih tergolong tinggi dan masih membutuhkan perhatian



khusus oleh pemerintah daerah. Untuk tahun 2018 saja, AKB terjadi 42 dan AKI terjadi 6 kasus;

- 4) Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No 440.2.1/03175/DINKES, tertanggal 5 April 2019 Tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Kabupaten Lokasi Khusus (Lokus) Dalam Percepatan Penanggulangan Masalah Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan 2019. Angka stunting balita Indonesia yang setiap tahun cenderung mengalami peningkatan, hingga mencapai 27,5% pada tahun 2017. Stunting itu sendiri adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Angka kurang gizi balita Indonesia ditargetkan turun 22% hingga 25% pada 2019.
- 5) Jumlah fasilitas kesehatan pada tahun 2018 untuk melayani 760.607 jiwa penduduk Kabupaten Gowa, antara lain Rumah sakit 2 unit, puskesmas sebanyak 26 unit, poskesdes sebanyak 40 unit dan posyandu maternal sebanyak 775 unit.
- 6) Masih kurangnya tenaga kesehatan di Kabupaten Gowa untuk melayani seluruh penduduk di 18 Kecamatan pada tahun 2018 tenaga kesehatan masyarakat hanya berjumlah 54 orang, tenaga keperawatan sebanyak 229 orang, tenaga kebidanan berjumlah 204 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 50 orang dan tenaga Gizi berjumlah 32 orang saja, jumlah ini masih dirasakan sangat minim jika dibandingkan jumlah penduduk.
- 6) Masih kekurangan jumlah tenaga dokter yang menurut WHO idealnya rasio dokter disetiap daerah adalah 40 dokter melayani 100 ribu orang penduduk, sedangkan di Kabupaten Gowa jumlah Dokter hanya 101 orang saja yang jika dirasiokan berarti 1 dokter melayani 7.408 orang penduduk. Ini tentu saja masih jauh dari jumlah ideal yang seharusnya 1 dokter melayani 2500 orang penduduk, belum lagi distribusi yang tidak merata disemua wilayah Kabupaten Gowa.





- 7) Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pada tahun 2018 cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat baru 77,1 persen.

### **3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

- 1) Tingginya laju kerusakan jalan dibandingkan penanganan jalan. Kerusakan jalan yang terjadi baik akibat umur pakai yang sudah lama, penggunaan diluar kapasitasnya maupun karena cuaca dan bencana alam seperti curah hujan yang tinggi dan banjir lajunya cukup tinggi sementara penanganan yang dilakukan baik dalam peningkatan, pemeliharaan berkala maupun rutin masih sangat terbatas. Untuk tahun 2018 dari 2.761,17 Km panjang jalan di Kabupaten Gowa, yang berjenis permukaan aspal sepanjang 1.702,94 km dan jenis permukaan lainnya adalah sepanjang 1.058,23 km. Untuk kondisi jalan ada 1.452,11 km baik, 154,34 km kondisi sedang, untuk yang kondisi rusak sepanjang 634,98 km sedangkan 519,74 km kondisinya rusak berat.
- 2) Adanya beberapa ruas jalan kabupaten di Kota Sungguminasa tidak memenuhi SPM pada aspek kecepatan yang disebabkan oleh kemacetan/kelebihan LHR pada ruas jalan dimaksud. Faktor yang sangat mempengaruhi adalah tingkat kepadatan Kota Sungguminasa setiap tahun meningkat dikarenakan faktor Gowa sebagai penyangga Kota Makassar dan pertumbuhan perumahan yang meningkat;
- 3) Belum optimalnya implementasi masterplan drainase untuk penuntasan pengendalian banjir khususnya di Kota Sungguminasa yang disebabkan adanya ketimpangan proporsi panjang drainase dan panjang jalan. Hal ini terlihat dari drainase Kota Sungguminasa yang terdata baru 372,40 km, jika dibandingkan dengan panjang jalan Kota Sungguminasa yaitu 325 km, berarti panjang drainase yang ideal minimal 2 kali panjang jalan atau 650 km. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah faktor rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase di Kabupaten Gowa karena banyak saluran



drainase (36%) yang rusak /tersumbat mengakibatkan terjadinya genangan di beberapa ruas jalan dan beberapa perumahan saat musim hujan;

- 4) Belum semua rumah tangga terlayani air bersih/air minum, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa dari total jumlah rumah tangga untuk tahun 2017 sebanyak 171.372 rt masih ada 9.901 RT atau 5,8% yang belum terlayani Air bersih/minum. Cakupan pelayanan air minum target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2019 mencapai 100%;
- 5) Masih terdapat rumah tangga yang belum berakses sanitasi dengan baik, berdasarkan data yang ada masih terdapat sekitar 3,94 persen dari total rumah tangga atau berjumlah 19.177 RT;
- 6) Belum terpenuhinya target RTH Publik. Target RTH publik seperti yang tertuang pada Perda No. 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Gowa 2016 – 2021 rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah untuk tahun 2019 adalah 27,09 %, sedangkan sampai dengan tahun 2017 yang baru terealisasi adalah 17,02 persen;
- 7) Keberadaan fasilitas pejalan kaki (pedestrian) khususnya di Kota Sungguminasa yang dikategorikan sebagai kota sedang masih dirasa sangat minim. Selain karena kurangnya trotoar permasalahannya juga adalah sebagian besar prasarana pejalan kaki terhadap pengembangan titik-titik transfer moda transportasi belum terkoneksi dengan baik, serta upaya pemerintah daerah untuk menyediakan jalur pejalan kaki masih terbatas. Berdasarkan pemantauan diperkirakan untuk Kota Sungguminasa jalur pedestrian baru terealisasi sekitar 1,5 %.

#### **4. Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

- 1) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani. persebaran kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Gowa No.175/II/2015 tentang penetapan kawasan kumuh maka terdapat 21 kawasan



dengan total luas adalah 231,03 Ha yang tersebar di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pallangga. Untuk kawasan yang luasan kawasan kumuhnya jika Mengacu pada SK Kumuh tersebut Luasan perkawasannya antara 10 - 15 Ha dari 102,63 Ha yang dinyatakan kumuh baru tertangani adalah 76,29 persen, sedangkan untuk yang luasan perkawasannya mencapai lebih dari 15 Ha luasnya mencapai 128,40 Ha hingga tahun 2018 baru tertangani sebesar 62,84 persen.

- 2) Masih terdapatnya rumah tidak layak huni di Kabupaten Gowa khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang sampai dengan tahun 2018 mencapai 9.335 unit;
- 3) Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian perumahan, sehingga masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB.

#### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

- 1) Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah lainnya masih rendah karena kurangnya sosialisasi peraturan yang sudah diterapkan;
- 2) Relatif rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap rambu-rambu peraturan yang sudah ditetapkan;
- 3) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap ketentraman umum di lingkungannya;
- 4) Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, kapasitas pelayanan terhadap masyarakat jika dibandingkan baik ditinjau kualitas maupun kuantitas pada saat ini yang masih dirasakan kurang memadai;



- 5) Belum optimalnya peran serta Ormas atau LSM dalam peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat.

## **6. Sosial.**

- 1) Belum optimalnya pembinaan terhadap sarana-sarana sosial
- 2) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan PMKS sehingga masih banyak yang belum tertangani. Berdasarkan Data yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa PMKS sebanyak 82.100 yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar baru sebanyak 38.899 orang. Besaran orang yang dibantu baru 47,38 persen;
- 3) Belum tersedianya sarana rehabilitasi sosial

### **2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

## **7. Tenaga Kerja**

- 1) Masih relatif tingginya angka pengangguran, dari 350.748 orang jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 atau sekitar 67,63 persen dari jumlah penduduk 15 tahun keatas sekitar 95,19 persen atau 350.748 orang yang berstatus bekerja, sementara untuk 17.718 orang atau sekitar 4,81 persen tidak bekerja alias menganggur.
- 2) Masih tingginya pencari kerja yang belum mampu ditempatkan, dimana TPAK/persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2018 baru mencapai 57,11 persen;
- 3) Pekerja rentan (non-formal) di Kabupaten Gowa masih menjadi persentase tertinggi. Persentase pekerja yang bekerja pada sektor non formal mencapai 63,55 persen;

## **8. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

- 1) Masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data 2018 capaian IPG Kabupaten Gowa yaitu sebesar 90,48 dari kondisi ideal 100, sementara itu apabila dibandingkan dengan IPG



Provinsi Sulawesi Selatan angka tersebut lebih rendah. Angka IPG provinsi 92,92;

- 2) Masih tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, untuk tahun 2018 berdasarkan data yang ada terjadi 54 kasus.

## 9. Pangan

- 1) Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang. Hal ini ditandai dengan skor PPH pada tahun 2017 sebesar 83,90 angka ini belum ideal karena terdapat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap konsumsi beras dan terigu;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan melalui system CPPD (cadangan pangan pemerintah daerah) dan CPM (cadangan pangan masyarakat), ini ditandai dengan ketersediaan pangan utama yang tercatat diangka 315 ton pada tahun 2018;
- 3) Meningkatnya ancaman penggunaan bahan kimia dan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk pangan, sehingga memerlukan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

## 10. Pertanian

- 1) Masih terdapatnya tanah-tanah yang merupakan asset milik Pemerintah Daerah dengan tidak didukung oleh bukti-bukti kepemilikan yang sah secara hukum sehingga di khawatirkan akan terjadi pemanfaatan atau pengalihan hak atas asset tersebut tanpa sepengetahuan serta persetujuan dari pemerintah daerah;

## 11. Lingkungan hidup

- 1) Masih dibutuhkannya optimalisasi dalam hal penanganan sampah seiring dengan meningkat dengan cepatnya pertumbuhan penduduk diwilayah Kabupaten Gowa khususnya wilayah perkotaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup



Kabupaten Gowa dengan daya tampung TPS/tahunnya adalah 189 m<sup>3</sup> sedangkan produksi sampah yang mencapai 181.752 m<sup>3</sup>/ tahun yang terantangi pada tahun 2018 adalah sebanyak 174.080 m<sup>3</sup> atau 95,78 persen.

- 2) Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL: hal ini ditandai dengan masih banyaknya perusahaan yang belum menyusun dan melaksanakan RKL/RPL maupun UKL/UPL;
- 3) Masih terbatasnya tempat pembuangan akhir (TPA), sampai tahun 2018 jumlahnya hanya 1 unit;
- 4) Masih banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;

## **12. Kependudukan dan catatan sipil**

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang wajib KTP pada tahun 2018 adalah sebanyak 539.912 orang yang memiliki KTP mencapai 467.421 orang atau 86,57 persen, masih ada sekitar 13,43 persen atau 72.491 orang yang wajib KTP tapi belum memiliki;
- 2) Masih adanya penduduk yang berusia 0 -18 Tahun yang belum memiliki Akta lahir, dari 245.419 orang penduduk usia tersebut pada tahun 2018 yang memiliki Akta adalah 226.396 atau 92,25 persen, ini berarti masih ada sekitar 7,75 persen penduduk belum memiliki akta lahir;
- 3) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan diakibatkan oleh keterbatasan tempat pelayanan dan jumlah SDM pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan.

## **13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**



- 1) Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan PKK dan Posyandu. Jumlah PKK aktif sampai dengan tahun 2018 adalah 185, sedangkan Posyandu maternal yang aktif berjumlah 775 unit;
- 3) Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 1,9 % pada tahun 2018;
- 4) Belum optimalnya kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dan pengelolaan Dana Desa.

#### **14. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.**

- 1) Masih kurangnya jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD). Untuk melayani 121.399 pasangan usia subur (PUS) baru terdapat 31 KKB dan 167 PPKBD yang tersebar di 18 Kecamatan se Kabupaten Gowa;
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana, dilihat dari masih rendahnya jumlah peserta KB aktif. Untuk tahun 2018 baru berjumlah 83.416 peserta KB aktif dari Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 121.399 pasangan yang terdata, jadi masih ada 37.983 pasangan belum menjadi peserta KB aktif;
- 3) Masih tingginya angka cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmetNeed) dan Drop Out (DO), pada tahun 2017 mencapai angka sebesar 6,73%;

#### **15. Perhubungan**

- 1) Ketersediaan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang belum memadai, baik yang melayani penumpang dalam kabupaten maupun yang menghubungkan antar kabupaten;



- 2) Masih tingginya jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Gowa, sepanjang tahun 2018 terjadi 437 kasus kecelakaan dengan total jumlah korban adalah 631 jiwa, baik meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan;
- 3) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan-jalan Kabupaten. Fasilitas perlengkapan jalan termasuk rambu, marka dan guardrail, untuk tahun 2018 saja kebutuhan akan rambu jalan sebanyak 250 buah dan baru terealisasi 39 persen, untuk marka jalan dari 1500 meter<sup>2</sup> kebutuhan yang terealisasi sampai dengan tahun 2017 adalah 420 meter<sup>2</sup> atau baru 28%, sedangkan untuk cermin yang dibutuhkan adalah sebanyak 50 buah yang terealisasi baru sebanyak 17 unit saja atau 34% di tahun.

#### **16. Komunikasi Dan Informatika**

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah daerah maupun perangkat daerah untuk penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat luas, pada tahun 2017 dari 35 perangkat daerah di Kabupaten Gowa yang telah memiliki Website baru 8 perangkat daerah;
- 2) Belum optimalnya system informasi terpadu yang mengarah pada e-government dan penerapan blueprint e-government, tercatat baru 12 perangkat daerah yang telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi dalam melakukan pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- 3) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi;

#### **17. Koperasi dan UKM**

- 1) Masih belum optimalnya pembinaan terhadap lembaga koperasi untuk menghasilkan lembaga koperasi yang berkualitas. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gowa





Pada tahun 2017 terdapat 484 Koperasi yang aktif, namun hanya 280 yang berkualitas dan dikelola dengan baik;

- 2) Masih rendahnya peluang UMKM untuk meningkatkan skala usaha melalui peningkatan asset dan omzet;
- 3) Belum optimalnya langkah pemerintah daerah dalam pembinaan UMKM sehingga untuk Kabupaten Gowa baru 26 UMKM yang menjadi unggulan di tahun 2018;
- 4) Rendahnya partisipasi UMKM untuk melakukan promosi produk-produknya;
- 5) Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif.

#### **18. Penanaman Modal Daerah**

- 1) Kurangnya sarana promosi untuk potensi-potensi yang ada di Kabupaten Gowa kepada calon investor;
- 2) Belum adanya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di daerah, hal ini menghambat bagi pelaku usaha atau investor khususnya Investor asing dalam mendapatkan informasi dan legalisasi untuk memulai investasi di daerah;
- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan proses pengurusan perizinan investasi yang keseluruhan prosesnya telah memanfaatkan teknologi informasi;
- 4) Belum optimalnya peningkatan jumlah pelaku dan nilai investasi. Hal ini diindikasikan oleh jumlah perusahaan yang berinvestasi berskala Luar negeri dan nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2018 sebanyak 865 perusahaan yang telah melakukan investasi dengan nilai investasi Rp.1.960.011.456.993,-



## 19. Kepemudaan Dan Olahraga

- 1) Pembinaan atlet olahraga berprestasi yang belum optimal;
- 2) Belum optimalnya kegiatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan dan kegiatan kepemudaan yang ada;
- 3) Kurangnya penyelenggaraan event olahraga;
- 4) Belum tercukupinya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga.

## 20. Statistik

- 1) Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah;
- 2) Rilis data dan informasi dari BPS Kabupaten untuk kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang selalu terlambat;
- 3) Belum tersedianya data base yang berisi data dan informasi yang valid dan up to date;

## 21. Persandian

- 1) Pengelolaan persandian yang belum optimal karne belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

## 22. Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Gowa sebagai tindaklanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dapat digambarkan dengan masih minimnya benda cagar budaya yang telah disertifikasi, dari 93 benda cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah baru 3 yang telah disertifikasi;



- 2) Masih rendahnya pembinaan sanggar kesenian dimana berdasarkan data yang ada berjumlah 130 sanggar dan belum sepenuhnya dilakukan pembinaan akibat kurang alokasi anggaran untuk ini;
- 3) Belum tersedianya gedung kesenian/sarana dan prasarana yang representative untuk menampung aktifitas seni;
- 4) Masih sedikitnya jumlah dan kualitas kegiatan penyelenggaraan seni tradisi dan budaya.

### **23. Perpustakaan**

- 1) Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan daerah. Tahun 2018 hanya sebanyak 247.818 Orang;
- 2) Masih sedikitnya jumlah perpustakaan ditingkat kecamatan dimana hanya terdapat 2 unit dari 18 kecamatan di Kabupaten Gowa dan jumlah perpustakaan keliling hanya 1 unit yang melayani seluruh wilayah kabupaten;
- 3) Masih terbatasnya jumlah pustakawan yang tersertifikasi.

### **24. Kearsipan**

- 1) Belum adanya SDM pengelola kearsipan (arsiparis);
- 2) Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan arsip daerah; hal ini terlihat dari belum tersedianya gedung penyimpanan arsip;
- 3) Belum dilaksanakan duplikasi arsip-arsip daerah ke dalam bentuk digital;
- 4) Pengelolaan arsip secara baku belum dilaksanakan di daerah.

#### *2.3.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan*

### **25. Kelautan Dan Perikanan**

1. Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan, baik kelompok nelayan tangkap, kelompok budidaya, maupun kelompok pengolah ikan;



2. Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan, baik itu kelompok nelayan tangkap, kelompok pembudidaya, maupun kelompok pengolah ikan, hal ini ditunjukkan bahwa cakupan pembinaan kelompok baru mencapai 32% pada tahun 2017;
3. Rendahnya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2017 produksi perikanan budidaya baru mencapai 7.477 ton;
4. Masih rendahnya konsumsi ikan per kapita penduduk Kabupaten Gowa. Konsumsi ikan perkapita per tahun sebesar 24 kg/th, masih di bawah angka target nasional 35 kg/kapita / tahun;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan;
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana TPI.

## **26. Pertanian.**

- 1) Kualitas produk pertanian belum optimal dan pembangunan jaringan pemasaran masih terbatas;
- 2) Belum optimalnya produktivitas pangan utama padi, yaitu antara 4,61 ton/ha - 6,10 ton/ha;
- 3) Minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian dan perkebunan semakin menurun;
- 4) Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan;
- 5) Belum terbangunnya kawasan agro industri dan agro politan;
- 6) Terbatasnya jumlah dan kemampuan penyuluh dan kelompok tani mengenai teknik penyuluhan dan budidaya pertanian/ pengembangan agribisnis pertanian;
- 7) Masih tingginya biaya produksi dalam usaha peternakan;
- 8) Masih rendahnya penerapan teknologi pertanian.



## 27. Perdagangan.

- 1) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional sesuai standar;
- 2) Belum tersedianya pusat perdagangan bagi agrobisnis dan hasil peternakan;
- 3) Masih lemahnya perlindungan konsumen di Kabupaten Gowa;
- 4) Belum optimalnya ekspor komoditas dari Kabupaten Gowa. Nilai eksport pada tahun 2017 sebesar US\$ 18.983.364,60;
- 5) Belum optimalnya dukungan Pemerintah daerah terhadap usaha UMKM dalam menghadapi MEA dan CAFTA.

## 28. Perindustrian.

- 1) Belum optimalnya Pembinaan dan faslitasi Pengembangan Industri kecil dan Menengah; Pada tahun 2017 cakupan IKM yang dibina sebesar 1,1%;
- 2) Lemahnya akses modal bagi industri kecil;
- 3) Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi Perijinan menurun, dari 40 IKM tahun 2016 menjadi 25 IKM Pada tahun 2017;
- 4) Belum adanya kawasan industri yang dikelola secara modern.

### 2.3.2.4 Fungsi penunjang Urusan

## 29. Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Belum optimalnya ketersediaan Perencanaan Pembangunan sektoral yang memadai;
- 2) Belum optimalnya Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan;
- 3) Masih rendahnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah



dengan penganggarnya.

### **30. Sekretariat Daerah.**

- 1) Penataan Peraturan Perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata Peraturan Perundangan yang baru, dengan jumlah Perda yang ditetapkan dari tahun 2012 – 2017 sebanyak 40 Perda;
- 2) Belum semua unit-unit Pelayanan PD memiliki Pedoman standar Pelayanan Publik (SPP) dan melaksanakan evaluasi Pelayanan Publik (Pengukuran IKM) secara berkala;
- 3) Belum semua unit aktifitas PD telah menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pembangunan daerah;
- 5) Belum optimalnya evaluasi atas efektifitas Pelaksanaan produk hukum daerah (Perda dan Perkada);
- 6) Belum adanya roadmap reformasi birokrasi;

### **32. Sekretariat DPRD**

- 1) Belum optimalnya kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.

### **33. Keuangan Daerah.**

- 1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan sistem informasi manajemen (SIM) yang bersifat terpadu;
- 2) Belum optimalnya intensifikasi pajak daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi retribusi daerah.
- 3) Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset dan barang milik daerah.

### **34. Kepegawaian**



- 1) Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Belum optimalnya manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara).

### **35. Inspektorat Daerah**

- 1) Meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan pengawasan sehingga memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan obyek pemeriksaan (PD);
- 2) Masih kurangnya kapasitas SDM pemeriksa sehingga tingkat kelulusan dalam diklat penjenjangan belum optimal;
- 3) Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah).
- 4) Belum optimalnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing masing PD.



### BAB III

## RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah secara umum mencerminkan kondisi dinamis perekonomian daerah sekaligus merupakan gambaran umum perekonomian Kabupaten Gowa tahun 2018. Kondisi tersebut juga menggambarkan prospek perekonomian tahun berjalan 2019 dan proyeksi kondisi perekonomian tahun 2020. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah juga berisikan dinamika ekonomi makro hingga triwulan satu, dan estimasi tahun 2019 maupun sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020, dan sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

### 3.1. *Arah Kebijakan Ekonomi Daerah*

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (dalam wilayah tersebut serta merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi daerah diuraikan menjadi dua point utama yakni Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan Kebijakan Keuangan Daerah. Kondisi perekonomian Kabupaten Gowa tahun 2018 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2019 - 2020 dapat digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Gowa berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun-tahun





sebelumnya. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2020 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

### 3.1.1 Perkembangan Indikator Makro

#### 3.1.1.1. Pendapatan per Kapita

Angka PDRB perkapita Kabupaten Gowa menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten, dimana pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp.15.380.000,- dan Tahun 2018 telah menjadi Rp.16.010.000,- jadi mengalami peningkatan 3,93% atau rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 18,74%.

**Grafik 3.1**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Gowa (Rp Jutaan)**



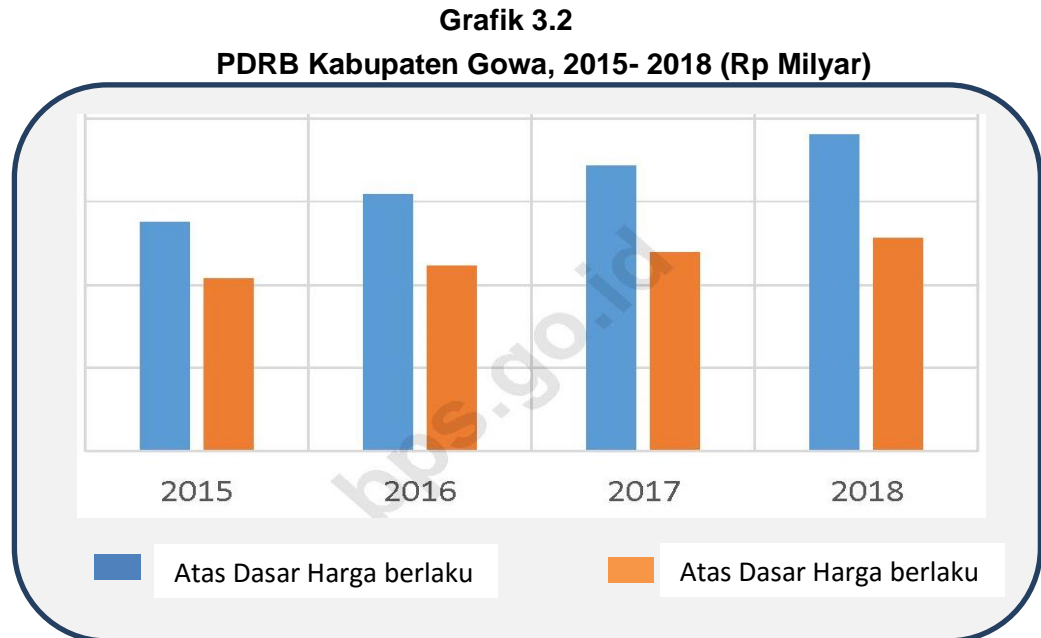
**Sumber** : BPS Kabupaten Gowa Tahun 2019

\*) Tahun 2019 Proyeksi

Apabila estimasi trend angka PDRB per kapita bergerak secara linear, maka terlihat pada Tahun 2018 besarnya mencapai Rp.16,86 juta. Jadi pada tahun 2019 dapat diprediksi angka PDRB perkapita mencapai Rp.14,80 juta.



Grafik berikut ini memperlihatkan perbandingan PDRB menurut harga berlaku dan menurut harga konstan, tahun dasar yang digunakan oleh BPS adalah 2010.



Sumber : BPS Kabupaten Gowa 2019

Berdasarkan data grafik diatas terlihat bahwa PDRB harga berlaku pada Tahun 2018 mencapai Rp 19.063.888,9 sementara PDRB harga konstan mencapai Rp 12.822.678,8 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 6.241.209,2 milyar. Perhitungan nilai hasil PDRB dengan menggunakan harga berlaku berarti di dalamnya masih terdapat pengaruh inflasi, agar dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat, maka perhitungan PRDB menggunakan perhitungan atas dasar harga konstan (ADHK). Pada grafik terlihat bahwa PDRB ADHK pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.9.070.002,2 dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2018 PDRB ADHK telah mencapai Rp.12.822.678,8 berarti rata-rata setiap tahunnya terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 6,63%. Jadi asumsi yang digunakan adalah rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar 6,63% per tahun.

### 3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi



Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa dari Tahun 2015 angka pertumbuhan tercatat 6,79 naik menjadi menjadi 7,21 pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 dan 2018 terus terjadi penurunan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa menunjukkan penurunan masing-masing diangka 7,21 dan 7,11 untuk tahun 2018. Gambaran terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

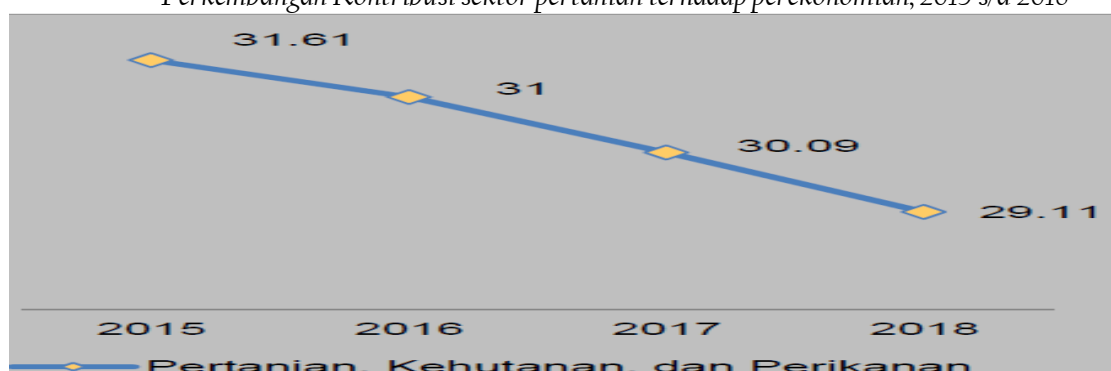
**Grafik 3.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2015-2018**



Sumber : Gowa dalam Angka 2019, BPS

Struktur ekonomi Kabupaten Gowa pada tahun 2018, perekonomiannya masih tetap mengandalkan pada sektor pertanian. Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Gowa cenderung menurun selama 4 tahun terakhir. hal ini tercermin dari tren kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Gowa yaitu dari 31,61 persen pada tahun 2015 menjadi 29,11 persen pada tahun 2018 (lihat grafik).

**Grafik.3.4**  
**Perkembangan Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, 2015 s/d 2018**

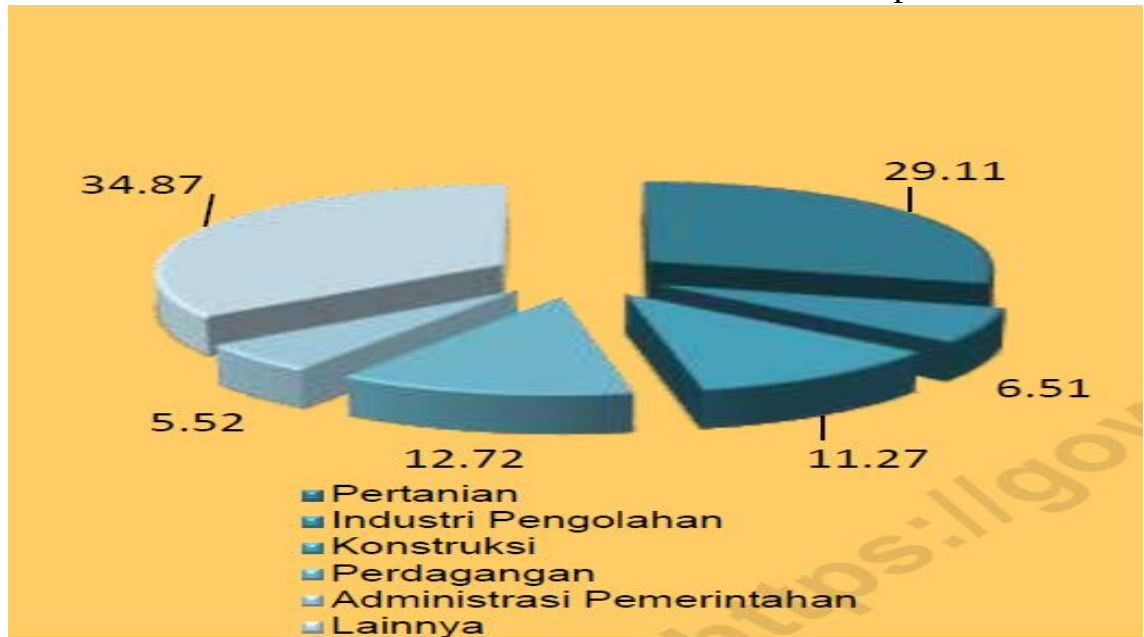


Sumber : Gowa Dalam Angka 2019, BPS



**Gambar 3.1**

Distribusi Persentase PDRB Menurut Sektor Di Kabupaten Gowa, 2018



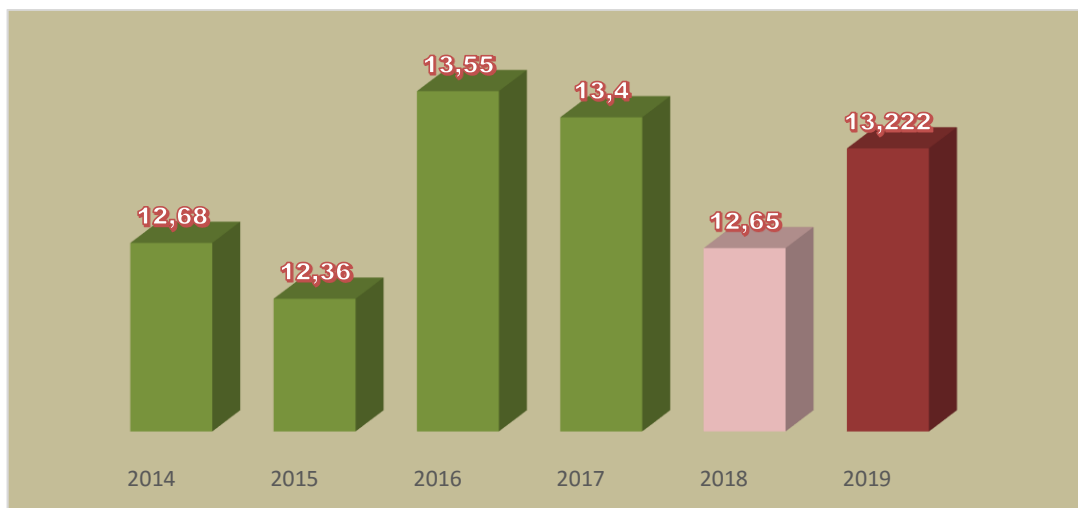
*Sumber : Gowa Dalam Angka 2019, BPS*

Struktur pertumbuhan ekonomi terus bergerak dinamis, pada Tahun 2013 struktur pertumbuhan ekonomi terbesar adalah sektor Konstruksi sebesar 28,29 juta rupiah, disusul sektor real estate sebesar 17,23 juta rupiah, kemudian sektor informasi dan komunikasi sebesar 16,88 juta rupiah, kemudian perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil sebesar 10,53 juta rupiah, kemudian sektor jasa perusahaan sebesar 9,87 juta rupiah, disusul sektor pertambangan dan Penggalian sebesar 9,73 juta rupiah, disusul penyediaan sektor akomodasi dan makan minum sebesar 8,82 juta rupiah, kemudian sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 8,75 juta rupiah, dan sektor pertanian sebesar 3,20 juta rupiah yang merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi kedua terkecil setelah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, sektor pertanian tidak lagi sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar. Pada tahun 2018 sektor pertumbuhan terbesar adalah jasa lainnya (12,81 juta rupiah), Pertambangan dan Penggalian (12,65 juta rupiah), Penyediaan akomodasi dan makan minum (11,85 juta rupiah), Informasi dan Komunikasi (10,39 juta rupiah) dan Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, limbah (10,09 juta rupiah). Tiga sektor terbesar dipegang oleh pertambangan dan penggalian, jasa lainnya dan



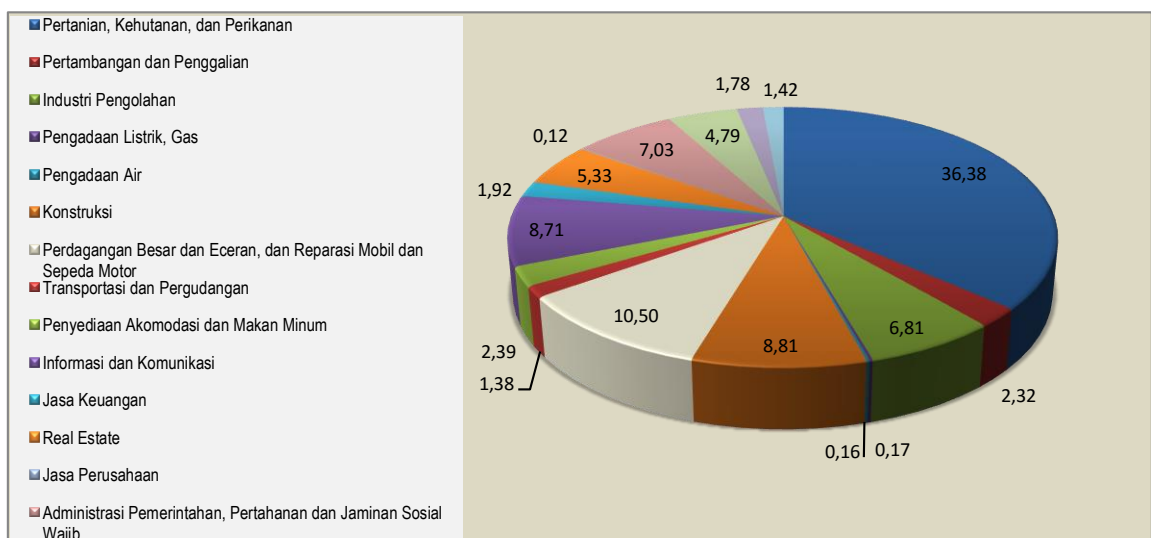
Penyediaan akomodasi dan makan minum, namun kontribusi dari sektor pertanian menunjukkan penurunan yang konstan sementara sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan dan begitu pula halnya dengan Penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu posisi sektor administrasi dan industri digantikan oleh sektor real estate dan informasi.

**Grafik 3.4**  
**Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2014 - 2018**



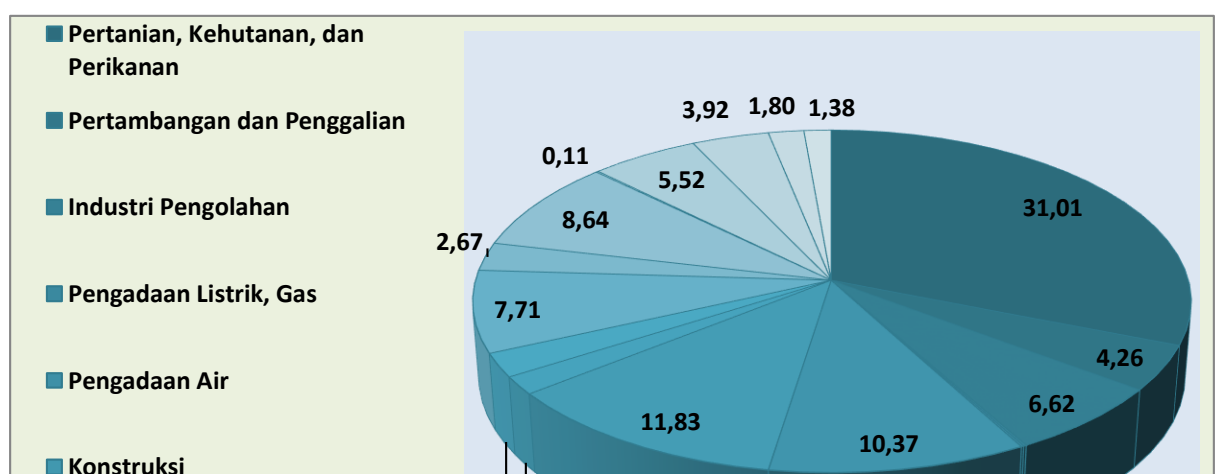
Sumber : Gowa Dalam Angka 2019, BPS  
\*) 2019 Angka Proyeksi

**Gambar 3.2**  
**Struktur Ekonomi**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2010 (%)**



Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2018

**Gambar 3.3**  
**Struktur Ekonomi**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2018 (%)**





**Sumber:** Kabupaten Gowa Dalam Angka 2019, BPS

Apabila pada tahun 2010 hanya 2 sektor yang memberikan kontribusi di atas 10%, maka pada tahun 2018 telah menjadi 3 sektor (Pertambangan dan penggalian, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya). Adapun sektor-sektor lainnya hanya menunjukkan peningkatan yang relatif kecil bahkan ada yang cenderung menurun.

Peningkatan kontribusi sektor Pertambangan dan penggalian lebih besar dibanding pelambatan yang terjadi pada sektor konstruksi. Selisih penurunan sektor konstruksi terlihat cenderung tidak mempengaruhi sektor-sektor lainnya.

### **3.1.1.3 Tingkat Inflasi**

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gowa pada tahun 2018 terdapat perubahan kepengurusan berdasarkan PMK 25 tahun 2017, dimana pada kepengurusan TPID Kabupaten Gowa dimasukkan pula Pejabat BI sebagai wakil ketua, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya bisa lebih mudah koordinasi. Saat ini terdapat juga informasi harga setiap hari yang ditampilkan pada televisi pada Lobby Bappeda Gowa, informasi tersebut bersumber dari Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Gowa.

Selain itu TPID Kabupaten Gowa aktif membangun komunikasi dengan TPID lainnya seperti Takalar dan Enrekang dengan tujuan agar



ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat khususnya di Kabupaten Gowa dapat tersedia dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau. Hal ini disadari karena beberapa kebutuhan pokok seperti bawang merah dan bawang putih sebagian besar dipasok dari daerah lain. BPS telah membagi kota-kota berdasarkan zona sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Zona Inflasi Menurut Kota**

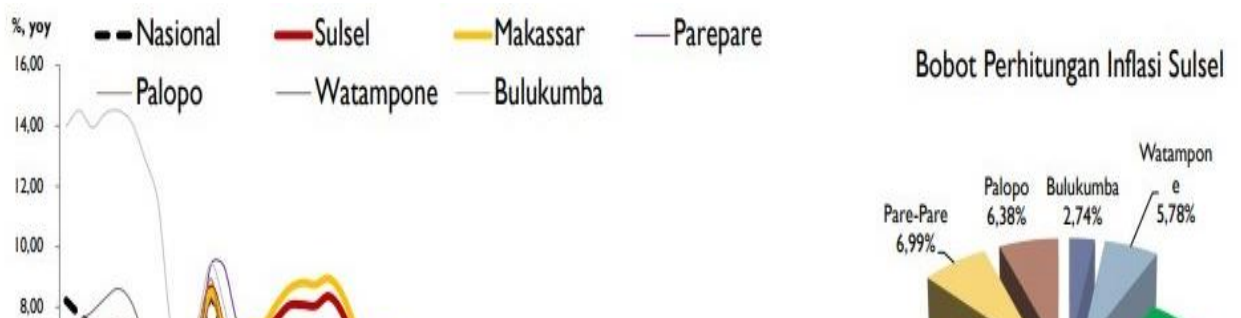
No	Nama Zona	Kabupaten/Kota
1	Zona Palopo	Palopo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, Tana Toraja
2	Zona Parepare	Parepare, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Barru
3	Zona Bone	Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai
4	Zona Bulukumba	Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Selayar
5	Zona Makassar	Makassar, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar

Propinsi Sulawesi Selatan. Laju inflasi Sulsel pada April 2018, Inflasi tahunan Sulawesi Selatan tercatat sebesar 3,50% lebih tinggi daripada nasional 3,13%(yoy). Inflasi SulSel berdasarkan kelompok makanan mtm 1,65% ytd 5,18% yoy 5,18% dengan andil penyumbang inflasi 0,4019%. Komoditas penyumbang inflasi adalah angkutan udara, ikan bandeng, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras. Komoditas penyumbang deflasi dan andilnya emas perhiasan, pepaya, daging sapi, cabe merah, ikan teri.

Pada Desember 2018 Sulsel tercatat inflasi 0,86% (mtm), sementara zona makassar juga tercatat inflasi 0,93% (mtm). Inflasi zona makassar secara tahun kalender tercatat sebesar 3,48% (yoy), lebih rendah dari Sulsel sebesar 3,50% (yoy), namun masih lebih tinggi bila dibandingkan nasional 3,13% (yoy).

**Gambar.3.4**

**PERBANDINGAN INFLASI PROVINSI SULSEL DENGAN INFLASI NASIONAL**





Sumber : Bank Indonesia,2019

- Inflasi IHK Provinsi Sulsel secara umum lebih tinggi dari Inflasi Nasional.
- Inflasi Sulsel terutama didorong oleh inflasi Kota makassar yang memiliki andil 78,12% terhadap inflasi Sulsel.

#### 3.1.1.4 *Pengeluaran Perkapita Penduduk Gowa*

Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota Rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Persentase golongan pengeluaran terdiri atas dua kelompok yaitu pengeluaran untuk makanan. Persentase golongan pengeluaran terdiri atas dua kelompok yaitu: pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat Kebutuhan/permintaan (demand) terhadap dua kelompok tersebut, pada dasarnya berbeda dalam kondisi pendapatan terbatas mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan (rupiah) menurut kelompok barang dan daerah tempat tinggal di Kabupaten Gowa tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5**

Rata-Rata Pengeluaran dan Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah)  
Menurut Kelompok makanan Di Kabupaten Gowa 2018

Kelompok Makanan	Rata-Rata Pengeluaran	Persentase Rata-Rata Pengeluaran
------------------	-----------------------	----------------------------------





1. Padi-padian	65 855	6,53
2. Umbi-umbian	3 606	0,36
3. Ikan/udang/cumi/kerang	53 422	5,30
4. Daging	9 967	0,99
5. Telur dan susu	25 451	2,52
6. Sayur-sayuran	25 217	2,50
7. Kacang-kacangan	6 667	0,66
8. Buah-buahan	26 188	2,60
9. Minyak dan Kelapa	10 616	1,05
10. Bahan minuman	15 156	1,50
11. Bumbu-Bumbuhan	10 598	1,05
12. Komsumsi Lainnya	10 274	1,02
13. Makanan dan Minuman Jadi	154 385	15,31
14. Rokok	60 920	6,04
<b>JUMLAH</b>	<b>478 322</b>	<b>47,45</b>

Sumber : Gowa Dalam Angka 2019, BPS

**Table 3.6**

Rata-Rata Pengeluaran Dan Persentase Rata-Rata Pengeluaran PerKapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Di Kabupaten Gowa 2018

Kelompok Bukan Makanan	Rata-Rata Pengeluaran	Presentase Rata-Rata Pengeluaran
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	256 835	25,48
Aneka barang dan jasa	92 769	9,20
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	35 429	3,51
Barang yang tahan lama	92 706	9,20
Pajak, pungutan, dan asuransi	23 203	2,30
Keperluan pesta dan upacara	28 881	2,86
<b>Jumlah/Total</b>	<b>529 824</b>	<b>52,55</b>

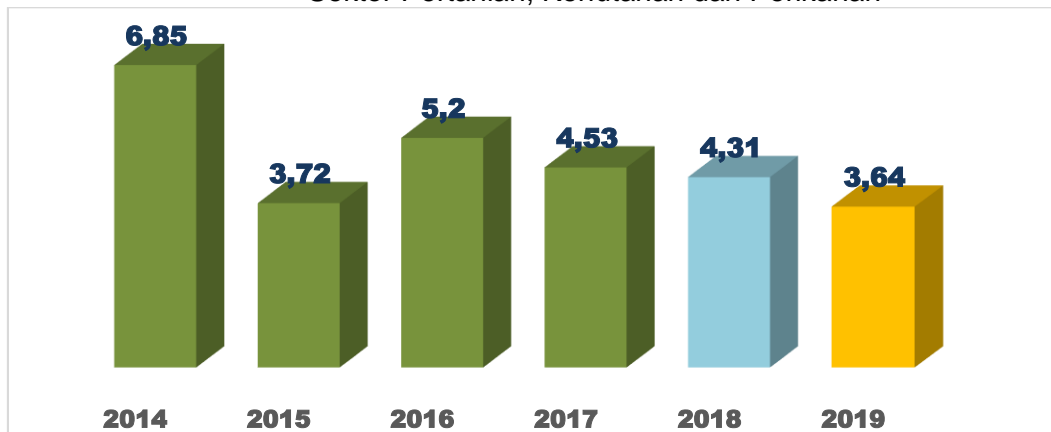
Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2019, BPS

### 3.1.2 Rencana Target Sektor Ekonomi Tahun Perencanaan

Proyeksi terhadap pertumbuhan sektor / lapangan usaha Tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan model regresi linear sederhana, adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:



**Grafik 3.5**  
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

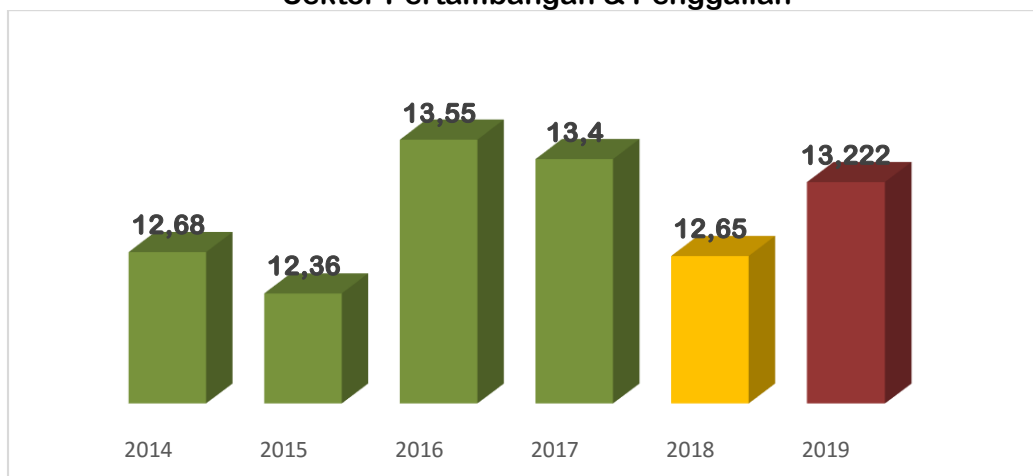


Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2018.

\*) Proyeksi 2019

Pertumbuhan pertanian dalam 3 tahun pertama mengalami kenaikan dari 3,20% di Tahun 2013 menjadi 6,85% pada Tahun 2014, selanjutnya pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 3,72%, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 5,44%, dan tahun 2017 turun menjadi 4,48%. Sedangkan pada Tahun 2018 besarnya pertumbuhan adalah 4,31%. Jadi dengan menggunakan regresi sederhana dapat diproyeksikan bahwa untuk Tahun 2019 besarnya pertumbuhan adalah 3,64%.

**Grafik 3.6**  
Sektor Pertambangan & Penggalian



Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2018.

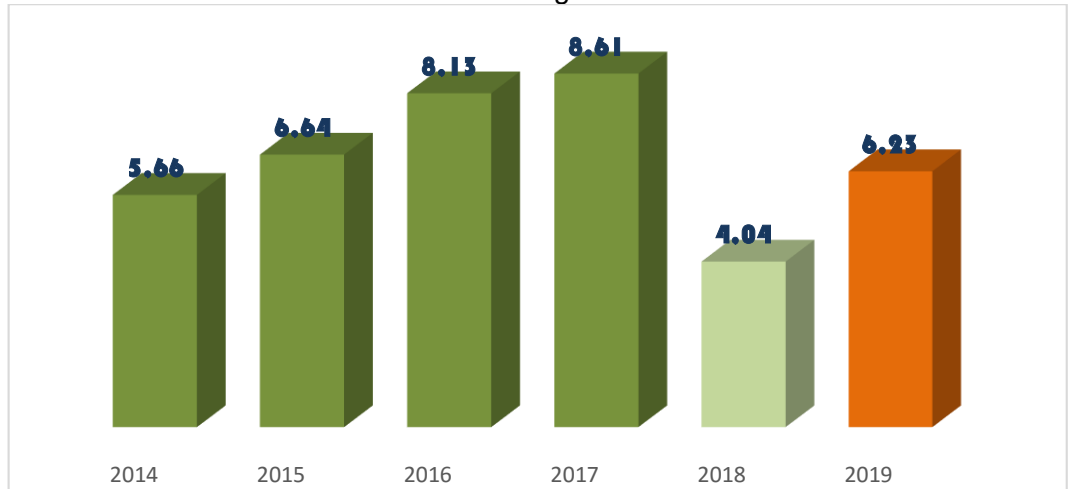
\*) Proyeksi 2019

Pertumbuhan sektor pertambangan & penggalian mencapai 12,68% pada Tahun 2014, kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun berikutnya, kemudian kembali mengalami kenaikan pertumbuhan 13,55% pada Tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 yaitu 13,40%,sedangkan pada tahun 2018 sebesar 12,65%



Pertumbuhan sektor ini cukup berfluktuatif dan diproyeksikan bahwa pada Tahun 2019 akan mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 13,22%.

**Grafik 3.7**  
Sektor Industri Pengolahan

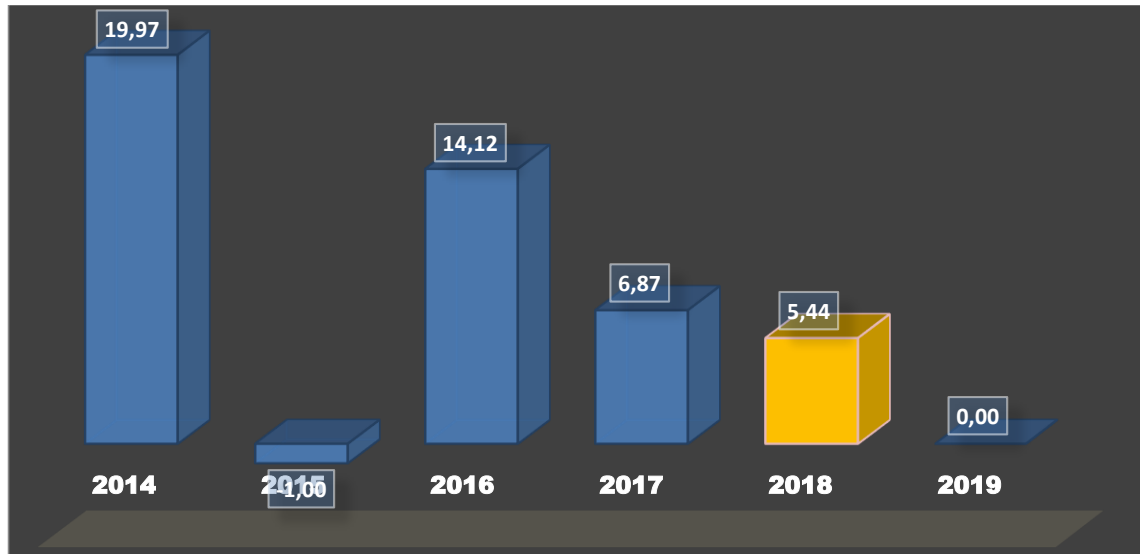


Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.

\*) Proyeksi 2019

Pertumbuhan sektor industri pengolahan secara umum menunjukkan peningkatan pertumbuhan, pada Tahun 2013 terjadi peningkatan pertumbuhan yang mencapai 7,62%. Pada Tahun 2014 kembali terjadi pelambatan pertumbuhan menjadi 5,66%. Pergerakan pertumbuhan pada sektor ini cukup berfluktuatif, pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan 6,64% begitu pula pada tahun 2016 sebesar 8,13% dan peningkatan pertumbuhan cukup baik pada tahun berikutnya 8,61%, dan tahun 2018 sebesar 4,04% dengan perhitungan regresi maka dapat diproyeksikan bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 6,23%.

**Grafik 3.8**  
Sektor Listrik & Gas



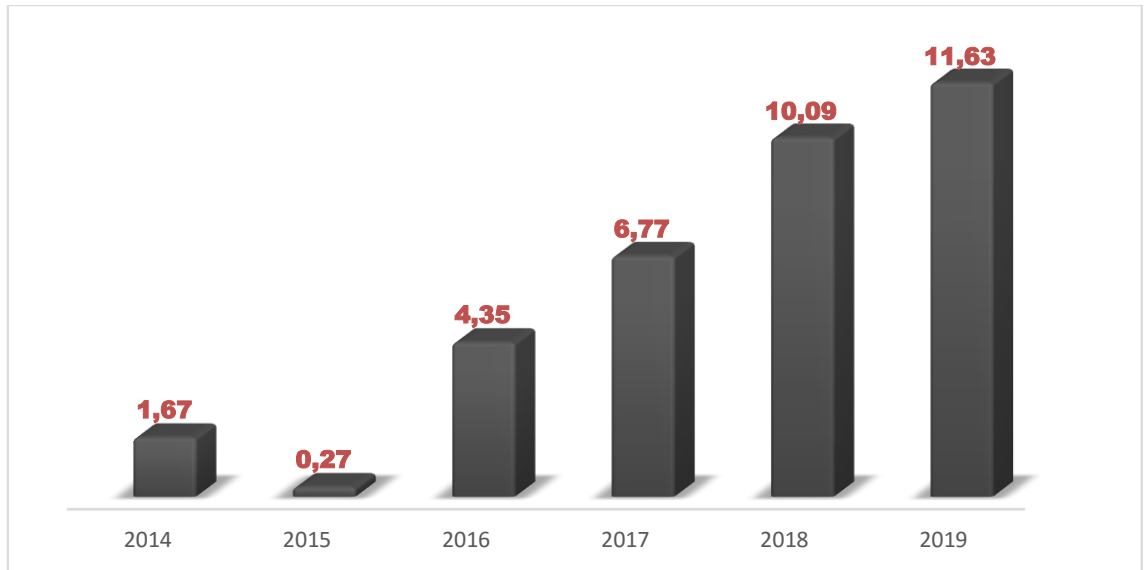
Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2018.

\*) Proyeksi 2019

Pertumbuhan sektor listrik & gas menunjukkan trend pertumbuhan yang positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu sebesar 19,97%, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan pertumbuhan yaitu -1,00, sementara pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 14,12% kemudian tahun 2017 mengalami penurunan pertumbuhan yaitu 6,87 % dan tahun 2018 sebesar 5,44% sehingga Pada Tahun 2019 diproyeksikan pertumbuhan menjadi 0,00%.

Berikut ini adalah pertumbuhan sektor air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Pada Tahun 2014 terlihat pertumbuhan sektor ini 1,67%, kemudian turun lagi menjadi 0,27% pada tahun berikutnya. pada tahun 2016 pertumbuhan sektor ini meningkat menjadi 4,35% dan pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan yang cukup baik menjadi 6,77%.

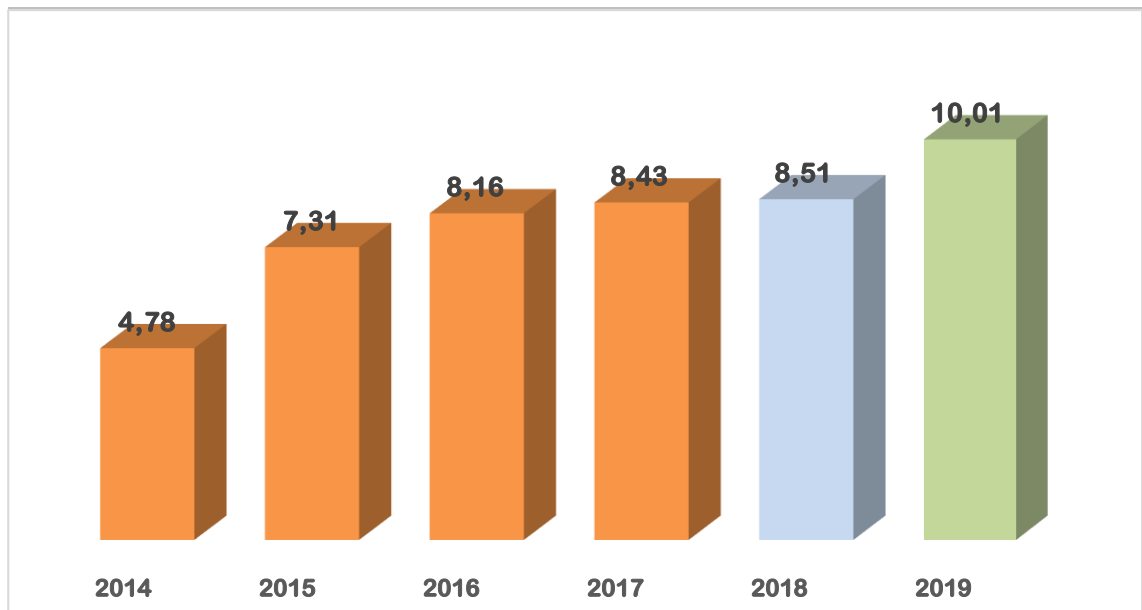
**Grafik 3.9**  
*Sektor Pengadaan Air,  
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang*



Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.  
\*) Proyeksi 2019

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menunjukkan trend pertumbuhan yang sangat meningkat, sehingga angka pertumbuhan pada Tahun 2018 adalah sebesar 10,09% dan proyeksi pada tahun 2019 meningkat menjadi 11,63%.

**Grafik 3.10**  
*Sektor Konstruksi*



Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.  
\*) Proyeksi 2019

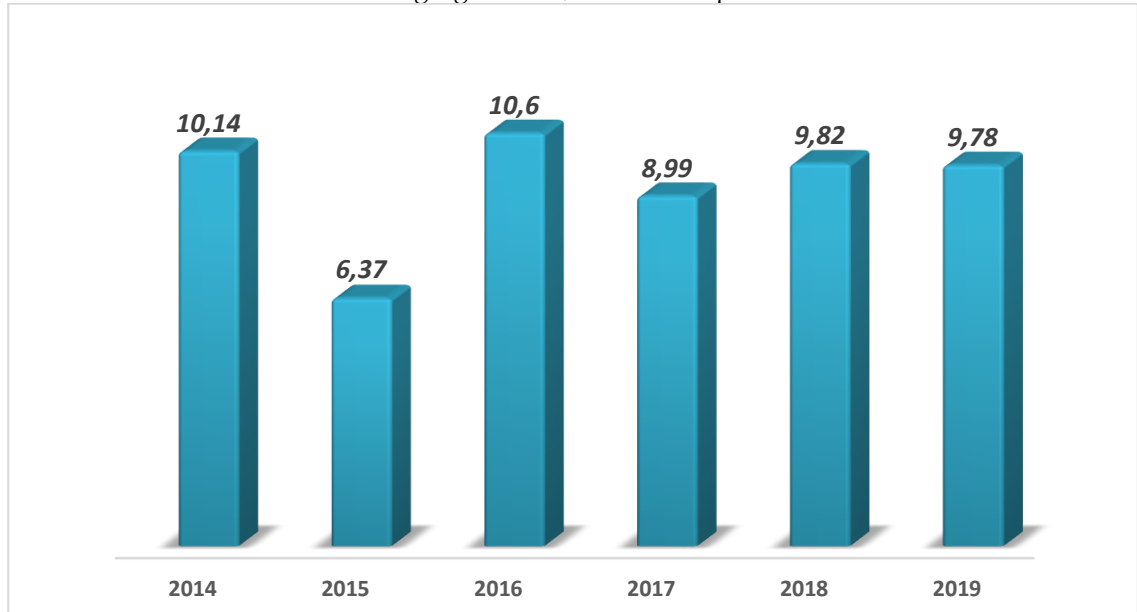
Sektor konstruksi ini mempunyai pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 4,78% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 7,31%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 8,16%. Secara umum sektor ini menunjukkan trend peningkatan pertumbuhan. Pada Tahun 2017 besarnya pertumbuhan



pada sektor konstruksi adalah sebesar 8,43%, sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan pada sektor ini mencapai angka 8,51%, sehingga pada tahun 2019 diproyeksi sebesar 10,01%.

**Grafik 3.11**

Sektor Perdagangan Besar, Eceran & Reparasi Mobil



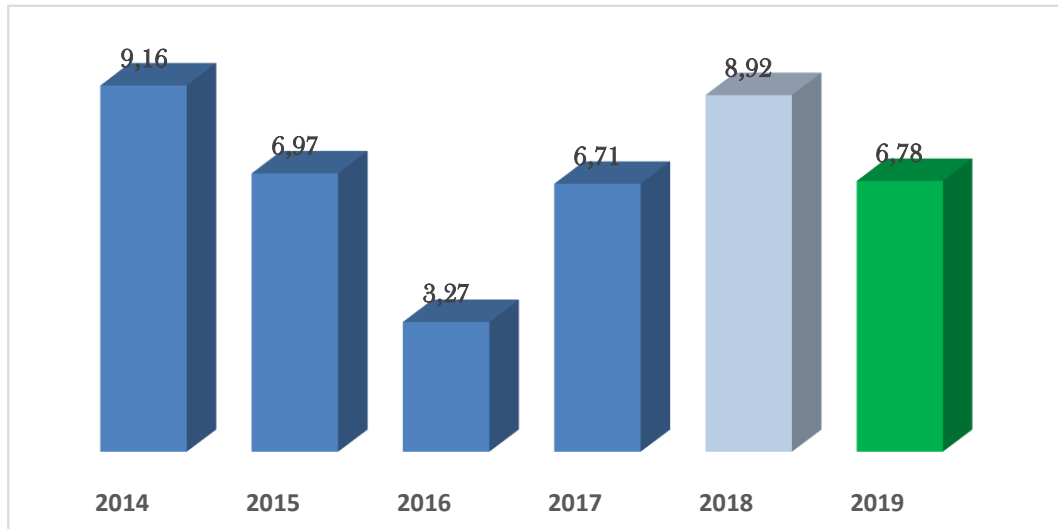
Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.

\*) Proyeksi 2019

Trend pergerakan pertumbuhan pada sektor perdagangan besar, eceran dan agak melemah, dimana pada Tahun 2014 pertumbuhan sebesar 10,14%. Selanjutnya pertumbuhan di tahun 2015 menurun tajam berada pada angka 6,37%. Walaupun sempat turun menjadi 6,37% pada Tahun 2015, namun kembali normal menjadi 10,60% di Tahun 2016, tapi seiring dengan banyaknya hal-hal yang mempengaruhi sektor ini sehingga terjadi penurunan pada tahun 2017 yaitu 8,99%. Pada tahun 2018. Seiring dengan kembali antusiasnya pasar dan peningkatan Investasi yang cukup menjanjikan maka terjadi kenaikan pada sektor ini menjadi 9,82%. Jika melihat trend pertumbuhan dari sektor ini yang berfluktuatif sehingga pada tahun 2019 pemerintah daerah memproyeksikan angka pada sektor ini akan tumbuh dikisaran 9,78%.

**Grafik 3.12**

Sektor Transportasi & Pergudangan



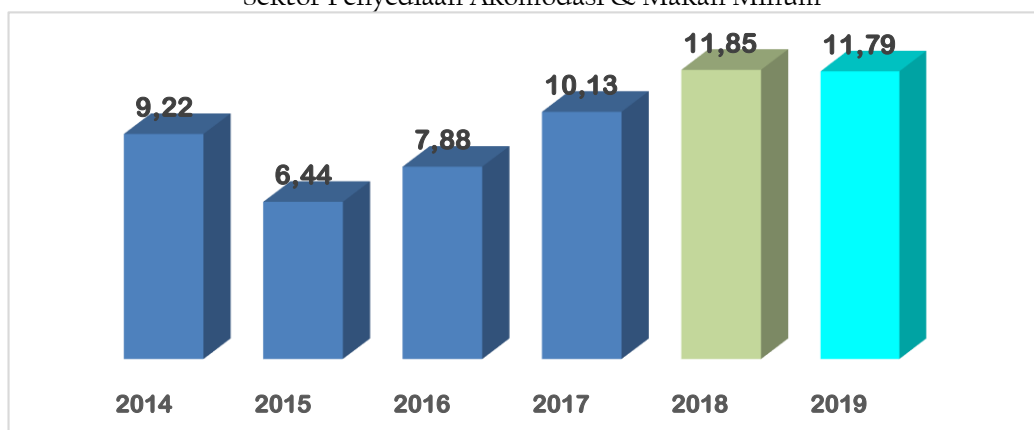
Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.

\*) Proyeksi 2019

Trend pertumbuhan sektor transportasi & pergudangan, Sejak Tahun 2014 pertumbuhan disektor ini sebesar 9,16%, namun pada Tahun 2015 terjadi penurunan pertumbuhan berada diangka 6,97%, namun pada tahun 2016 kembali terjadi perlambatan turun tajam diangka 3,27%. Mkipun pada tahun 2017 tumbuh positif sebesar 6,71% dan 2018 kembali naik mencapai 8,92%, Namun untuk sektor ini Pemerintah. Angka pertumbuhan sektor ini pada Tahun 2018 meningkat 8,92%. Dengan merujuk dengan data yang ada terhadap perkembangan sektor ini maka pada tahun 2019 diproyeksikan pertumbuhan pada sektor ini adalah sebesar 6,78%.

**Grafik 3.13**

Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum



Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.

\*) Proyeksi 2019

Sektor penyediaan akomodasi & makan minum menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan cukup tinggi terjadi pada



Tahun 2014 sebesar 9,22% dan yang terendah pada Tahun 2015 sebesar 6,44%, namun terjadi peningkatan di tahun 2016 berada pada angka 7,88%, dan terjadi kenaikan pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 10,13%. Pada tahun 2018 pertumbuhannya adalah sebesar 11,85% sehingga pada tahun 2019 proyeksi pertumbuhan sebesar 11,79%.

**Grafik 3.14**  
Sektor Informasi & Komunikasi



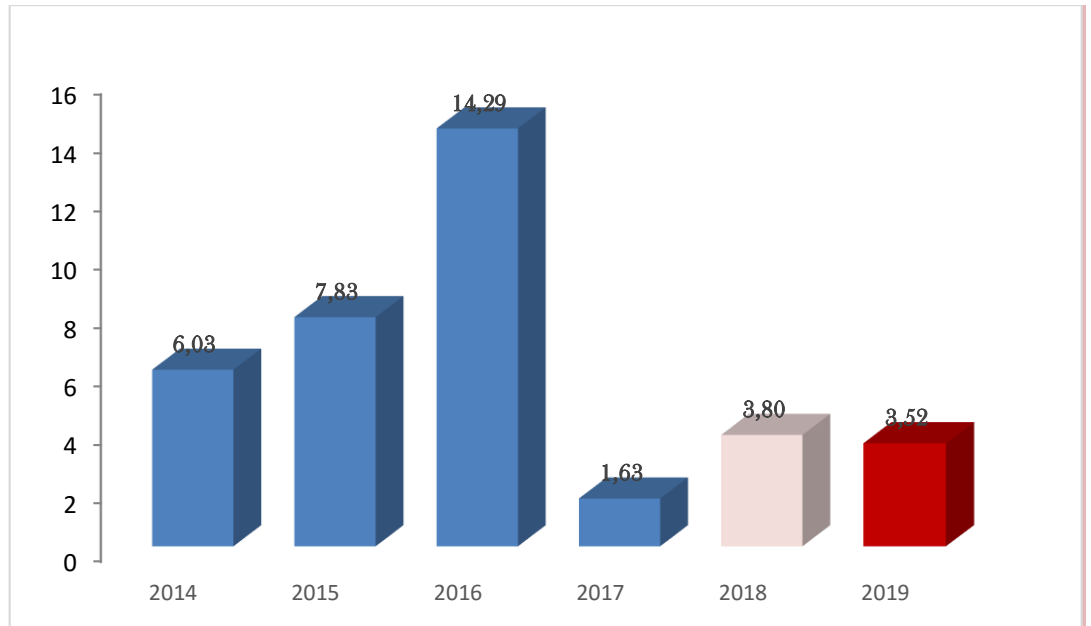
Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.

\*) Proyeksi 2019

Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan trend pelambatan dalam pertumbuhan. Pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2014 sebesar 5,27%, kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan meningkat menjadi 10,35%, dan terjadi penurunan pada tahun 2016 sebesar 10,27%, kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 9,87%. Pada Tahun 2018 pertumbuhan pada sektor ini adalah sebesar 10,39% dan di proyeksikan pada Tahun 2019 diharapkan kontribusi dari sektor ini mencapai 12.16%.

**Grafik 3.15**  
Sektor Jasa Keuangan & Asuransi



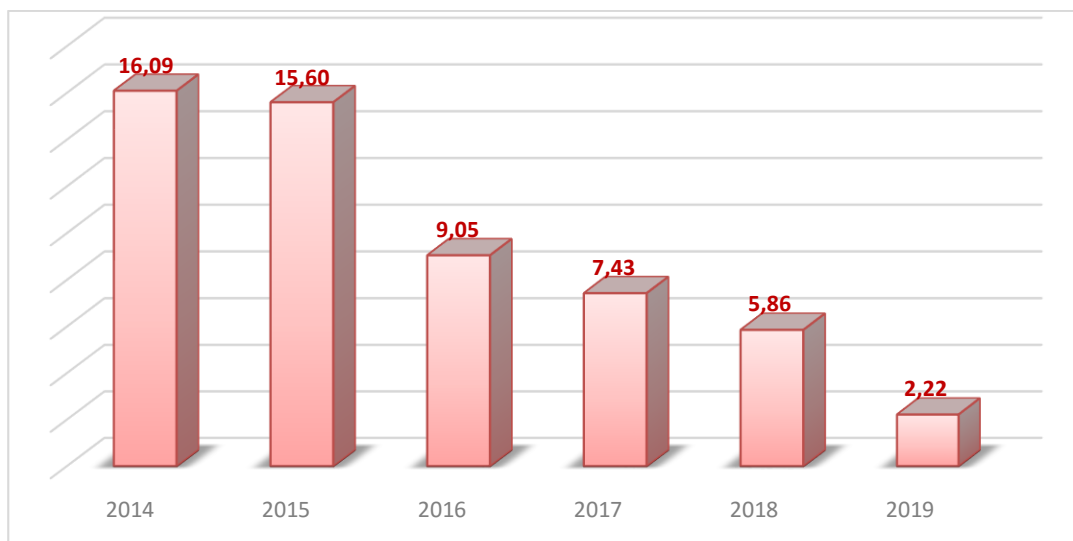


Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.

\*) Proyeksi 2019

Pada sektor jasa keuangan & asuransi menunjukkan pelambatan pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2016 (14,29%) dan yang terendah pada Tahun 2017 (sebesar 1,63%). Range yang cukup jauh antara titik terendah dan tertinggi, yaitu sekitar 15%. Angka pertumbuhan Tahun 2018 adalah 3,80% dan tahun 2019 diproyeksikan sebesar 3,52%.

Grafik 3.16  
Sektor Real Estate



Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2018.

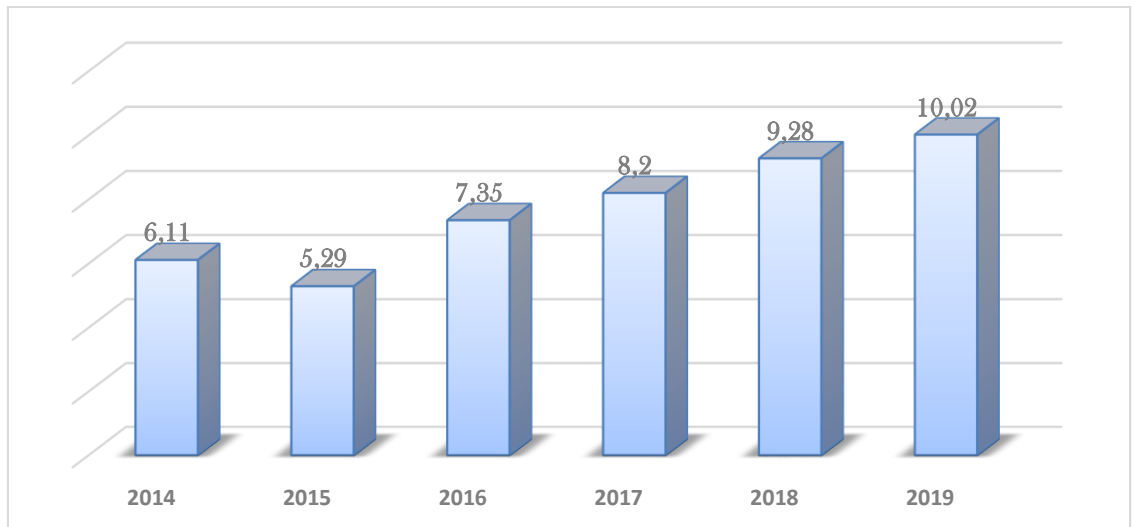
\*) Proyeksi 2018

Sektor real estate secara umum menunjukkan penurunan setiap tahunnya, berdasarkan data yang ada sejak tahun 2016 terus terjadi penurunan kontribusi dari sektor ini tercatat pertumbuhannya hanya 9,05% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka



15,60%, terus menunjukkan tren penurunan ditahun 2017 (7,43%) dan tahun 2018 (5,86%) sehingga pemerintah daerah tidak begitu optimis dalam menargetkan sektor ini, pada tahun 2019 hanya menargetkan pertumbuhan 2,22%.

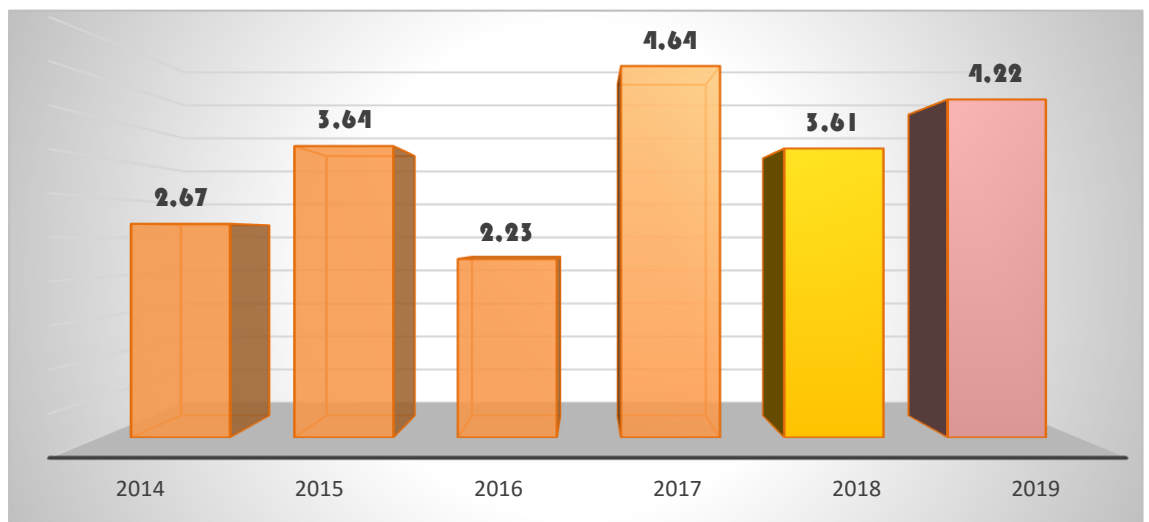
**Grafik 3.17**  
Sektor Jasa Perusahaan



Sumber: BPS. Kabupaten Gowa, 2019.  
) Proyeksi 2019

Trend angka pertumbuhan sektor jasa perusahaan terlihat merujuk data diatas menunjukkan tren positif dan tumbuh setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pertumbuhan untuk sektor ini adalah 9,28%, jika melihat data yang disajikan diatas maka pemerintah daerah memproyeksikan pertumbuhan Tahun 2019 sebesar 10,02%.

**Grafik 3.18**  
Sektor Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

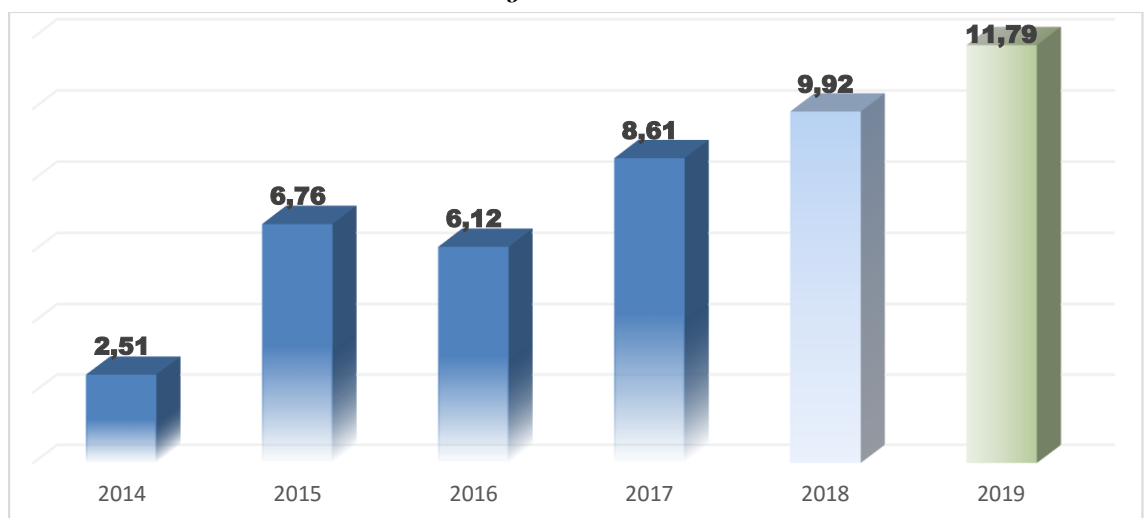


Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.  
) Proyeksi 2019



Sektor administrasi pemerintahan menunjukkan gap pergerakan berkisar 2%, namun demikian terdapat pelambatan pertumbuhan yang cukup rendah yaitu pada Tahun 2014 (2,67%), begitu pula dengan tahun 2016 (2,23%). Namun pada tahun 2015 pertumbuhan meningkat menjadi 3,64%, begitu pula tahun 2017 sebesar 4,64% Jadi diproyeksikan angka pertumbuhan sektor ini pada Tahun 2019 meningkat menjadi 4,22%.

**Grafik 3.19**  
Sektor Jasa Pendidikan



Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.

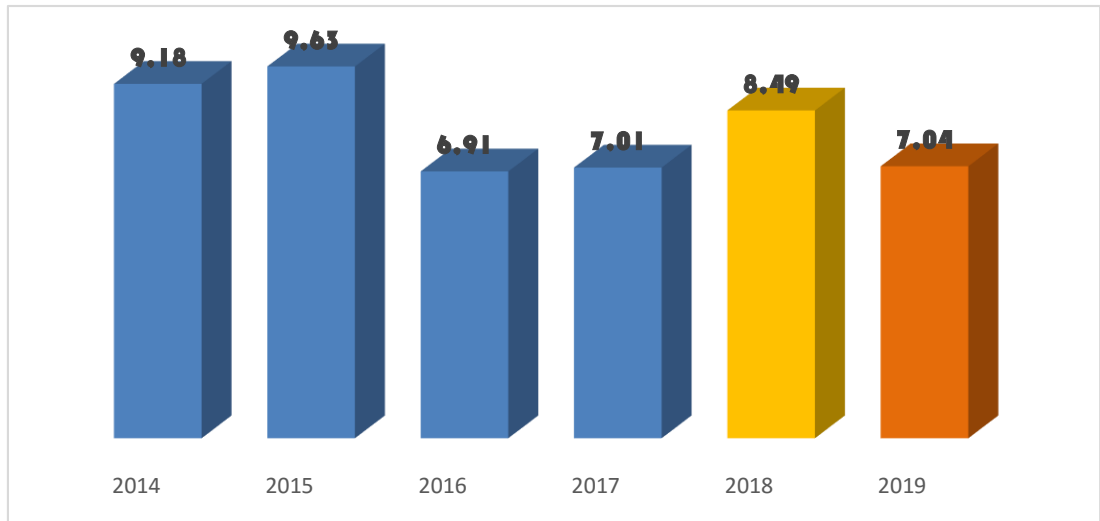
\*) Proyeksi 2019.

Pada sektor jasa pendidikan terlihat bahwa pada umumnya berada pada kisaran 6% sampai dengan 8% dengan kecenderungan arah pergerakan yang datar.

Pertumbuhan sektor jasa pendidikan pada Tahun 2014 sebesar 2,51% kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup baik sebesar 6,76%, dan pada tahun 2016 sedikit mengalami pelambatan dan tahun 2017 terjadi peningkatan pada angka 8,61%. Pada grafik diatas terlihat bahwa dengan data yang ada saat ini, angka pertumbuhan sektor pendidikan pada Tahun 2018 akan menjadi 9,92% dan kemudian diproyeksikan untuk tahun 2019 pertumbuhan sektor ini sebesar 11,79%.



**Grafik 3.20**  
Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

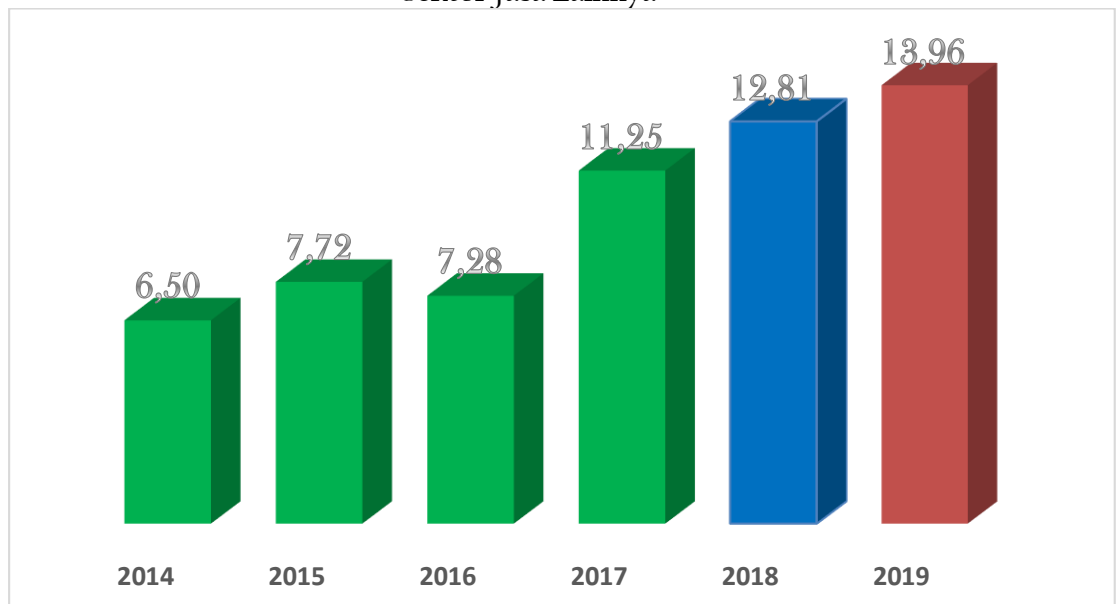


Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.

\*) Proyeksi 2019

Pertumbuhan sektor jasa kesehatan menunjukkan trend yang positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2015 yaitu sebesar 9,63%, namun terjadi pelambatan pada Tahun 2016 di mana pertumbuhan hanya mencapai 6,91% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 7,01%, sedangkan tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 8,49%. Pada Tahun 2019 diproyeksikan pertumbuhan menurun sesuai dengan rumus linier menjadi 7,04%.

**Grafik 2.23**  
Sektor Jasa Lainnya



Sumber: BPS Kabupaten Gowa, 2019.

\*) Proyeksi 2019



Sektor jasa lainnya cenderung menunjukkan trend yang meningkat, pertumbuhan pada tahun 2014 sebesar 6,50% yang terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 11,25% pada tahun 2017, dan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2018 adalah 12,81%. Proyeksi angka pertumbuhan untuk Tahun 2019 adalah 13,96% dan diharapkan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya.

### 3.1.3 Target Indikator Makro pada Tahun 2020

Tema yang dicanangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 adalah **“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Ekonomi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, sesuai tema pada RKPD sebagai pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun keempat. Pada tahap ini, pembangunan tetap difokuskan pada pemerataan dan pembangunan infrastruktur jalan peningkatan kualitas serta kuantitas pembangunan irigasi, Pembangunan Ruang publik dan pedestrian, percepatan penanganan kawasan kumuh di perkotaan serta melanjutkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan dukungan infrastruktur yang memadai dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup. Pada tahap ini juga difokuskan pada penguatan pondasi pemerintahan yang baik dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan berkualitas di Kabupaten Gowa. **Pembangunan difokuskan** pada peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan Good Governance, peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif. Dalam tahapan ini memfokuskan Perencanaan pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2019 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Mempedomani RPJPD Kabupaten Gowa Tahun 2005 - 2025;



2. Mempedomani RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021;
3. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJP serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional;
4. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2018 dan rencana target capaian Tahun 2019;
5. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal;
6. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Dengan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021, target capaian kinerja Tahun 2018 dan isu strategis daerah Tahun 2019 maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2020 sebagaimana berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2020 diproyeksikan sebesar 7,63 persen;
- b. Inflasi ditargetkan pada kisaran 2,5 persen sampai dengan 4,5 persen;
- c. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 8,78 sampai dengan 8,87 persen;
- d. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,20 persen.

**Tabel 3.4**  
**Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2020**

No	Indikator Makro Ekonomi	Target
1	PDRB Juta Rupiah( ADHK 2010 )	19.628.187,88
2	PDRB / kapita ADHK 2010	26,63 Juta
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi ( %)	7,63
4	Inflasi ( %)	2,5 s/d 4,5



5	Angka Kemiskinan (%)	8,78 s/d 8,87
6	Angka Pengangguran (%)	5,20
7	IPM	68,1
8	IPG	96,7

### 3.1.3 Tantangan Perekonomian Daerah

#### 3.1.3.1. Kondisi Eksternal

- a. Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2020 sebagai penjabaran tahun pertama dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2021 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang sifatnya indikatif;
- b. Rumusan tujuh agenda pembangunan nasional dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan lintas instansi.



- **Agenda Pertama** adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Agenda ini menitikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi;
- **Agenda Kedua** adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Agenda ini dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
- **Agenda Ketiga** adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar, utamanya pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk;
- **Agenda Keempat** adalah Revolusi mental dan kebudayaan. Agenda ini dititik beratkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
- **Agenda Kelima**, adalah memperkuat Infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- **Agenda Keenam**, adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- **Agenda Ketujuh** adalah memperkuat stabilitas polhulkhankam dan transformasi pelayanan publik





- c. Penyusunan RKP 2020 dilakukan mengikuti tahapan, mekanisme dan proses penyusunan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga rencana kerja menghasilkan rancangan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. koordinasi dan sinkronisasi rancangan kerja kementerian/ lembaga (renja K/L) dengan renja pemerintah daerah dilakukan agar program kerja menjadi efisien, efektif, fokus dan memiliki dampak langsung bagi tercapainya target pembangunan nasional;
- d. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah (nilai tukar rupiah ditetapkan Rp. 14.700 per dollar AS, suku bunga BI 4,25 % dan pertumbuhan ekonomi 5,3 % dan inflasi 3,1 persen untuk tahun 2020).

#### **3.1.3.2. Kondisi Internal**

- a) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan. Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat dan keberlanjutan. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran dana Dana Hibah, CSR dan lain - lain program pemberdayaan yang langsung kepada masyarakat dan Kelurahan/Kecamatan



diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas masyarakat;

- b) Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat diperoleh disetiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
- c) Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung konstan, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang ada dan baru dicatat sebagai penerimaan sepanjang telah ditetapkan dalam anggaran pemberi bantuan;
- d) Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah;



- e) Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada tahun 2020 untuk mengurangi kemiskinan menjadi sebesar 7,70% dan pengangguran terbuka berada pada kisaran 5,60%;
- f) Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan modal dan PDRB Kabupaten Gowa secara teoritis dan statistik tidak hanya dipengaruhi oleh variabel investasi APBD Kabupaten Gowa semata tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti dana Insentif Daerah, APBD Provinsi, APBN, Swasta, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, sehingga kebijakan penganggaran yang komprehensif dan peka terhadap perubahan lingkungan harus selalu dipertimbangkan.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam bidang keuangan daerah.

Rencana pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Gowa Tahun 2020 diproyeksikan meliputi : (1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak



Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah meliputi Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian dan Otonomi khusus, serta Dana Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Selanjutnya pada Belanja Daerah diproyeksikan terdiri dari: (1) Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, (2) Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.

Pada struktur Pembiayaan Daerah sesuai regulasi terdiri dari: (1) Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), (2) Pengeluaran Pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan.

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku saat ini antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Kabupaten Gowa pada tahun 2020 diarahkan untuk mengamankan fungsi-fungsi anggaran sebagai berikut:

- a. **Fungsi otorisasi**, yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
- b. **Fungsi Perencanaan**, yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yang berarti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



- d. **Fungsi Alokasi**, yang berarti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. **Fungsi Distribusi**, yang berarti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. **Fungsi Stabilisasi**, yang berarti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Guna mendukung pembangunan daerah, pendapatan daerah akan dioptimalkan sehingga menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang semakin meningkat. Realisasi pendapatan daerah pada masa sebelum tahun perencanaan serta target pada APBD tahun berjalan, akan memberikan gambaran peta kemampuan penerimaan daerah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun proyeksi pada tahun perencanaan. Pada tabel berikut ini disajikan data realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2019, serta proyeksi pendapatan Tahun Anggaran 2020.

**TABEL 3.5**  
**REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN KABUPATEN GOWA**  
**TAHUN 2017 - 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TAHUN 2017	REALISASI 2018	TAHUN BERJALAN 2019	TARGET/ PROYEKSI TAHUN 2020
1.1	Pendapatan Asli Daerah	168.865.893.977	163.054.102.314	189.361.823.961	1.239.260.677
1.1.1	Pajak daerah	69.648.135.430	89.747.690.642	82.964.635.430	77.919.888.061
1.1.2	Retribusi daerah	69.144.045.692	54.168.769.224	66.809.634.811	45.590.754.990
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.825.000.000	4.625.881.693	5.170.000.000	3.964.865.625



1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	25.248.712.855	14.511.760.755	34.417.553.720	27.763.752.001
1.2	Dana Perimbangan	1.371.133.306.000	1.304.093.896.763	1.244.431.656.000	1.502.963.132.611
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	22.723.886.000	22.863.412.183	22.777.314.000	27.855.005.057
1.2.2	Dana alokasi umum	850.677.296.000	835.733.631.000	837.326.483.000	1.056.793.746.454
1.2.3	Dana alokasi khusus	497.732.124.000	445.496.853.580	384.327.859.000	418.314.381.100
1.2.4	Dana Insetif Daerah	0	0	0	0
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	174.541.011.413	217.830.399.668	336.161.851.856	210.498.733.595
1.3.1	Hibah	0	21.420.810.950	0	0
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	62.353.731.456	87.871.879.826	83.857.731.456	66.518.086.604
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.741.410.000	99.632.871.692	150.884.770.000	104.031.691.951
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	28.445.869.957	8.904.837.200	18.307.950.400	39.948.955.039
1.3.6	Pendapatan Lainnya			83.111.400.000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.714.540.211.390</b>	<b>1.684.978.398.745</b>	<b>1.769.955.331.817</b>	<b>1.868.701.126.885</b>

Sumber : APBD Kabupaten Gowa 2019 & Bappenda

### 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari setiap sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur dan secara rasional dapat dicapai tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi setiap sumber penerimaan.



Sumber Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pajak Daerah (2) Retribusi Daerah (3) Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan bersumber dari Pajak Daerah antara Lain Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Tambang Galian C, Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Hiburan. Sementara Retribusi yang diharapkan antara lain Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi IMB, Retribusi Parkir, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan diharapkan bersumber dari Perusahaan Daerah PT. Bank Suselbar dan GMTD Tbk.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah diharapkan bersumber dari jasa giro dan penerimaan dari pihak ketiga.

Dana Perimbangan merupakan dana transfer pemerintah kepada daerah yang terdiri dari: (1) Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus dan (4) Dana Insentif Daerah. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya berada diluar kendali pemerintah daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Fluktuasi



penerimaan dari dana perimbangan sangat tergantung dari peningkatan penerimaan negara.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari: (1) Pendapatan Hibah (2) Dana Darurat (3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (5) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya.

Sejalan dengan kebijakan pendapatan daerah, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan pendapatan dari sumber daya yang ada. Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, khususnya bahan galian golongan C, yang masih menjadi primadona hendaknya memperhatikan pengembangan dan kelestariannya.
2. Intensifikasi pemungutan PBB diusahakan agar terjadi kesesuaian antara target PBB dengan Potensi PBB, sarana dan prasarana pendukung yang memadai, disamping peningkatan pengawasan dan keterpaduan tugas serta pengembangan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah.
3. Penyempurnaan dan penambahan jenis pajak dan retribusi atas dasar kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak dan retribusi, maka diperlukan evaluasi dan pengkajian ulang jenis objek pajak dan retribusi dalam rangka penyempurnaan dan penambahannya.





4. Peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
5. Peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi lainnya yang ditempuh melalui inventarisasi, menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal.
6. Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan.
7. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah dan  *Holding Company*  agar memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pendapatan daerah.
8. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi.
9. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan lain.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 antara lain:

1. Peningkatan akurasi data sumber daya alam dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai dasar perhitungan pembagian dana Perimbangan.
2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan.
3. Mempertahankan opini BPK-RI yaitu *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dan tepat waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1. Mendorong upaya peningkatan Bagi Hasil Pajak Provinsi
2. Mendorong upaya peningkatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.



3. Mendorong upaya peningkatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui program dan kegiatan organisasi perangkat daerah pelaksana urusan wajib dan pilihan. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan lagi pada **“Money Follow Function”**, tetapi **“Money Follow Program Prioritas”**. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.

Untuk kebijakan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa diarahkan pada pemanfaatan belanja seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang sesuai pasal 11 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintah daerah melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintah wajib terdiri atas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Belanja pada urusan wajib pelayanan dasar tetap diprioritaskan pada anggaran fungsi pendidikan 20% sesuai amanat PP Nomor 48 Tahun 2008, anggaran urusan kesehatan 10% yang amanat dan dasar hukumnya adalah UU Nomor 36 Tahun 2009, infrastruktur, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sedangkan belanja non pelayanan dasar diprioritaskan kepada 18 urusan serta peningkatan urusan pemerintahan pilihan diprioritaskan pada sektor-sektor unggulan daerah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing daerah.

Untuk itu pengaturan belanja perlu dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien. Proporsional terutama anggaran publik yang tetap diupayakan lebih besar dari pada anggaran aparatur. Sedangkan efektif dan efisien



dimaksudkan agar tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja dapat dicapai dengan lebih optimal.

3.2.3.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 antara lain:

1. Kebijakan Belanja pegawai antara lain :
  - a. *Penyediaan gaji pokok/tunjangan PNSD* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. *Penganggaran Gaji Ke 13 dan tunjangan gaji ke 14* dan tunjangan jabatan struktural dan fungsional dan tunjangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  - c. *Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan* bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
  - d. *Akses gaji dan tunjangan sebesar 2,5%* untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi.
  - e. *Penganggaran gaji bagi DPRD* berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007.
  - f. *Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* yang didasarkan pada PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - g. *Penganggaran penunjang operasional pimpinan DPRD* berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,



Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.

- h. *Pemberian tambahan penghasilan* berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - i. *Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah* berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - j. *Penganggaran tunjangan profesi guru PNSD* dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang berasal dari dana transfer dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai.
2. Kebijakan Belanja Hibah antara lain :
- a. Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti KPUD).
  - b. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah akan dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
  - c. Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPDHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah



serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk Uang.

- d. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 3. Kebijakan belanja bantuan sosial

- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pemberian bantuan sosial dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



- c. Pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - d. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada PP Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2006, yang dianggarkan dalam bantuan sosial.
  - e. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Kebijakan belanja bagi hasil
- Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa disesuaikan dengan Rencana Pendapatan pada Tahun Anggaran 2020.
5. Kebijakan belanja bantuan keuangan
- a. Penganggaran Alokasi Dana Desa dan Kelurahan (ADD/K) kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan bagi desa/kelurahan penerima bantuan.



- b. Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) untuk meningkatkan kesejahteraan Aparat Desa.
- c. Pemberian bantuan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

#### 6. Kebijakan belanja tidak terduga

Penyediaan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Kebijakan Belanja Langsung diarahkan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### 3.2.3.2. Alokasi belanja langsung

Dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.

##### 1. *Belanja Pegawai*

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah penganggaran honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan



hal tersebut, pemberian honorium bagi PNSD dan non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan.

2. *Belanja Barang dan Jasa*

- a) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/ tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- d) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- e) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas keluar negeri, dilakukan





secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

- f) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya keluar daerah harus dilakukan dengan selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenis guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

### 3) *Belanja Modal*

- a) Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD tahun Anggaran 2020 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Persiden Nomor 5 Tahun 2010.



b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus Penganggaran untuk Pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, maka proyeksi belanja daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel berikut ini:

**TABEL 3.6**  
**REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH**  
**TAHUN 2016 S/D 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Target / Proyeksi Tahun 2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>A</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>907.227.518.045</b>	<b>1.065.406.865.488</b>	<b>877.221.727.967</b>	<b>958.828.974.353</b>	<b>1.172.193.045.497</b>
2.1.1	Belanja pegawai	759.600.846.003,00	878.679.578.072,10	679.389.820.555,81	734.243.900.852,93	967.881.066.501,66
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja hibah	25.030.000.000,00	12.406.500.000,00	7.176.600.000,00	9.866.359.189	5.758.797.748,08
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.434.050.000,00	2.809.550.000,00	382.550.000,00	382.550.000	2.356.557.626,49
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	1.675.443.700,00	1.675.443.700,00	0	1.675.443.700,07	1.929.708.281,32



2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	118.392.235.855,04	169.335.793.716,00	189.772.757.412,00	212.160.720.612	193.691.035.564,96
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.094.942.486,85	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	575.879.774,81
<b>B</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>662.118.339.188</b>	<b>759.191.333.877</b>	<b>662.320.132.475</b>	<b>862.126.357.463,61</b>	<b>696.508.081.388</b>
	Belanja Pegawai	22.573.145.596	43.412.199.652,18	27.910.075.921,00	37.927.185.326,97	48.223.335.396,48
	Belanja Barang dan Jasa	225.563.907.203	299.967.255.666	261.698.382.302,23	411.592.203.507,82	336.923.894.364,38
	Belanja Modal	413.981.286.389	415.811.878.559	372.711.674.251,36	412.606.968.628,28	311.360.851.627,77
<b>C</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA (A+B)</b>	<b>1.569.345.857.233</b>	<b>1.824.598.199.366</b>	<b>1.539.541.860.443</b>	<b>1.820.955.331.817,54</b>	<b>1.868.701.126.885</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah diarahkan pada pemanfaatan dana untuk menunjang upaya peningkatan akses usaha kecil menengah untuk sumber daya modal serta penguatan kewirausahaan pemerintahan daerah melalui penyertaan modal. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:



1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada kecenderungan kedepan, dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2020 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
2. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan;
3. Menjadikan penyertaan modal (investasi) daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD;
4. Melihat kecenderungan keuangan daerah yang mengalami defisit, dan target pendapatan yang belum terpenuhi, maka perlu antisipasi pembayaran pokok utang.

Dari analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan



pengelolaan pembiayaan daerah maka disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**TABEL 3.7**  
**REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN 2016 s/d 2020**

NO	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019*)	Proyeksi/Target Pada Tahun 2020**)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>A</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>215.580.377.912</b>	<b>122.246.081.922,73</b>	<b>128.105.503.400</b>	<b>108.408.996.206</b>	<b>105.450.000.000</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	147.699.210.951	122.246.081.922,73	128.105.503.400	58.000.000.000	55.450.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0	0	50.000.000.000	50.000.000.000
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	147.404.596.553,79	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>12.188.093.946,73</b>	<b>44.228.376.023</b>	<b>57.408.996.206</b>	<b>53.500.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	38.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	294.614.397	0	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	<b>4.749.043.735,00</b>	4.751.259.015,00	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	86.033.045,00	3.908.996.206,00	0	3.908.996.206	0
3.2.5	Sisa Dana	0	3.527.838.725,73	3.228.376.023	0	0
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (A-B)</b>		<b>152.448.254.685,79</b>	<b>110.057.987.976,00</b>	<b>83.877.127.377</b>	<b>51.950.000.000</b>	<b>51.950.000.000</b>

Sumber : Badan Pengelolaan keuangan Daerah

\*) APBD

\*\*\*) Hasil analisis



## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2020 sesuai RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian, daya saing dan keunggulan daerah. Pada tahap ketiga ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Gowa terhadap pencapaian pembangunan secara menyeluruh baik dalam konteks provinsi maupun nasional dengan fokus terlaksana secara berkesinambungan. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yaitu:

***“Terwujudnya Masyarakat Yang Berkualitas, Mandiri Dan Berdaya Saing Dengan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik”***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut :

- ***Berkualitas*** : dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, religius dan bermartabat sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya secara inklusif
- ***Mandiri*** : dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada
- ***Berdaya saing*** : dimaknakan sebagai kondisi daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- ***Tata kelola pemerintahan yang baik*** dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola yang baik bersih dan demokratis.



Dalam rangka pencapaian visi yang ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur beorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor
4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan demokratis.

Guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 berfokus terhadap upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 dengan tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini serta prioritas pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2019.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang ditetapkan, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sementara itu



sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu kedepan.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2016 – 2021. Berikut disajikan tabel mengenai hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Gowa.

**Tabel 4.1**  
**Hubungan misi, tujuan dan sasaran pembangunan**

Tujuan		Sasaran	
<b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama</b>			
1	Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif	1	Meningkatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas
		2	Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
		3	Meningkatnya ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman
		4	Meningkatnya layanan perumahan yang layak
		5	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha
		6	Meningkatnya rasa aman dan tentram
2	Meningkatkan kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	1	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
		2	Meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		3	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan
		4	Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan olahraga
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan religius	1	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya





		2	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius
<b>Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan</b>			
1	Mengembangkan potensi sumber daya alam lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan	1	Meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan
		2	Meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata energi dan sumber daya mineral
		3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	1	Meningkatkan pengembangan koperasi, UMKM dan industri rumah tangga
		2	Meningkatkan iklim investasi dan perdagangan
<b>Misi 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor</b>			
1	Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar	1	Meningkatnya kapasitas jalan, jembatan, irigasi dan perhubungan
2	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	1	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya
3	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	1	meningkatkan kualitas kawasan permukiman
<b>Misi 4 : Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan</b>			
1	Meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan desa dan kelurahan	1	menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan
2	Meningkatkan kerjasama dan keintegrasian pengembangan wilayah	1	meningkatnya kerjasama dan keintegrasian pengembangan wilayah berbasis kawasan
<b>Misi 5 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis</b>			
1	Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Meningkatkan kapasitas pemerintahan
		2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah
2	Meningkatkan kualitas pelayanan public	1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik
3	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis	1	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi
		2	Meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial politik



## 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2020 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Gowa (RPJMD 2016 – 2021) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun 2018 dan proyeksi pencapaian kinerja 2019 serta isu strategis dan masalah pembangunan yang mengacu pada prioritas pembangunan provinsi dan nasional sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

### 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, visi tersebut adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, yang menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;



3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut "*Nawa Cita*", yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. *Dimensi pembangunan manusia* meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. *Dimensi pembangunan sektor unggulan* meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. *Dimensi pemerataan dan kewilayahan* yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 yaitu "**Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas**". Sesuai Tema RKP Tahun 2020 tersebut maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 – 5,8%;
2. Inflasi secara nasional berkisar 2,5 – 4,5%;
3. Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,5%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71,98;
5. Gini Ratio pada kisaran 0,38 – 0,39;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8 – 5,2%; dan
7. Kontribusi wilayah Sulawesi terhadap pembangunan nasional sebesar 6,15%.

Memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, maka pembangunan nasional tahun 2020 diprioritaskan pada :



1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

#### **4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.**

Pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2020 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target pembangunan lima tahun ketiga tahun 2015 – 2019 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 – 2025 dan mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional.

Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan arahan tersebut maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 ditujukan untuk **“Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi tahun 2020 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2020, meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM dan penurunan Angka kemiskinan;
2. Peningkatan konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
3. Akselerasi Hilirisasi Produk Berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru, dan Pengembangan Destinasi Wilayah;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan Sumberdaya air dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik.



Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2020 yang meliputi antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,20 – 7,40%;
2. Inflasi sebesar 4,5 – 2,5%;
3. PDRB/Kapita sebesar Rp. 57,55 juta;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20%;
5. Kemiskinan sebesar 8,78 – 8,87%; dan
6. Gini Rasio sebesar 0,40.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, difokuskan pada:
  - a. Penyediaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Fakir miskin dengan sasaran berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
  - b. Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan sasaran meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan;
  - c. Peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;
  - d. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan sasaran meningkatnya keterserapan angkatan kerja;
  - e. Promosi kesehatan, bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mencapai dan memelihara derajat kesehatan; dan



- f. Pengembangan permukiman dan pembangunan PSU dengan sasaran terwujudnya fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, difokuskan pada;
    - a. Penyelenggaraan kepelabuhanan dan angkutan pelayanan dengan sasaran Berkembangnya sarana dan prasarana perhubungan udara, laut dan darat;
    - b. Peningkatan layanan dan pemerintah berbasis e-government dengan berkembangnya Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring/hub dalam layanan komunikasi; dan
    - c. Preservasi jalan dan jembatan dengan sasaran Tercukupinya sarana dan prasarana transportasi.
  3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, difokuskan pada;
    - a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan sasaran terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
    - b. Pengembangan industri kecil dan menengah dengan sasaran Tumbuhnya rumpun industri yang kuat; dan
    - c. Peningkatan dan pengembangan ekspor dengan sasaran berkembangnya jaringan perdagangan komoditas unggulan.
  4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan Sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan, difokuskan pada;
    - a. Rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sasaran meningkatnya kapasitas penanganan bencana skala lintas Kabupaten/Kota
    - b. Ketahanan energi dengan sasaran tersedianya pasokan listrik dan energi dari berbagai sumber;



- c. Penuaan lingkungan dengan sasaran terpeliharanya daya dukung lingkungan;
  - d. Peningkatan produksi tanaman pangan dengan sasaran meningkatnya akselerasi pertumbuhan dan kecukupan sarana/prasarana wilayah; dan
  - e. Pengembangan dan pengelolaan, jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan sasaran terwujudnya fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi.
5. Stabilitas ketentraman dan ketertiban mendukung pemilu, difokuskan pada;
- a. Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dengan sasaran terpeliharanya situasi dan kondisi tertib, tenteram, aman dan harmonis;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih dan partisipatif; dan
  - c. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan sasaran; Berkembangnya rasa saling percaya, harmoni antar kelompok, toleransi dan kerukunan.

Penetapan tema dan prioritas pembangunan tersebut diatas merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah provinsi untuk penanganan permasalahan pembangunan yang tergambar dalam beberapa isu strategis pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2020.

#### **4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2020.**

Mengacu pada prioritas pembangunan provinsi dan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan tersebut diatas, maka





pemerintah Kabupaten Gowa didalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 menetapkan tema pembangunan yaitu **“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Ekonomi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Dari tema pembangunan tersebut tergambar bahwa tema pembangunan Kabupaten Gowa, arah kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional terfokus pada pelayanan dasar. Proses pencapaiannya pada tingkat nasional melalui tetap fokus pada penyediaan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan peningkatan SDM untuk menekan angka kemiskinan serta kesenjangan sosial, pada provinsi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan nilai tambah ekonomi dan pemerataan serta optimalisasi pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Selanjutnya mengacu pada visi dan misi serta tema pembangunan tersebut ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu :

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Penurunan angka Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial tepat sasaran;
3. Peningkatan kualitas layanan publik melalui peningkatan SDM dan kemudahan akses layanan;
4. Peningkatan peran perempuan dan anak serta kaum rentan lainnya dalam pembangunan daerah;
5. Penguatan mutu tata kelola pemerintahan melalui penerapan E-Government dan sistem manajemen kinerja;
6. Peningkatan kawasan permukiman yang sehat;
7. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui kualitas infrastruktur dasar penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi;



8. Peningkatan pemanfaatan produksi SDA yang terintegrasi dengan lingkungan hidup.

Program prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis tahun 2020 antara lain :

- 1. Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat.**

Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gowa dalam 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun masih tetap berada pada kelompok menengah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun angka kemiskinan dan pengangguran terus menunjukkan penurunan, namun permasalahan kemiskinan dan pengangguran bukanlah permasalahan statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas sumber daya manusia harus lebih dimaksimalkan lagi.

Persoalan akses dan mutu pelayanan dasar juga perlu terus ditingkatkan. Program-program pro rakyat, pro growth, pro jobs, pro poor, dan pro environment harus terus dikembangkan secara lebih adil dan proporsional.

- 2. Belum optimalnya perekonomian daerah dan masyarakat.**

Berbagai indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi makro dan sektoral, peningkatan PDRB, pendapatan per kapita, dan jumlah tabungan masyarakat, serta maraknya berbagai investasi menandakan adanya kondisi ekonomi yang terus membaik. Meskipun indikator makro ekonomi menunjukkan kemajuan yang berarti, namun belum menjamin adanya distribusi pendapatan yang proporsional. Sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok berpendapatan rendah dan menengah, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi masih dinikmati



sebagian kecil penduduk. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan bergerakinya sektor riil terutama sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti di sektor pertanian dan UMKM.

Permasalahan lainnya adalah sulitnya memprediksi perkembangan variabel makro ekonomi seperti suku bunga global, harga minyak, nilai mata uang rupiah, harga BBM, dan inflasi. Variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga barang dan jasa yang berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh karenanya, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal harus lebih ditingkatkan

**3. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur yang memadai.**

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Gowa masih terbatas. Meskipun anggaran untuk pembangunan infrastruktur selalu menyerap porsi anggaran yang besar dalam APBD, namun karena luasnya wilayah Kabupaten Gowa, maka kebutuhan terhadap infrastruktur selalu jauh lebih besar dari pada kemampuan anggaran yang ada. Belum lagi infrastruktur yang harus diperbaiki karena sudah rusak juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Infrastruktur yang ada juga belum merata pada semua wilayah kecamatan. Masih terdapat kesenjangan infrastruktur pada daerah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, dukungan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata, adil, proporsional, dan berkualitas tetap harus dimaksimalkan agar ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Gowa bergerak sehingga investasi dan daya saing pun kian meningkat.

**4. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.**



Pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan belum optimal. Kinerja Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Rentang kendali pelayanan publik perlu diperpendek dengan memberdayakan peran kecamatan. Jenis pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien dikelola oleh kecamatan seyogyanya diserahkan kepada kecamatan. Penyerahan tersebut tentu disertai dengan dukungan regulasi, sarana prasarana, sumber daya manusia, kelembagaan, sistem, dan penganggaran. Dengan demikian jangkauan pelayanan akan lebih dekat dengan masyarakat yang tersebar di 18 kecamatan.

Penguatan desa dan kelurahan juga perlu mendapat perhatian. Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa akan mengelola dana yang cukup besar, maka kesiapan desa perlu difasilitasi dan didorong untuk mewujudkan desa yang mandiri. Sejauh mana dana tersebut efektif berdampak pada perbaikan kinerja sektor pertanian yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta bagaimana meminimalkan penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana tersebut akibat keterbatasan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas sumber daya manusia khususnya di perdesaan.

Sedangkan kelurahan sebagai perangkat di bawah kecamatan juga perlu didorong agar dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di kelurahan.

**5. Belum optimalnya pengembangan wilayah kecamatan desa dan kelurahan.**

Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, terutama pada pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan perizinan dan



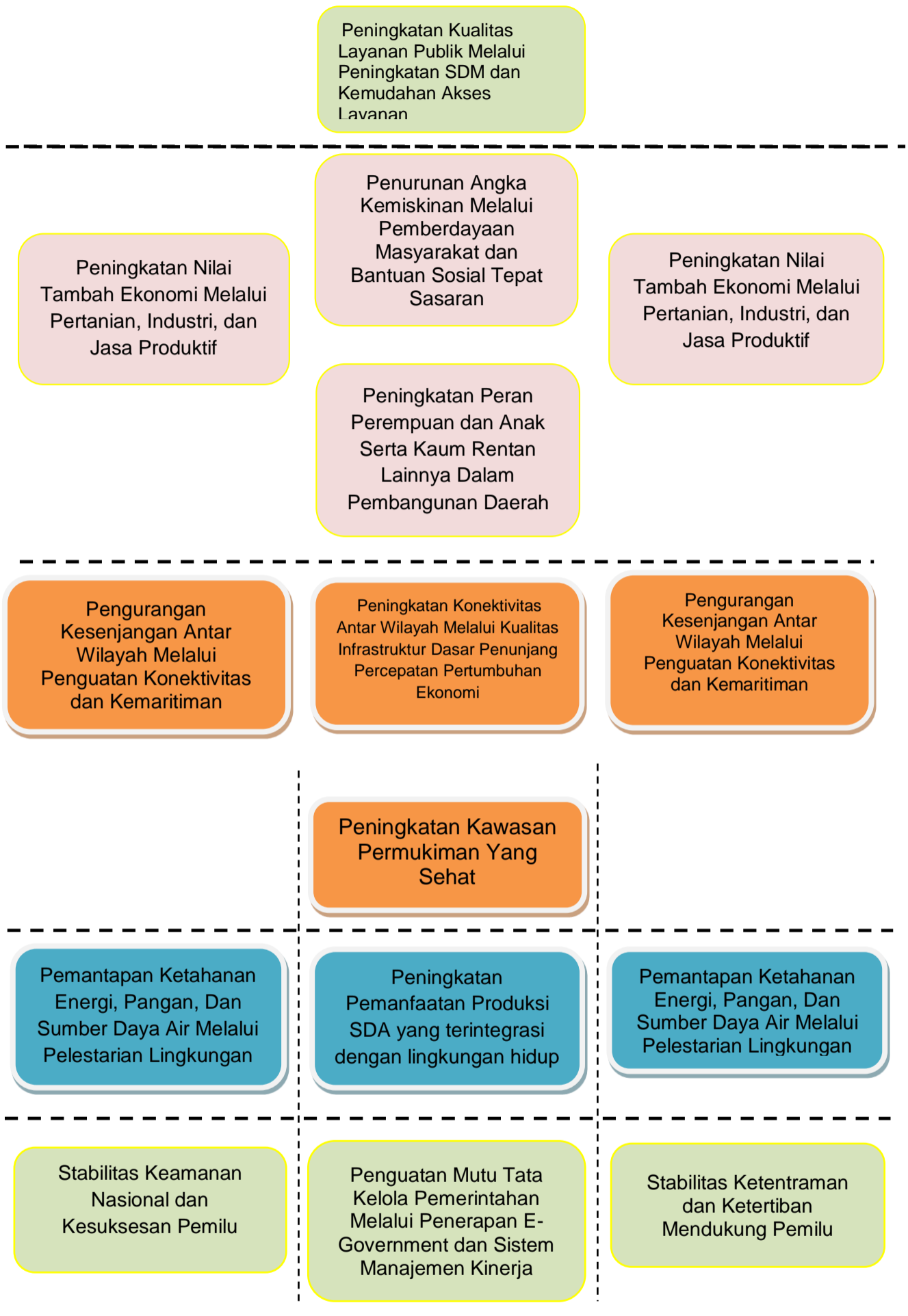
investasi agar bisa memberikan pelayanan prima yang lebih cepat, mudah, murah, dan transparan.

Kapasitas birokrasi juga masih perlu dimaksimalkan. Masih terdapat organisasi perangkat daerah yang belum optimal kinerjanya karena masih terkendala soal kelembagaan dan ketatalaksanaan. Penggunaan teknologi informasi, sistem informasi dan manajemen serta e-government juga belum diterapkan secara terintegrasi dan komprehensif.

Selain itu, upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN masih perlu diperhatikan. Organisasi perangkat daerah masih perlu didorong dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat, efektif, produktif, bersih, transparan dan akuntabel. Sedangkan PNS perlu didorong untuk lebih taat asas, tertib administrasi, disiplin, pegang teguh etika organisasi dan profesi, serta lebih inovatif dan menjaga integritas diri selaku aparat sipil negara.

Keterkaitan dukungan dan kontribusi pembangunan daerah terhadap Pembangunan Nasional dan Propinsi pada tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel berikut :





Tabel. 4.3  
Prioritas dan sasaran pembangunan



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PEMBANGUNAN
1.	<b>Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.</li><li>• Peningkatan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas</li><li>• Ketersediaan pangan yang terjangkau</li><li>• Meningkatnya layanan perumahan yang layak</li><li>• Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha</li><li>• Rasa aman dan tentram</li><li>• Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya</li><li>• Menurunnya jumlah penduduk yang menderita penyakit menular dan tidak menular</li><li>• Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya</li></ul>
2.	<b>Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius.</li><li>• Meningkatnya pengembangan koperasi, UMKM dan industri rumah tangga</li><li>• Meningkatnya iklim investasi dan perdagangan</li><li>• Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya</li></ul>
3.	<b>Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Peningkatan SDM Dan Kemudahan Akses Layanan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan</li><li>• Meningkatnya kinerja pelayanan publik</li><li>• Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya</li></ul>
4.	<b>Peningkatan kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.</li><li>• Meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana.</li><li>• Meningkatnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan</li><li>• Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan olahraga</li><li>• Terpenuhinya kebutuhan penunjang</li></ul>



		lainnya.
5.	<b>Penguatan mutu tata kelola pemerintahan melalui penerapan E-Government dan sistem manajemen kinerja</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kapasitas pemerintahan</li><li>• Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi</li><li>• Meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial politik</li><li>• Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah</li><li>• Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya</li></ul>
6.	<b>Peningkatan kawasan permukiman yang sehat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kualitas kawasan permukiman</li><li>• Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya</li></ul>
7.	<b>Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui kualitas infrastruktur dasar penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kapasitas jalan, jembatan, irigasi dan perhubungan.</li><li>• Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya</li><li>• Meningkatnya kerjasama dan keintegrasian pengembangan wilayah berbasis kawasan</li><li>• Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya</li></ul>
8.	<b>Peningkatan pemanfaatan produksi SDA yang terintegrasi dengan Lingkungan hidup</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan</li><li>• Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata energi dan sumber daya mineral</li><li>• Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</li><li>• Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya</li></ul>





Untuk merespon isu strategis dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan arah dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas” ditetapkan arah kebijakan ;
  - Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan
  - Peningkatan mutu dan pemerataan pendidik dan tenaga pendidikan
2. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas” ditetapkan arah kebijakan :
  - Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui penambahan jumlah tenaga, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
3. Untuk mencapai sasaran “ Meningkatkan ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman” ditetapkan arah kebijakan :
  - Penguatan ketahanan pangan
4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya layanan perumahan yang layak” ditetapkan arah kebijakan :
  - Penataan perumahan dan permukiman layak huni
5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha” ditetapkan arah kebijakan:
  - Peningkatan peluang dan kesempatan kerja
6. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya rasa aman dan tentram” ditetapkan arah kebijakan :
  - Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
7. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak” ditetapkan arah kebijakan :
  - Pengarusutamaan gender
  - Peningkatan pemenuhan kebutuhan hak dasar anak
8. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana” ditetapkan arah kebijakan :
  - Penyadaran KB pada keluarga miskin dan pendidikan kesehatan reproduksi
9. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan” ditetapkan arah kebijakan :
  - Peningkatan kemandirian para fakir miskin komunitas adat terpencil dan PMKS



10. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan olahraga” ditetapkan arah kebijakan :
  - Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan dan fasilitasi cabang olahraga
11. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya” ditetapkan arah kebijakan :
  - Pemeliharaan nilai-nilai budaya masyarakat
12. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius” ditetapkan arah kebijakan :
  - Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
13. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan” ditetapkan arah kebijakan :
  - Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan
14. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata, energi dan sumber daya mineral” ditetapkan arah kebijakan :
  - Pengembangan wisata alam dan wisata budaya
15. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” ditetapkan arah kebijakan :
  - Peningkatan upaya pengendalian pengelolaan limbah akibat kegiatan produksi perusahaan
16. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengembangan koperasi, UMKM dan industri rumah tangga” ditetapkan arah kebijakan :
  - Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
17. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya iklim investasi dan perdagangan” ditetapkan arah kebijakan :
  - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
18. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas jalan, jembatan, irigasi dan perhubungan” ditetapkan arah kebijakan :
  - Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan
19. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya” ditetapkan arah kebijakan :
  - Pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) publik
20. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas kawasan permukiman” ditetapkan arah kebijakan :
  - Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum
  - Gerakan Gowa Bersih



- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan sanitasi
21. Untuk mencapai sasaran “Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan” ditetapkan arah kebijakan:
- Memantapkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan serta lembaga adat dan sosial budaya masyarakat
22. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kerjasama dan keintegrasian pengembangan wilayah berbasis kawasan” ditetapkan arah kebijakan :
- Optimalisasi pemanfaatan kawasan strategis
23. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas pemerintahan” ditetapkan arah kebijakan :
- Peningkatan fasilitasi, asistensi dan advokasi penyusunan dokumen perencanaan
  - Pengembangan SDM aparatur dan pembinaan karier yang lebih efektif
24. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah” ditetapkan arah kebijakan
- Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik
25. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan publik” ditetapkan arah kebijakan :
- Penanganan pengaduan masyarakat
26. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi” ditetapkan arah kebijakan :
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset
27. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial politik” ditetapkan arah kebijakan :
- Peningkatan pembinaan partai politik dan organisasi politik

**Tabel. 4.5**

**Target capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 pada RPJMD**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Tahun 2018	Target tahun 2020 pada rpjmd
1	Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif	1. Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7.60	7.96
			Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	13.27	13.80



		2. Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	69.94	70.01		
		3. Meningkatnya ketersediaan pangan yang terjangkau dan aman	Ketersediaan pangan utama	153,886	163,886		
		4. Meningkatnya layanan perumahan yang layak	Rasio rumah layak huni (%)	70.49	72.32		
		5. Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Angka pengangguran terbuka (%)	3.96	3.37		
		6. Meningkatnya rasa aman dan tenteram	Angka kriminalitas (kasus)	872	842		
			Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Bencana (menit)	< 60	< 60		
2	Meningkatkan kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	7. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	89.49	90.59		
			Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus)	200	190		
		8. Meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2.15	2.03		
			Angka Kelahiran Total/TFR (%)	2.53	2.47		
		9. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Tingkat kemiskinan (%)	7.55	7.25		
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	5.23	5.06		
		10. Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan olahraga	Organisasi kepemudaan yang aktif (%)	49.12	49.64		
			Cabang olah raga yang berprestasi (%)	29.67	32.33		
		3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan religius (3)	11. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya	Cakupan keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan (%)	46.15	61.54
				12. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius	Rasio tempat ibadah terhadap penduduk	1:379	1: 362



4	Mengembangkan potensi sumber daya alam lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan	13. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Produksi padi (ton)	397,624	401,599
			Produksi jagung (ton)	248,114	248,114
			Produksi kakao (ton)	1,600	1600
			Produksi kopi (ton)	2400	2400
			Populasi sapi potong (ekor)	111,993	111993
			Produksi ikan (ton)	762	762
		14. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Tingkat pencemaran lingkungan (baku mutu)	≤ baku mutu	≤ baku mutu
			Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100
			Persentase penanganan sampah (%)	55.23	55.23
		5	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	15. Meningkatkan pengembangan koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan koperasi (%)
Pertumbuhan UMKM (%)	2.75				2,75
Paritas daya beli (Rp)	882.44				876.28
16 Meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata	Kunjungan wisata (orang)			113,854	113,854
17. Meningkatkan iklim investasi dan perdagangan	Nilai investasi (Rp)			523,027.16	601.742,75
	Laju inflasi (%)	4.00	4.00		
6	Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar	18. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan pengairan	Tingkat kemantapan jalan (%)	59.13	70.64
			Angka kecelakaan lalu lintas (kasus)	229	189
			Persentase luas areal irigasi (%)	80.44	86,5
7	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	19. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah (%)	27.09	27.1
			Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	72,82	77.76
8	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	20. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	70.32	71.85
			Kawasan kumuh (ha)	224	214
			Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	60.90	70.20



9	<b>Meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan</b>	21. Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa/ kelurahan (21)	Persentase desa/ kelurahan berstatus cepat berkembang (%)	11.98	14.97
10	<b>Meningkatkan kerjasama dan keintegrasian pengembangan wilayah</b>	22. Meningkatnya kerjasama dan keintegrasian pengembangan wilayah berbasis kawasan (22)	Persentase kawasan yang dikelola (%)	15.38	30.77
11	<b>Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan akuntabilitas kinerja birokrasi</b>	23. Meningkatnya kapasitas pemerintahan	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100
			Penjabaran program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100
			Proporsi PNS dengan Standar Kompetensi Pegawai (SKP) pada kategori baik (%)	92	96
		24. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Nilai Satuan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	cc	cc
			Kategori Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat tinggi	Sangat tinggi
			Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP
12	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>	25. Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori baik (%)	40	60
			Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi (%)	58.82	70.59
13	<b>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis</b>	26. Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	Pertumbuhan kerugian negara/daerah (%)	9.71	8.13



		27. Meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial politik	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu (%)	-	pemilukada 78%
--	--	---	---	---	-------------------

Tabel 4.6

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Prioritas	KINERJA		Penanggung jawab
				Kinerja	Target 2020	
1	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);	Peningkatan akses layanan pendidikan	Pendidikan Gratis	Angka Partisipasi Kasar	SD : 100%, SMP : 96,94% dan SMA 95,05%	Diknas
		Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan	Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)	Angka Kelulusan	100%	Diknas
			Imtaq Indonesia (pengganti calistung)	persentase sekolah menerapkan imtaq indonesia	82 SD	Diknas
		Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan	Investasi SDM seperempat Abad	jumlah siswa yang mengikuti program investasi SDM seperempat abad	3096 Orang	Diknas
		Peningkatan akses layanan kesehatan	Kesehatan gratis	cakupan pelayanan	100%	Dinkes
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan puskesmas non perawatan menjadi perawatan	persentase puskesmas perawatan	25 puskesmas	Dinkes
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan standar pelayanan minimal (akreditasi puskesmas)	persentase puskesmas terakreditasi	5 Puskesmas yang terakreditasi	Dinkes
2	Penurunan angka Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial tepat sasaran;	Penguatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta peningkatan SDM pertanian, peternakan dan perikanan	Program peningkatan sarana dan prasarana produksi (bantuan bibit dan pupuk)	Produksi dan produktivitas padi dan palawija	padi 409.672 ton dan jagung 255.632 ton	Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura



				Produktivitas hortikultura	kentang 26 ton/Ha cabe 7 ton/Ha	Dinas Tanaman Pangan & hortikultura
				Meningkatnya areal tanaman kakao dan kopi	kakao 20.000 ton kopi 2800 ton	Disnakhun
		peningkatan pengembangan kerja sama KUMKM dan informasi bisnis serta pengembangan pemasaran	Pengembangan UMKM unggulan	Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	35 UMKM unggulan	Diskop & UMKM
		Pemberdayaan PMKS terpadu	Perlindungan jaminan sosial	Persentase PMKS yang mendapat bantuan	90%	Dinsos
		Pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang	18,01%	Dinas PMD
		Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang telah dilatih yang memiliki kompetensi	90%	Disnaker
			Program peningkatan kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	66%	Disnaker
3	Peningkatan kualitas layanan publik melalui peningkatan SDM dan kemudahan akses layanan;	Peningkatan kualitas pelayanan terpadu kecamatan	Program pelayanan operasional kelurahan	Pelayanan administrasi di kelurahan	41 kelurahan	18 Kecamatan
		Pengembangan SDM aparatur, pembinaan karier berbasis kompetensi	Program pengembangan data/informasi	terlaksananya pengembangan data/informasi kepegawaian	100%	BKPSDM
		Pengembangan inovasi layanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat	Program peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kerangka reformasi birokrasi	cakupan pelayanan publik	100%	Diskominfo





		Optimalisasi penggunaan dan pengawasan keuangan Desa	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	cakupan pembinaan pengelolaan keuangan desa	126 desa	Dinas PMD
4	Peningkatan peran perempuan dan anak serta kaum rentan lainnya dalam pembangunan daerah	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	jumlah SKPD yang berpartisipasi dalam focal point	45	Dinas PP & PA
		Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	jumlah sarana dan prasarana pada lembaga perlindungan perempuan dan anak	46	Dinas PP & PA
5	Penguatan mutu tata kelola pemerintahan melalui penerapan E-Government dan sistem manajemen kinerja;	Peningkatan kapasitas pemerintahan	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	persentase pejabat fungsional yang bersertifikasi dan persentase aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik dan disiplin PNS	81% dan 100%	Inspektorat Daerah
		Peningkatan perluasan informasi barang dan jasa serta peluang investasi daerah yang dapat dikembangkan	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Indeks peningkatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	100%	Diskominfo
		Pengembangan ketatalaksanaan, kearsipan, persandian, sistem dan budaya kerja perangkat daerah berbasis Teknologi Informasi	Program pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	cakupan informasi yang tersebar luas ke khalayak	100%	Diskominfo
6	Peningkatan kawasan permukiman yang sehat;	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar melalui pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai	Program lingkungan sehat	persentase rumah tangga bersanitasi	32.164 RT	Dinas PU



		Penataan perumahan dan permukiman layak huni	Program pengembangan perumahan	peningkatan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang layak huni	4,61%	Dinas Perkimp
			Program pengelolaan kinerja persampahan	persentase penanganan sampah	51,12%	DLHK
		peningkatan pengawasan dan pemantauan status baku mutu air	Program pengembangan dan pengelolaan air bersih/air minum	persentase penduduk berakses air bersih/minum	77,59%	DLHK
7	Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui kualitas infrastruktur dasar penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi;	Peningkatan ketersediaan dan keandalan sistem jaringan jalan & jembatan melalui pengembangan jaringan infrastruktur transportasi jalan/jembatan bagi peningkatan kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	tersedianya prasarana jalan dan jembatan	29 km	Dinas PU
				terpeliharanya tingkat keandalan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	36 km	Dinas PU
		pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	luas areal irigasi	86,5% (25069,89 Ha)	Dinas PU
8	Peningkatan pemanfaatan produksi SDA yang terintegrasi dengan lingkungan hidup.	Pemanfaatan Ruang terbuka hijau	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	luas ruang terbuka hijau yang dikelola/dipelihara	10 ha	DLHK



		Pengembangan potensi wisata unggulan	pemeliharaan dan penetapan cagar budaya	jumlah benda dan situs dan kawasan cagar budaya yang dipelihara	18 buah	Disparbud
			pelaksanaan even beautiful malino	jumlah wisatawan	133711 orang	Disparbud
		fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif	Program pengembangan sistem pendukung UMKM	persen pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil dan menengah	120 unit UMKM	Diskop



## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN GOWA

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berjalan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta untuk menjawab permasalahan pembangunan yang dihadapi. Rencana program dan kegiatan mencerminkan hasil dari aspirasi dan kepentingan masyarakat. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 selanjutnya dapat diuraikan pada **Tabel Terlampir**. Sebagaimana tercantum pada Lampiran RKPD ini.



## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam bentuk kinerja nyata oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing terhadap kewenangan pemerintah ditingkat kabupaten. Dalam rangka upaya menyelenggarakan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten melakukan penetapan kinerja. Hal ini berorientasi untuk memberikan gambaran tolok ukur kinerja yang perlu dicapai dalam pembangunan daerah tahun 2020 yang akan datang.

Tujuan penetapan indikator kinerja daerah dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RPJMD yang digariskan pada tahun penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja kunci (IKK).



Penetapan indikator kinerja daerah ini seperti yang tertuang di dalam Keputusan Bupati Gowa Nomor 375 /VII/2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kabupaten gowa tahun 2016 – 2021 disajikan pada **Tabel 6.1**. Sedangkan untuk target IKU dapat dilihat **Tabel. 6.2**. Indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan target dan tanggung jawab pelaksanaan urusan perangkat daerah dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.



Tabel. 6.1

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 – 2021 :**

**MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS PADA HAK-HAK DASAR, KESETARAAN GENDER, NILAI BUDAYA DAN AGAMA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	Jumlah tahun bersekolah individu di atas 15 tahun dibagi Jumlah penduduk di atas 15 tahun	BPS, DISDIK
		Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas.	BPS, DISDIK
2	Meningkatnya layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	Angka Harapan Hidup	Tahun	rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	BPS, DINAS KESEHATAN
3	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Angka pengangguran terbuka	%	Jumlah Penganggur Dibanding Dengan Jumlah Angkatan Kerja	BPS, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IDG) : 1. <b>umur panjang dan sehat</b> : 1. indikator : angka harapan hidup perempuan, angka harapan hidup laki-laki 2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan, indeks harapan hidup laki-laki 3. indeks sebaran merata : indeks atau harapan hidup dengan sebaran merata	BPS



				<b>2. pengetahuan</b> : 1. Indikator : AMH perempuan, MYS perempuan, AMH laki-laki, MYS laki-laki. 2.indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan, indeks pendidikan laki-laki 3. indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata <b>3. kehidupan yang layak</b> : 1. indikator : perkiraan pendapatan perempuan, perkiraan pendapatan laki-laki 2. indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan, indeks pendapatan laki-laki 3. indeks sebaran merata : indeks pendapatan dengan sebaran merata	
5	Meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	Ratio Pertumbuhan Penduduk	BPS
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Tingkat kemiskinan	%	Persentase penduduk miskin	BPS
7	Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan olahraga	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi Kepemudaan X 100	Dinas Pemuda Olahraga
8	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan religius	rasio tempat ibadah terhadap penduduk	Rasio	Ketersediaan Rumah Ibadah per 1000 jumlah penduduk	Dinas Sosial

**MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS PADA POTENSI UNGGULAN DAN EKONOMI KERAKYATAN**





<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	Meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Produksi Padi	Ton	Jumlah produksi tanaman Padi (ton) dalam satu tahun	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Produksi Jagung	Ton	Jumlah produksi tanaman Jagung (ton) dalam satu tahun	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Produksi Kopi	Ton	Jumlah produksi tanaman Kopi (ton) dalam satu tahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Produksi Kakao	Ton	Jumlah produksi tanaman Kakao (ton) dalam satu tahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Produksi Sapi potong	Ton	Jumlah produksi Sapi Potong (ton) dalam satu tahun	Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Produksi ikan	Ton	Jumlah produksi Ikan (ton) dalam satu tahun	Dinas Perikanan
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	tingkat pencemaran lingkungan	Kategori	Besaran, kadar dan deskripsi parameter-parameter, kategori kimia anorganik, kimia organik, biologik, fisik dan radioaktif yang digunakan sebagai persyaratan bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan menurut peruntukannya, dan	Dinas Lingkungan Hidup



				telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.	
3	Meningkatnya pengembangan koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif	pertumbuhan koperasi aktif	%	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jumlah koperasi aktif dibagi total koperasi x 100 %	Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		pertumbuhan UMKM	%	jumlah UMKM dibagi total UMKM x 100 %	Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		paritas daya beli	Rp	Perhitungan melalui Survey komoditas oleh BPS	BPS
4	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gowa bekerja sama dengan dinas/instansi terkait (Dishub, PT. Jasa Marga, Kantor Imigrasi, PT. Angkasa Pura)	Dinas Pariwisata, BPS
5	Meningkatnya iklim investasi dan perdagangan	Nilai Investasi	Rp	Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan	BPS, Dinas Penanaman Modal dan PTSP



				jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.	
		Laju inflasi	%	Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel berdasarkan letak wilayah Kabupaten Gowa menggunakan data Kota	BPS



Makassar.

**MISI 3: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERORIENTASI PADA INTERKONEKSITAS ANTAR WILAYAH DAN SEKTOR**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan dan pengairan	tingkat kemantapan jalan	%	Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas.	Dinas Pekerjaan Umum
		angka kecelakaan lalu lintas	Kejadian	jelas	Polres Gowa
		Persentase luas areal irigasi	%	Persentase Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  $\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	Dinas Pekerjaan Umum
2	Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya	Rasio Ruang Terbuka Hijau	%	$= \frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum
		persentase ketaatan	%	Ketaatan terhadap RTRW merupakan	Dinas Pekerjaan



		terhadap RTRW		kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Rasio ketaatan dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$	Umum
3	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	persentase penduduk berakses air bersih	%	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\frac{\text{Jumlah RT menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$	Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup
4		Luas kawasan kumuh	Ha	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas PU dan Dinas Lingkungan



5		persentase rumah tangga bersanitasi	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Hidup Dinas PU
---	--	-------------------------------------	---	---	-------------------

**MISI 4: MENINGKATKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Menguatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan	persentase desa/kelurahan cepat berkembang	%	$\frac{\text{desa/kelurahan cepat berkembang}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**MISI 5: MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN DEMOKRATIS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kapasitas pemerintahan	Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	Bappeda
2		Persentase Penjabaran program RKPD ke dalam APBD	%	$\frac{\text{Jumlah program APBD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RKPMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	Bappeda
3	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai Satuan Akuntabilitas	Kategori	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Gowa	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan



	kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Instansi Pemerintah (SAKIP)			Aparatur Daerah Setda
4		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan
5		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Kategori	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa menjadi kategori / nilai yang diperoleh	Badan Pengelola Keuangan Daerah
6	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori baik	%	$= \frac{\text{SKPD yang memiliki IKM Kategori Baik}}{\text{Jumlah Seluruh SKPD}} \times 100$	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda
		Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi	%	$= \frac{\text{SKPD yang Menerapkan Sistem Informasi}}{\text{Jumlah Seluruh SKPD}} \times 100$	Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
7	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	pertumbuhan kasus kerugian negara/daerah	%	$= \frac{(\text{Jumlah kerugian Negara tahun ke } - n) - (\text{Jumlah kerugian Negara tahun ke } - n - 1)}{(\text{Jumlah kerugian Negara tahun ke } - n)} \times 100$	Inspektorat Daerah



8	Meningkatnya partisipasi dalam kehidupan sosial politik	persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	%	Persentase peartisipasi Pemilihan dalam Bupati, Gubernur, Legislatif dan Pemilihan Presiden	Bakesbangpol
---	---	---	---	---	--------------





**Tabel.6.2**  
Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2020

No	TUJUAN	INDIKATOR	Capaian 2018	TARGET 2020	KONDISI AKHIR 2021
1	Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif (1)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7.74*	7.96	8.32
		Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	13.04*	13.80	14.32
		Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	69.95*	70.01	70.07
		Ketersediaan pangan utama (ton)	314.556	163,886	173,886
		Rasio rumah layak huni (%)	73	72.32	73.95
		Angka pengangguran terbuka (%)	4.8*	3.37	3.17
		Angka kriminalitas (kasus)	1.359	842	812
		Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Bencana (menit)	<60	< 60	< 60
2	Meningkatkan kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Indeks Pembangunan Gender	90.48	90.59	91.69
		Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus)	54	190	180
		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1.77	2.03	1.90
		Angka Kelahiran Total/TFR (%)	2.47	2.47	2.40
		Tingkat kemiskinan (%)	8.42*	7.25	6.95



		Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (%)	5.39	5.06	4.91
		Organisasi kepemudaan yang aktif (%)	49.42	49.64	50.16
		Cabang olah raga yang berprestasi (%)	31.01	32.33	35.00
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan religius (3)	Cakupan keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan (%)	58	61.54	76.92
		Rasio tempat ibadah terhadap penduduk (%)	1:231	0,293055556	0,28125
4	Mengembangkan potensi sumber daya alam lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan (4)	Produksi padi (ton)	412.964	401,599	409,672
		Produksi jagung (ton)	337.174	250,595	255,632
		Produksi kakao (ton)	1.485	1,7	2
		Produksi kopi (ton)	2.572	2,5	2,8
		Populasi sapi potong (ekor)	111.925	114,424	119,287
		Produksi ikan (ton)	781.50	805	900
		Tingkat pencemaran lingkungan (baku mutu)	≤ Baku Mutu	≤ baku mutu	≤ baku mutu



		Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100
		Persentase penanganan sampah (%)	60.45	57.48	61.50
5	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (5)	Pertumbuhan koperasi (%)	4.22	4.38	4.77
		Pertumbuhan UMKM (%)	3.85	2.77	2.80
		Paritas daya beli (Rp)	900.90	882.44	894.76
		Kunjungan wisata (orang)	212.773	120,473	133,711
		Nilai investasi (Rp)	1.960.011.456.993	692,305.03	916,369.73
		Laju inflasi (%)	3.38	4.00	4.00
6	1. Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar (6)	Tingkat kemantapan jalan (%)	81.82	70.64	82.45
		Angka kecelakaan lalu lintas (kasus)	299	189	149
		Persentase luas areal irigasi (%)	87.72	86.5	93.41
7	2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang (7)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah (%)	35.02	27.1	27.12
		Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	71.79	77.76	80.91
8	3. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman (8)	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	76.46	71.85	73.80
		Kawasan kumuh (ha)	218.5	214	204
		Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	70	70.20	80.20
9	1. Meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan (9)	Persentase desa/ kelurahan berstatus cepat berkembang (%)	23.95	17.96	23.95



10	2. Meningkatkan kerjasama dan keintegrasian pengembangan wilayah (10)	Persentase kawasan yang dikelola (%)	23.07	30.77	46.15
11	1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan akuntabilitas kinerja birokrasi (11)	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	90	100	100
		Penjabaran program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100
		Proporsi PNS dengan Standar Kompetensi Pegawai (SKP) pada kategori baik (%)	99.73	96	100
		Nilai Satuan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)		CC	B
		Kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		Sangat tinggi	Sangat tinggi
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP
12	2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (12)	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori baik (%)	62	60	80
		Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi (%)	68	70.59	82.35
13	3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis (13)	Pertumbuhan kerugian negara/daerah (%)	0.48	8.13	6.99



		Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu (%)	76.18	Pemilu legislatif (78%), Pemilu pres (77%)	Pemilukada kab (72%)
--	--	---	-------	--	----------------------

**Tabel 6.3**  
**Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

**KABUPATEN: GOWA**

NO	URUSAN	NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	KET
<b>URUSAN WAJIB</b>					
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>1</b>	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	97.90 %	
		<b>2</b>	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98.71 %	
		<b>3</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	108.15 %	
		<b>4</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100.28 %	
		<b>5</b>	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.00 %	
		<b>6</b>	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.00 %	
		<b>7</b>	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %	
		<b>8</b>	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100 %	
		<b>9</b>	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100 %	
		<b>10</b>	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95.63 %	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>11</b>	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100 %	
		<b>12</b>	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98.76 %	
		<b>13</b>	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %	
		<b>14</b>	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	



		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100 %	
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100 %	
		17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	8.13 %	
		18	Cakupan kunjungan bayi	98.39 %	
3	Lingkungan Hidup	19	Penanganan sampah	95.78 %	
		20	Kebersihan	100 %	
		21	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	250.52 %	
		22	Penegakan hukum lingkungan	100 %	
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	90.30 %	
		24	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	87.68 %	
		25	Rumah Tangga Per-Sanitasi	99.02 %	
		26	Kawasan Kumuh	0.06 %	
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	36.10 %	
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Rumah tangga pengguna air bersih	98.73 %	
		29	Lingkungan pemukiman kumuh	0.03 %	
		30	Rumah layak huni	97.90 %	
6	Kepemudaan & Olahraga	31	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0.02 %	
		32	Lapangan olahraga	0.63 %	
7	Penanaman Modal	33	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	(9.40) %	
8	Koperasi & UKM	34	Koperasi aktif	100 %	
		35	Usaha Mikro dan Kecil	96.34 %	
9	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	36	Kepemilikan KTP	97.48 %	
		37	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	303.07	
		38	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	



10	Tenaga Kerja	39	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh	5.22 %	
		40	Pencari kerja yang ditempatkan	43.16 %	
11	Pangan	41	Regulasi ketahanan pangan	Ada	
		42	Ketersediaan pangan utama	106.90 %	
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4.05 %	
		44	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	92.43 %	
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	92.38 %	
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46	Prevalensi peserta KB aktif	68.70 %	
		47	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan	125.56 %	
14	Perhubungan	48	Angkutan darat	Normalisasi	
15	Komunikasi & Informatika	49	Web site milik pemerintah daerah	Ada	
		50	Pameran/expo	5 Kali	
16	Pertanahan	51	Luas lahan bersertifikat	99.89 %	
		52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100 %	
		53	Penyelesaian Ijin Lokasi	100 %	
17	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	54	PKK aktif	100 %	
		55	Posyandu	100 %	
18	Sosial	56	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Ada	
		57	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	15.73 %	
		58	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	48.14 %	
19	Kebudayaan	59	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10 Kali	
		60	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5 Buah	
		61	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100 %	
20	Statistik	62	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	
		63	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	
21	Kearsipan	64	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	100 %	
		65	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	6 (Enam) Kegiatan	



22	Perpustakaan	66	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	64.37 %	
		67	Pengunjung perpustakaan	5.58 %	
<b>URUSAN PILIHAN</b>					
1	Kelautan dan Perikanan	1	Produksi perikanan	148.72 %	
		2	Konsumsi ikan	98.9 %	
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	824.211 %	
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017	29.74 %	
3	Pariwisata	5	Kunjungan wisata	212.773 orang	
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017	2.46 %	
4	Perindustrian	7	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017	6.51 %	
		8	Pertumbuhan Industri	0.07 %	
5	Perdagangan	9	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016	22.76 %	
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$ 2.649.571,36	
8	Transmigrasi	11	Transmigran swakarsa	Normalisasi	
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	
		2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	
		3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	
		4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100 %	
		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	29 (Dua Puluh Sembilan) Buah	
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	4 Kegiatan	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	10 Kegiatan	





PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GOWA



## BAB VII P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2020. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD). Mekanisme penyusunan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2020 dimulai dengan dilaksanakannya Musrenbang RKPD pada awal Tahun 2019 mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Proses Musrenbang tersebut sebagai bagian proses demokratisasi. Mekanisme perencanaan daerah memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengajukan usulan, saran maupun rekomendasi pelaksanaan pembangunan yang dibutuhkan lingkungannya. Dengan demikian dokumen RKPD Tahun 2020 secara substansi adalah dokumen yang memaduserasikan antara kebutuhan aktual masyarakat dengan program/kegiatan sebagai implementasi visi dan misi Kabupaten Gowa.

Melalui proses tersebut diharapkan substansi RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2020 nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah baik yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi global beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya maupun perkembangan internal yang didorong oleh terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan kepentingan internal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Meskipun demikian harus tetap disadari bahwa RKPD ini tidak dengan serta merta bisa menyelesaikan seluruh permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Gowa. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, sebuah hasil perencanaan yang baik masih harus ditindaklanjuti dengan proses pelaksanaan



yang baik pula. Karena itu masih dibutuhkan apresiasi dan partisipasi aktif dari seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa beserta seluruh elemen yang terkait untuk mempedomani, menjabarkan, dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan didalam RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2020.

Karena itulah maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2020 untuk dijadikan pedoman penerapannya sebagai berikut :

1. Seluruh unsur pemerintahan daerah beserta seluruh lapisan dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha memiliki tanggung jawab bersama sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing agar arahan kebijakan beserta pokok-pokok program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai target dan sasaran yang ditetapkan.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan harmonisasi penerapan rencana program dan kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib menjabarkan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2020 ini kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA-PD setelah disesuaikan dengan arahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.
3. KUA disusun dalam rangka menerjemahkan arahan kebijakan, prioritas dan sasaran program/kegiatan pembangunan daerah kedalam bahasa penganggaran, sedangkan PPAS disusun dalam rangka menjabarkan sekaligus mempertajam arahan KUA kedalam rencana anggaran sebagai jembatan menuju penyusunan RAPBD. Dengan demikian, antara RKPD dengan KUA, PPAS, dan RAPBD terdapat hubungan kausalitas yang tidak boleh terputus satu dengan lainnya. Karena itu seluruh pihak yang terkait terutama yang berkompeten dalam bidang penganggaran harus mampu



bekerjasama dengan sebaik-baiknya agar konsistensi dan sinergitas antara RKPD dengan RAPBD dapat diwujudkan sesuai yang diharapkan.

4. Guna terwujudnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2020. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian intern terhadap seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dan selanjutnya melaporkannya kepada Bupati Gowa melalui Kepala Bappeda sesuai mekanisme dan tatacara yang berlaku (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009).
5. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses penjangkaran aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Perangkat Daerah ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
6. Dengan adanya RKPD Tahun 2020, prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kualitas hidup masyarakat akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan tersinergi dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini disusun agar dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumen-dokumen lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga bisa terwujud sinergi diantara dokumen-dokumen yang ada. Namun demikian dokumen akan lebih bermakna apabila adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjadikan dokumen ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gowa. Pada akhirnya sebagai suatu dokumen perencanaan tidak menutup



kemungkinan apabila dalam penyusunan dokumen ini masih banyak ditemui kesalahan baik yang bersifat substansial maupun redaksional.

Untuk itu segala masukan, evaluasi maupun rekomendasi dari semua pihak masih sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa dimasa-masa mendatang.

**BUPATI GOWA**

**ADNAN PURICTHA ICHSAN YL**